



MONOGRAFI DESA LAHABARU

Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara

A photograph of a person sitting on the floor, using a laptop. They are gesturing with their hands while talking to a group of people. In the background, a woman is sitting on a chair, looking at her phone. The scene is outdoors, possibly in a rural or semi-rural area, with laundry hanging on a rack in the background. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

MONOGRAFI DESA LAHABARU

Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara

MONOGRAFI DESA LAHABARU

Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara

Penulis:

Dr. Sofyan Sjaf
La Elson, M.Si.
Lukman Hakim, M.Si.
Affan Ray Mahardika, M.Si
M. Agriawan Suryaalim S.Pt, M.Si
Zessy Ardinal Barlan, M.Si.
Andri Sarifuddin, S.Pd, M.Si
Chatarina Novianti, S. Hut

Desain Sampul & Penata Letak:

Badar Muhammad, S.I.Kom.
Adhitiya Muktafa Adnan Musaddad, S.K.Pm

Jumlah Halaman:

101 Hal + viii Hal Romawi

Penerbit:

Fakultas Ekologi Manusia - IPB University
© 2 AGUSTUS 2023. HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa
izin tertulis dari penerbit.

**DATA DESA
P R E S I S I**

KATA PENGANTAR

Data Desa Presisi (DDP) adalah gagasan Dr. Sofyan Sjaf, dkk. yang dirintis sejak tahun 2014 pasca lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada tahun 2014, kami membidani lahirnya inovasi kelembagaan Sekolah *Drone* Desa (SDD) sebagai pendekatan untuk membangun data spasial desa secara partisipatif. Beberapa daerah dan yang telah mengadopsi pendekatan ini adalah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Lanjut pada tahun 2017, Dr. Sofyan Sjaf, dkk. mulai mengawinkan pendekatan spasial dengan pendekatan sensus dan partisipasi warga, pendekatan yang mengawinkan dimensi spasial, sensus dan partisipatif dinamakan *Drone Participatory Mapping* (DPM). Pendekatan DPM ini diimplementasikan pada tahun 2017 di Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor. Hanya saja sensus dilakukan secara manual dengan instrumen kuesioner. Pada tahun 2019, dimulai pengembangan pendekatan DPM dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses sensus keluarga di pedesaan, yaitu MERDESA Aplikasi yang diinisiasi oleh Tim Unit Desa Presisi. Saat ini bersamaan dengan monografi ini terbit jumlah desa yang telah diimplementasikan DDP adalah sebanyak 93 Desa yang tersebar di 11 Provinsi di Indonesia.

Buku Monografi Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara ini adalah bukti bahwa dengan partisipasi warga, DDP bisa dibangun dari desa. Kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya pengetahuan, adalah suatu keniscayaan untuk menghasilkan pembangunan presisi yang dimulai dari desa, sehingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi warga di pedesaan. DDP yang menyintesis 3 pendekatan (spasial, sensus, dan partisipatif) adalah bukti bahwa kita bisa menghasilkan *big data* desa ke depan.

Terakhir, buku monografi desa ini ditulis berdasarkan enam aspek kesejahteraan rakyat (kesra) sebagai wujud amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Keenam aspek kesra yang dimaksud, yaitu: demografi; sandang pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial; sosial, hukum dan HAM; infrastruktur dan lingkungan hidup. Semoga buku ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai basis perencanaan dan implementasi pembangunan di Desa Lahabaru

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
PENDAHULUAN.....	2
RUMUSAN MASALAH.....	4
TUJUAN PENDATAAN.....	7
METODOLOGI.....	8
Penggunaan Metode DDP.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
Diskursus Metodologi Pendataan Pedesaan.....	17
DDP Sebagai Metode dan Pendekatan Baru Pendataan Pedesaan.....	18
GEOGRAFI Desa.....	22
2.1 Sejarah Desa.....	22
2.2 Kejadian Penting.....	24
2.3 Peta Orthophoto.....	26
2.4 Peta Administrasi.....	27
2.5 Peta Sarana dan Prasarana.....	28
2.6 Peta Penggunaan Lahan.....	29
2.7 Peta Topografi.....	31
DEMOGRAFI DESA.....	34
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	42
INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	50
KEHIDUPAN SOSIAL, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM.....	58
KESEHATAN, PEKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL.....	66
SANDANG, PANGAN DAN PAPAN.....	76
DATA SOSIAL.....	90
9.1 Kelembagaan Desa (Diagram Venn).....	90
9.2 Pohon Masalah.....	91
9.3 Kalender Musim.....	93
9.4 Stratifikasi Sosial.....	95
KESIMPULAN.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan implementasi DDP.....	10
Gambar 2 Peta orthophoto Desa Lahabaru	26
Gambar 3 Peta administrasi Desa Lahabaru	27
Gambar 4 Peta sarana dan prasarana Desa Lahabaru	28
Gambar 5 Peta Penggunaan Lahan Desa Lahabaru.....	29
Gambar 6 Peta Topografi Desa Lahabaru.....	31
Gambar 7 Jumlah kepala keluarga dan penduduk di setiap Dusun di Desa Lahabaru	34
Gambar 8 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Lahabaru.....	35
Gambar 9 Jumlah anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin di Desa Lahabaru.	35
Gambar 10 Sebaran penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan usia (piramida penduduk) Desa Lahabaru	36
Gambar 11 Piramida penduduk Dusun 1.....	36
Gambar 12 Piramida penduduk Dusun 2.....	37
Gambar 13 Piramida penduduk Dusun 3.....	37
Gambar 14 Piramida penduduk Dusun IV.....	38
Gambar 15 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan ktp di Desa Lahabaru	38
Gambar 16 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran di Desa Lahabaru	38
Gambar 17 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin penduduk di Desa Lahabaru	39
Gambar 18 Jumlah keluarga berdasarkan lama tinggal di Desa Lahabaru.....	39
Gambar 19 Peta sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Lahabaru	43
Gambar 20 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Lahabaru	43
Gambar 21 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki dan jenis kelamin di Desa Lahabaru	44
Gambar 22 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Desa Lahabaru	45
Gambar 23 Jumlah keluarga berdasarkan bantuan pendidikan yang diterima di Desa Lahabaru	45
Gambar 24 Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Desa Lahabaru.....	46
Gambar 25 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa yang digunakan di Desa Lahabaru.	47
Gambar 26 Peta sebaran keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Lahabaru	51
Gambar 27 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Lahabaru	51
Gambar 28 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan <i>handphone</i> di Desa Lahabaru.....	52
Gambar 29 Jumlah penduduk berdasarkan merek <i>handphone</i> yang digunakan di Desa Lahabaru.	53
Gambar 30 Jumlah penduduk berdasarkan merek <i>provider</i> yang digunakan di Desa Lahabaru.....	53
Gambar 31 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan pekarangan di Desa Lahabaru.....	54
Gambar 32 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Desa Lahabaru	54
Gambar 33 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Desa Lahabaru	55
Gambar 34 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di pekarangan pada Desa Lahabaru	56
Gambar 35 Jumlah penduduk berdasarkan status tinggal di Desa Lahabaru	58
Gambar 36 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan di Desa Lahabaru	59
Gambar 37 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan kulkas di rumah di Desa Lahabaru	60
Gambar 38 Jumlah penduduk berdasarkan pengalaman menjadi korban kejahatan di Desa Lahabaru	60
Gambar 39 Jumlah keluarga berdasarkan merek sepeda motor yang dimiliki Di Desa Lahabaru.....	61
Gambar 40 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi <i>refreshing</i> di Desa Lahabaru	62
Gambar 41 Jumlah keluarga berdasarkan sumber pinjaman di Desa Lahabaru	62
Gambar 42 Jumlah keluarga berdasarkan akses media informasi di Desa Lahabaru	63
Gambar 43 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga penyandang disabilitas di Desa Lahabaru	63
Gambar 44 Jumlah keluarga berdasarkan pengguna KB di Desa Lahabaru	66
Gambar 45 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan JKN-KIS/BPJS di Desa Lahabaru	67
Gambar 46 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan bpjs ketenagakerjaan di Desa Lahabaru.....	68
Gambar 47 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga menjadi TKI di Desa Lahabaru.....	68
Gambar 48 Jumlah keluarga berdasarkan penyakit berat yang diderita di Desa Lahabaru	69
Gambar 49 Jumlah keluarga berdasarkan tempat menabung di Desa Lahabaru	69

Gambar 50 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sampingan di Desa Lahabaru.....	70
Gambar 51 Jumlah keluarga berdasarkan akses lahan di Desa Lahabaru	71
Gambar 52 Jumlah Keluarga berdasarkan Pemanfaatan Lahan yang dimiliki di Desa Lahabaru.....	71
Gambar 53 Jumlah keluarga berdasarkan status dan lokasi lahan pertanian di Desa Lahabaru.....	72
Gambar 54 Jumlah keluarga berdasarkan Bukti Kepemilikan Lahan Warga di Desa Lahabaru.....	72
Gambar 55 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Desa Lahabaru.....	73
Gambar 56 Jumlah balita penerima asi eksklusif di Desa Lahabaru.....	74
Gambar 57 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi pemeriksaan kesehatan balita di Desa Lahabaru	74
Gambar 58 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi beli pakaian per tahun di Desa Lahabaru	76
Gambar 59 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air keluarga di Desa Lahabaru	77
Gambar 60 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan sumber air minum.....	78
Gambar 61 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Desa Lahabaru.....	80
Gambar 62 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan Di Desa Lahabaru	80
Gambar 63 Jumlah keluarga berdasarkan tempat belanja kebutuhan pokok Di Desa Lahabaru	81
Gambar 64 Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Desa Lahabaru	84
Gambar 65 Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Desa Lahabaru.....	84
Gambar 66 Jumlah Keluarga Berdasarkan Jenis Dinding Rumah Yang Ditinggali Di Desa Lahabaru.....	85
Gambar 67 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Desa Lahabaru	86
Gambar 68 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan jamban di dalam rumah di Desa Lahabaru	87
Gambar 69 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Desa Lahabaru.....	87
Gambar 70 Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Desa Lahabaru.....	88
Gambar 71 Diagram Venn Kelembagaan Desa Lahabaru.....	90
Gambar 72 Pohon Masalah Desa Lahabaru	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tujuh isu strategis desa yang membutuhkan Data Desa Presisi	5
Tabel 2 Parameter sensus dengan Merdesa Sensus Aplikasi	13
Tabel 3 Nama-nama kepala desa lahaboru sejak tahun 1977-2023	23
Tabel 4 Peristiwa Penting Desa Lahaboru	25
Tabel 5 Sarana dan Prasarana Umum Desa Lahaboru	28
Tabel 6 Jenis penggunaan lahan Desa Lahaboru	30
Tabel 7 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin Desa Lahaboru	39
Tabel 8 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Lahaboru	44
Tabel 9 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Desa Lahaboru	45
Tabel 10 Jumlah penduduk berdasarkan etnisitas di Desa Lahaboru	46
Tabel 11 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa daerah yang digunakan di Desa Lahaboru	47
Tabel 12 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Lahaboru	52
Tabel 13 Jumlah keluarga berdasarkan aset ekonomi yang dimiliki di Desa Lahaboru	52
Tabel 14 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Desa Lahaboru	54
Tabel 15 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Desa Lahaboru	55
Tabel 16 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di Pekarangan pada Desa Lahaboru	56
Tabel 17 Jumlah keluarga berdasarkan penerima program bantuan sosial di Desa Lahaboru	59
Tabel 18 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan sarana transportasi di Desa Lahaboru	60
Tabel 19 Jumlah keluarga berdasarkan merek mobil yang dimiliki di Desa Lahaboru	61
Tabel 20 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS di Desa Lahaboru	67
Tabel 21 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Desa Lahaboru	73
Tabel 22 Jumlah ternak yang dimiliki penduduk di Desa Lahaboru	73
Tabel 23 Jumlah Keluarga Berdasarkan Frekuensi Beli Pakaian Per Tahun di Desa Lahaboru	77
Tabel 24 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Keluarga di Desa Lahaboru	77
Tabel 25 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Minum Keluarga Di Desa Lahaboru	79
Tabel 26 Jumlah keluarga berdasarkan bahan bakar masak di Desa Lahaboru	79
Tabel 27 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Desa Lahaboru	80
Tabel 28 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan di Desa Lahaboru	81
Tabel 29 Jumlah keluarga berdasarkan tempat belanja kebutuhan pokok di Desa Lahaboru	81
Tabel 30 konsumsi karbohidrat per bulan di Desa Lahaboru	82
Tabel 31 Jumlah konsumsi lauk hewani per bulan di Desa Lahaboru	82
Tabel 32 Jumlah konsumsi lauk nabati per bulan di Desa Lahaboru	82
Tabel 33 Jumlah konsumsi sayuran per bulan di Desa Lahaboru	82
Tabel 34 Jumlah konsumsi buah-buahan per bulan di Desa Lahaboru	83
Tabel 35 Jumlah konsumsi bumbu per bulan di Desa Lahaboru	83
Tabel 36 Jumlah konsumsi bahan masak per bulan di Desa Lahaboru	83
Tabel 37 Jumlah konsumsi bahan pelengkap per bulan di Desa Lahaboru	83
Tabel 38 Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Desa Lahaboru	84
Tabel 39 Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Desa Lahaboru	85
Tabel 40 Jumlah keluarga berdasarkan jenis dinding rumah yang ditinggali di Desa Lahaboru	86
Tabel 41 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Desa Lahaboru	87
Tabel 42 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Desa Lahaboru	88
Tabel 43 Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Desa Lahaboru	88
Tabel 44 Kalender Musim Pertanian Desa Lahaboru	95
Tabel 45 Stratifikasi Sosial Masyarakat Desa Lahaboru	95
Tabel 46 Mobilitas Sosial Masyarakat Desa Lahaboru	96



Lab.
DATA DESA
PRESISI

Fakultas Ekologi Manusia - IPB University



RINGKASAN EKSEKUTIF

Desa Lahabaru secara administratif berada di Kecamatan Watunohu yang berbatasan dengan Desa Samaturu di bagian utara, bagian Selatan dengan Desa Watunohu, bagian timur dengan Desa Beringin (Kecamatan Ngapa) dan bagian barat dengan Desa Nyule. Luas Desa Lahabaru melalui pemetaan spasial berbasis pembangunan Data Desa Presisi Bulan Juli-Agustus 2023 adalah sebesar 117,230 Ha. Masing-masing Dusun memiliki luasan wilayah Dusun, yaitu Dusun 1= 47,739 Ha, Dusun 2= 23,345 Ha, Dusun 3= 22,326Ha dan Dusun 4= 23,766Ha. Dusun 1 merupakan Dusun yang memiliki area paling luas di Desa Lahabaru. Jumlah keluarga di Desa Lahabaru adalah 274 keluarga. Dari 274 keluarga yang tinggal terdapat 960 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 475 jiwa dan perempuan sebanyak 485 jiwa. Piramida penduduk Desa Lahabaru menggambarkan bahwa terdapat 668 jiwa usia produktif. Sedangkan usia non produktif sebanyak 292 jiwa. Usia non produktif berkisar dari usia 0-14 tahun dan usia lebih dari 60 tahun.

Penduduk Desa Lahabaru mayoritas makan dengan frekuensi 3 kali sehari, kemudian terdapat pula penduduk yang makan lebih dari 3 kali sehari serta 2 kali sehari dengan jumlah yang relatif lebih sedikit. Terdapat 79 KK dengan frekuensi makan lebih dari 3 kali sehari, 32 KK dengan frekuensi makan 3 kali sehari kemudian 104 KK dengan frekuensi makan 2 kali sehari. Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Lahabaru terbagi dalam 7 (tujuh) kategori, yakni tidak memiliki ijazah, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, D-1/D-2/D-3, D-4/S-1,S-2. Berdasarkan dari total jumlah penduduk di Desa Lahabaru sebanyak 960 jiwa, mayoritas penduduk Desa ini sebanyak 182 jiwa (18,96 persen) memiliki Ijazah di tingkat SMA/Sederajat. Sementara itu, untuk penduduk yang tidak memiliki ijazah di Desa Lahabaru tercatat berjumlah 241 jiwa (25,10 persen), kemudian diikuti penduduk yang memiliki ijazah SD/Sederajat sebanyak 245 jiwa (25,52 persen), ijazah SMP/Sederajat sebanyak 176 jiwa (18,33 persen) ijazah D-4/S-1 sebanyak 68 jiwa (7,08 %), Ijazah D-1/D-2/D-3 sebanyak 44 jiwa (4,58 persen) dan 4 jiwa (0,42 persen) memiliki Ijazah S-2.

Dari jumlah penduduk berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS Kesehatan, terdapat 353 jiwa yang tidak mengikuti program JKN-KIS/BPJS. Adapun 374 jiwa merupakan Penerima Bantuan Iuran yang tersebar di setiap dusun. Sebanyak 60 jiwa tercatat sebagai peserta mandiri, 172 jiwa sebagai PUIK Negara dan 1jiwa sebagai PUIK Swasta. Jumlah keluarga berdasarkan partisipasi organisasi di Desa Lahabaru terbagi dalam 14 kategori keikutsertaan, yakni LSM/ NGO, Kelompok Tani, Kelompok Buruh, ORMAS, Koperasi/ Lembaga ekonomi lokal, kelompok pengajian, karang taruna,

kelompok olahraga/hobi, gotong royong, siskamling, musdes/musdus, dan kelompok seni budaya. Berdasarkan dari total jumlah keluarga di Desa Lahabaru yakni sebanyak 274 keluarga, di dalamnya terdapat keluarga yang mengikuti satu atau lebih organisasi sekaligus. Meskipun begitu, kategori kegiatan gotong royong masih menjadi kategori terbanyak di antara kategori keikutsertaan organisasi lainnya. Adapun untuk jumlah keluarga yang tercatat sebagai anggota kelompok kelompok tani di Desa Lahabaru sebanyak 28 keluarga. Selanjutnya, pada kategori keikutsertaan kelompok ormas keagamaan 21 keluarga yang tercatat sebagai anggota kelompok tersebut. Kelompok pengajian sebanyak 16 keluarga.

Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Lahabaru dibagi menjadi 5 (lima) kategori, yakni Sungai, Jurang, Bakar, Kubur, dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Terdapat 2 keluarga yang membuang sampah di sungai, 64 keluarga yang membakar sampahnya, dan 208 keluarga yang membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS).



Bagian 1 **PENDAHULUAN**

**Monografi Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu
Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara**

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan pedesaan, permasalahan umum yang sering kali ditemukan adalah ketiadaan data presisi (Sjaf, 2019). Padahal data presisi sangat dibutuhkan dan penting untuk ketepatan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan pertanian dan pedesaan. Ketidakakuratan dalam mengidentifikasi potensi desa dan kemauan untuk membangun data presisi membuat dokumen penting pembangunan desa, baik Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) hanya sekedar dokumen pembangunan pedesaan yang tidak memiliki makna bagi kesejatian pembangunan pedesaan. Inilah yang menyebabkan mengapa pembangunan pedesaan jauh dari pencapaian target yang diharapkan.

Menjawab persoalan data desa, gagasan Data Desa Presisi dengan metodologi *Drone Participatory Mapping* menjadi alternatif dalam membuka akses bagi desa untuk mampu berdaya membangun data desanya (Sjaf et al., 2020). *Drone Participatory Mapping* merupakan metodologi yang inklusif yang menempatkan pemerintah desa dan pemuda desa sebagai subjek membangun data. Pendekatan yang digunakan adalah sintesis dari pendekatan spasial, sensus, partisipasi dan teknologi digital.

Data Desa Presisi adalah jalan keluar dari kebuntuan desa dalam merencanakan pembangunan desa yang tepat sasaran dan tertarget. Serta data desa presisi menjadi ruang bagi desa untuk mampu dan berdaya dalam membangun datanya sendiri yang akurat, aktual dan kontekstual. Data Desa Presisi didedikasikan untuk Desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan berbagai pihak dan mengedepankan kerja-kerja kolaboratif antara Perguruan Tinggi, Pemerintahan Desa dan pemudanya, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, pihak Swasta maupun NGO.

Data desa presisi merupakan gagasan yang dilahirkembangkan oleh Dr. Sofyan Sjaf dan kawan-kawan sejak tahun 2014 pasca lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan terus disempurnakan hingga saat ini. Dalam proses membangun data desa presisi dilakukan dengan pendekatan *Drone Participatory Mapping* (DPM). DPM adalah pendekatan pengumpulan data desa presisi tinggi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. Penggunaan *drone* dengan pelibatan warga desa diperuntukkan menghasilkan citra resolusi tinggi untuk kepentingan data spasial yang selama ini belum dimiliki desa. Dengan sentuhan partisipasi warga, data spasial yang diperoleh digunakan untuk memperoleh data tematik persil (demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), peta desa sesuai aturan yang berlaku (administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi,

penggunaan lahan, dan lain-lain), verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Lebih dari itu, *database* yang diperoleh dari data spasial dapat dijadikan sebagai basis menyusun *artificial intelligence* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan pembangunan desa memiliki presisi tinggi yang dapat menghalau terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supra desa. Bahkan melalui Data Desa Presisi kebutuhan desa untuk mengukur capaian pembangunan berkelanjutan (SDGS) dapat dihasilkan secara presisi berbasis Rukun Warga (RW) dan dapat ditelusuri hingga aras keluarga, *by name*, *by address* dan *by coordinate* (Sjaf et al., 2021).

Dengan pendekatan DPM ini dihasilkan Data Desa Presisi yang diterjemahkan dalam sebuah buku Monografi Desa yang menyuguhkan informasi dan data yang komprehensif yang disajikan ke dalam beberapa bab yaitu: Bab 2. Geografis Desa yang menampilkan peta-peta utama desa (peta orthophoto, peta administrasi, peta *landuse*, peta sarana prasarana dan peta topografi); Bab 3. Demografi yang menampilkan data-data kependudukan termasuk di dalamnya analisis data terkait dengan piramida penduduk, kepadatan penduduk, serta rasio beban tanggungan; Bab 4. Sandang Pangan dan Papan yang menampilkan data terkait dengan aksesibilitas keluarga terhadap pemenuhan sandang, pangan dan papan; Bab 5. Pendidikan dan Kebudayaan yang menampilkan data-data terkait sebaran tingkat pendidikan penduduk desa, partisipasi sekolah serta sebaran penduduk berdasarkan agama yang dianut dan etnisitasnya; Bab 6. Kesehatan, Pekerjaan dan Jaminan Sosial menampilkan data-data tentang sebaran penduduk berdasarkan pekerjaan, pekerjaan sampingan keterampilan sampai dengan aksesibilitas penduduk terhadap jaminan sosial dan kesehatan; Bab 7. Sosial, Hukum dan HAM menyajikan data-data tentang partisipasi berorganisasi dan aksesibilitas atas kebutuhan akan hiburan (*refreshing*); dan terakhir Bab 8. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyajikan data-data tentang aksesibilitas keluarga pada media informasi, alat telekomunikasi sampai dengan biodiversitas lahan pekarangan.

Dengan demikian data yang terjadi pada buku Monografi Desa ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi, peneliti, pegiat desa, pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa sendiri, untuk dapat dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan desa.

RUMUSAN MASALAH

Sjaf (2020) menyampaikan bahwa terdapat 4 masalah utama yang dihadapi desa terkait dengan pembangunan pedesaan yaitu (1) desa maupun kawasan pedesaan tidak memiliki peta visual yang menggambarkan secara utuh sumberdaya desa. Kondisi ini disebabkan keterbatasan dan minimnya akses desa terhadap data spasial. Alhasil, perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) maupun program-program pembangunan dan bantuan tidak pernah sesuai dengan konteks kebutuhan dan tata ruang desa; (2) belum tuntasnya tapal batas dan akurasi luas desa-desa di Indonesia menyebabkan maraknya konflik vertikal ataupun horizontal; (3) lemahnya instrumen pendeteksian daya dukung desa menyebabkan desa tak mampu menolak dan melawan tekanan kapitalisasi desa; dan (4) tidak ditemukannya instrumen untuk perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Sjaf (2017); Sampean et al. (2019); Sjaf (2019) berpandangan bahwa dengan menjalankan amanat yang telah tertuang dalam UU No. 6/2014, maka dengan serta merta akan menjawab masalah yang dihadapi ketika membangun desa maupun desa membangun. Oleh karena itu, prasyarat penguatan kapasitas aparat dan warga desa merupakan agenda penting untuk menjalankan amanat sekaligus menyelesaikan persoalan yang dihadapi desa dan kawasan pedesaan.

Perkembangan teknologi yang pesat kini tentunya menjadi keuntungan bagi masyarakat tergantung bagaimana kita mengambil peran dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Sjaf (2020) menyebutkan dalam rangka menjalankan amanat UU No. 6/2014 dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemangku desa tersebut, maka dibutuhkan suatu inovasi yang mampu mendorong terciptanya perubahan mendasar pembangunan desa dan kawasan pedesaan.

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, terdapat tujuh isu strategis yang membutuhkan data desa presisi. Berikut ini adalah ketujuh isu strategis desa, yaitu: (1) Penataan desa; (2) Perencanaan desa; (3) Kerja sama desa; (4) Investasi masuk desa; (5) BUMDes/BUMDes Bersama; (6) Kejadian luar biasa dan (7) Aset desa. Ketujuh isu strategis tersebut hanya dapat berjalan dengan baik jika berlandaskan data desa presisi. Berikut adalah peran data desa presisi untuk mewujudkan amanat undang-undang desa.

Tabel 1 Tujuh isu strategis desa yang membutuhkan Data Desa Presisi

No	Isu Strategis	Peran Data Desa Presisi
1	Penataan desa	Menyajikan peta tematik, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas
2	Perencanaan desa	Memberikan akurasi data, membuka ruang partisipasi warga, mendorong RPJMDes dan RKPDes yang tepat kebutuhan desa
3	Kerja sama desa	Menyajikan potensi desa secara utuh: vegetasi, sebaran komoditi, potensi ekonomi kawasan, kelembagaan kawasan, pola kerjasama antar desa
4	Investasi masuk desa	Menjadi dasar model pengembangan bisnis, sistem informasi desa/kawasan pedesaan, dan promosi desa
5	BUMDes/BUMDes Bersama	Menjadi dasar model bisnis yang berbasis SDA lokal, sebaran unit usaha, manajemen pengelolaan, dan kerja sama
6	Kejadian luar biasa	Menyajikan potensi bencana desa, rob, kerusakan ekosistem/ekologis
7	Aset desa	Menyajikan data posisi dan potensi aset, jumlah luasan serta peta sebaran aset dan pemanfaatannya.

Sumber: (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022)

Inovasi Data Desa Presisi diwujudkan melalui suatu pendekatan *drone participatory mapping*. Pendekatan ini mampu membuka ruang partisipasi seluas bagi pemangku desa dan warganya untuk bersama-sama mewujudkan “desa membangun” maupun “membangun desa” berbasis data yang presisi. *Drone Participatory Mapping* adalah pendekatan pengumpulan data desa presisi yang mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi tinggi, digital, dan partisipasi. Penggunaan *drone* dengan pelibatan warga desa diperuntukkan menghasilkan citra resolusi tinggi untuk kepentingan data spasial yang selama ini belum dimiliki desa. Dengan sentuhan partisipasi warga, data spasial serta data sensus yang diperoleh digunakan untuk memperoleh data tematik persil (demografi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain), peta desa sesuai aturan yang berlaku (administrasi, batas desa, infrastruktur, topografi, penggunaan lahan, dan lain-lain), verifikasi data potensi desa, estimasi maupun proksi pembangunan desa berbasis lahan, daya dukung desa, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Lebih dari itu, *database* yang diperoleh dari data spasial dapat dijadikan sebagai basis menyusun *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)* dan *Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes)*. Dengan demikian, ukuran-ukuran perencanaan dan pembangunan desa memiliki presisi tinggi yang dapat menghalau terjadinya manipulasi data dan anggaran yang bersumber dari aras desa maupun supra desa.

Sebagai upaya menyudahi permasalahan utama yang dihadapi desa dalam pembangunan pedesaan dibutuhkan basis data yang akurat dan presisi melalui inovasi Data Desa Presisi. Desa Data Desa Presisi diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas permasalahan dan potensi desa yang selanjutnya dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan desa. Berikut

adalah rumusan masalah yang perlu di jawab melalui Data Desa Presisi di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara:

1. Bagaimana kondisi geografis Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana kondisi demografis Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana kondisi pemenuhan sandang, pangan dan papan masyarakat Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara?
4. Bagaimana kondisi Pendidikan dan kebudayaan Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara?
5. Bagaimana kondisi Kesehatan, Pekerjaan dan Jaminan Sosial Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara?
6. Bagaimana kondisi Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum dan HAM Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara?
7. Bagaimana kondisi Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara?
8. Bagaimana Dinamika di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara?

TUJUAN PENDATAAN

Pembangunan Data Desa Presisi di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi geografis Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Mengetahui kondisi demografis Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Mengetahui kondisi pemenuhan sandang, pangan dan papan masyarakat Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Mengetahui kondisi Pendidikan dan kebudayaan Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Mengetahui kondisi Kesehatan, Pekerjaan dan Jaminan Sosial Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Mengetahui kondisi Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum dan HAM Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Mengetahui kondisi Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Mengetahui Dinamika di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

METODOLOGI

Pengukuran-pengukuran pembangunan diproduksi dan direproduksi pemerintah, seperti: Indeks Gini Rasio/IGR, Indeks Pembangunan Manusia/IPM, Indeks Pembangunan Desa/IPD, Indeks Desa Membangun/IDM, Indeks Pembangunan Pemuda/IPP dan lain-lain (Chambers 1995; Chambers 2006; Chambers 2008; Chambers 2013; Ruslan 2019), bertujuan untuk melihat pencapaian program pembangunan yang menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Sjaf 2017; Sampean *et al.* 2019; Sjaf 2019; Sampean dan Sjaf 2020; Sjaf *et al.* 2021). Namun demikian, pengukuran pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya, apabila data yang dijadikan sebagai rujukan perhitungan tidak akurat. Alhasil, pseudo pembangunan akan terus berlanjut dan berdampak terhadap kegagalan pembangunan (Chambers 2008).

Ketidakkuratan pengukuran capaian pembangunan disebabkan karena pengumpulan data dasar yang tidak partisipatif dan dikumpulkan berdasarkan pengakuan pemerintah desa (Sjaf 2019). Ketidakkuratan data dasar Pemerintah Indonesia diperlihatkan dari Data Potensi Desa (Podes) tahun 2018 sekitar 10,4% pertanyaan tidak terisi dari 849 pertanyaan dan data Profil Desa dan Desa (Prodeskel) Tahun 2020 sekitar 62-65% pertanyaan tidak terisi dari 939 pertanyaan (Pitaloka 2022). Hal senada ditemukan ketidakkuratan data diperoleh dari hasil sensus *National Sample Survey Office* (NSSO) pemerintah India tingkat ketimpangan gender yang tidak merepresentasikan kondisi aktual pedesaan di India (Mehta 2021).

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, pedesaan memainkan peran penting sebagai representatif kehidupan warga atau subyek pembangunan (Sampean *et al.* 2019; Sampean dan Sjaf 2020). Oleh karena itu, data yang akurat sangat penting dan menentukan masa depan pedesaan, serta perwujudan tujuan pembangunan. Dengan demikian, keakurasian data memegang peran penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan program pembangunan (Sjaf 2019; Sjaf *et al.* 2022).

Saat ini, perencanaan dan pengukuran pembangunan pedesaan di Indonesia menggunakan basis data Podes yang bersumber pada BPS merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (UU No. 16/1997), Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pendataan Potensi Desa Tahun 2018 (Perka BPS 49/2018), Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik (Perpres No. 86/2007) dan Prodeskel bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Manajemen Pendataan Profil Desa dan Desa (Permendagri No. 12/2007)(Kemendagri 2012; BPS 2021; Pitaloka *et al.* 2022). Selanjutnya

kedua sumber data ini, menggunakan pendekatan sensus dengan responden aparat pemerintah desa (kepala desa/sekretaris desa/kepala urusan data desa).

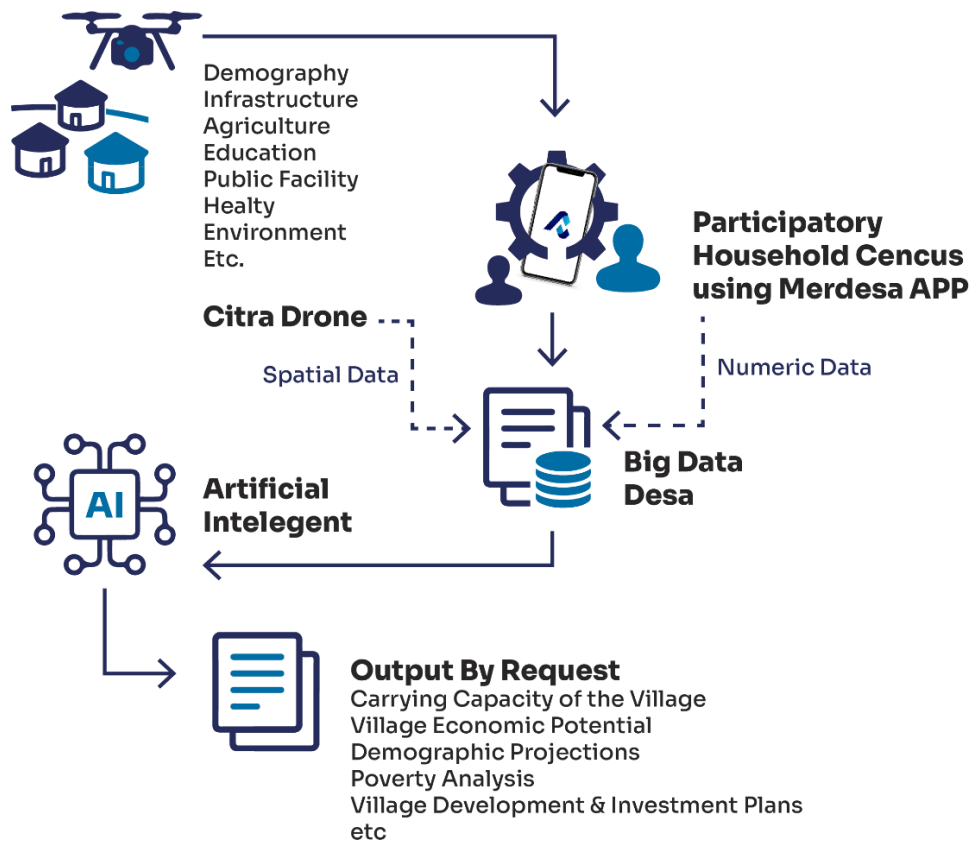
Berbeda dengan pendekatan Podes dan Prodeskel, DDP menggunakan pendekatan sensus berbasis digital yang dikawinkan dengan pendekatan spasial, serta memosisikan warga (pemuda) desa sebagai aktor pengumpul data di desa (enumerator). Selain itu, DDP menempatkan kepala keluarga sebagai responden dalam pengumpulan data.

Penggunaan Metode DDP

Penyusunan Monografi Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utaramenggunakan Metode DDP(Sjaf *et al.* 2022). Metode ini menitikberatkan pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data pedesaan dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus (Sjaf 2019; Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022).

Penggunaan metode DDP, untuk menggali beragam parameter yang dikategorikan ke dalam lima aspek kesejahteraan rakyat, meliputi: sandang, pangan dan papan (61 parameter); pendidikan dan kebudayaan (5 parameter); kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial (44 parameter); kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM (22 parameter); serta infrastruktur dan lingkungan hidup (20 parameter). Selain itu, terdapat 24 parameter identitas keluarga yang berfungsi menerangkan informasi responden (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022)

Untuk mengimplementasikan metode DDP, dilakukan melalui lima tahapan: (1) memproduksi citra resolusi tinggi. Instrumen yang digunakan pada tahap ini adalah teknologi *drone* untuk menghasilkan citra resolusi tinggi; (2) melakukan sensus rumah tangga berbasis partisipatif. Pada tahap ini, keterlibatan pemuda desa sangat penting. Sebelum pengambilan data, dilakukan rekrutmen pemuda desa di setiap Rukun Warga (RW). Mereka yang direkomendasikan pemerintah desa dilatih untuk menggunakan instrumen aplikasi Merdesa Sensus yang kami ciptakan; (3) penyimpanan data (numerik dan spasial). Tahap ini, semua data (numerik dan spasial) disimpan ke dalam server; (4) penyusunan algoritma ukuran pembangunan desa (Sjaf *et al.* 2022). Tahap ini diorientasikan untuk membangun *artificial intelligence* bagi pembangunan desa; dan (5) membangun aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan desa.



Gambar 1 Tahapan implementasi DDP

Selanjutnya dari **5 tahapan** di atas, penggunaan metode DDP dikelompokkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu: aktivitas pemetaan berbasis *drone* (spasial); aktivitas sensus partisipatif berbasis digital; dan aktivitas penyusunan *artificial intelligence* berbasis kebutuhan desa. Adapun uraian ketiga aktivitas yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Aktivitas pemetaan berbasis drone dan citra satelit (spasial)

Aktivitas ini dimulai dari mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas pemetaan berbasis drone dan citra satelit yang dilakukan secara partisipatif, seperti: *review* dokumen laporan, penyediaan alat dan bahan survei lapangan, dan lanskap/satuan lahan (Arham *et al.* 2019). Penyusunan survei dalam riset ini bertujuan memperoleh gambaran wilayah secara keseluruhan melalui pengumpulan informasi dari data dan peta yang tersedia/relevan, sehingga dapat membantu analisis dan pelaksanaan survei di lapangan. Kedua, interpretasi bentang alam/satuan lahan dari data DEM dan citra penginderaan jauh. Satuan wilayah dan ruang yang digunakan sebagai dasar perencanaan lapangan dan penyusunan peta desa sebagai bahan kajian untuk mendukung terbentuknya DDP. Sebelum melakukan survei perlu

dipersiapkan bahan dan peralatan agar dalam pelaksanaan survei dapat berjalan dengan baik. Peralatan dan bahan yang digunakan antara lain:

- Peta lokasi kegiatan (sumber: BIG);
- Citra satelit landsat (sumber: SasPlanet);
- Peta desain rencana penerbangan *drone*;
- Komputer dan Laptop yang dilengkapi oleh *software* pendukung pemetaan spasial seperti *ArcGIS Desktop*, *Global Mapper*, *Google Earth*, dan *AgisoftPhotoscan*;
- *Drone Quad Copter DJI Mavic 2 Pro* dan perlengkapannya;
- *Mobile Phone* yang dilengkapi oleh aplikasi seperti; DJIGO4, Pix4D capture, DJI+Ctrl, Avenza Maps dan Merdesa Maps; dan
- Global Positioning System (GPS) Handle: GPSMap 64s Garmin.

1.1. Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei merupakan proses pengumpulan data lapangan yang merupakan rangkaian kegiatan utama pengumpulan data spasial dalam membangun DDP. Tahapan pengumpulan data lapangan meliputi:

- 1) *Focus Group Discussion* (FGD) bersama perangkat dan masyarakat desa;
- 2) Pelacakan dan penitikan batas desa dan RW bersama masyarakat dan perangkat desa setempat dan perwakilan desa yang bertetangga;
- 3) Pemotretan udara wilayah desa menggunakan *drone*;
- 4) Pelacakan dan penitikan sarana dan prasarana umum di wilayah desa;
- 5) Identifikasi *biodiversity* kategori tanaman pohon, semai dan tanaman bawah;
- 6) FGD verifikasi data spasial desa; dan
- 7) Pembuatan peta kerja berbasis RW.

1.2. Pengolahan dan Analisis Data Spasial

Pengolahan dan analisis data spasial merupakan proses interpretasi data hasil survei lapangan dan data pendukung lainnya untuk menampilkan DDP secara geostatistik. Tahapan proses pengolahan dan analisis data spasial meliputi:

- 1) *Plotting* data tapal batas desa dan RW, identifikasi sarana dan prasarana serta *biodiversity* desa;
- 2) Mosaik foto udara;
- 3) Koreksi hasil citra *drone*;
- 4) Digitasi citra *drone* tegak dan citra satelit tegak; dan
- 5) Pembuatan peta desa.

Analisis data spasial disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa, misalnya analisis kebencanaan, tata ruang desa, potensi sumberdaya alam desa, analisis SDGs, dan lain-lain.

2. Aktivitas sensus partisipatif berbasis digital

Pendekatan sensus dalam membangun DDP adalah tindak lanjut dari pendekatan spasial. Peta kerja yang menjadi *output* pendekatan spasial dijadikan sebagai pedoman dalam pendekatan sensus. Hal ini menjadi upaya meminimalisir individu tahu setiap jiwa di desa yang terlewatkan untuk didata. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh pendekatan sensus yaitu: persiapan, pelaksanaan sensus dan validasi data hasil sensus.

2.1 Persiapan Sensus dan Partisipatoris

Pada tahapan awal tim melakukan pelatihan kepada para pemuda desa perwakilan dari lingkup RW. Masing-masing RW akan direkrut 3-5 orang pemuda desa yang akan dilibatkan dalam proses sensus. Pelatihan dan peningkatan kapasitas dilakukan dengan memberikan orientasi tentang pentingnya DDP sebagai dasar perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas secara teknis dalam mengaplikasikan MERDESA Apps untuk melakukan sensus, penguatan pemahaman dalam membaca peta kerja di MERDESA Apps, dan peningkatan pemahaman *metadata*/definisi operasional parameter sensus. Pemuda desa ini nantinya akan dilibatkan dalam proses pengambilan data sensus ke setiap rumah tangga berbasis alamat, nama, dan titik koordinat di setiap RW.

Selain mempersiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan sensus. Tim peneliti membangun koordinasi kepada pihak desa untuk mempersiapkan pelaksanaan FGD. Tahapan ini, FGD dipersiapkan untuk menggali atau mengumpulkan data kualitatif desa secara partisipatif. Data kualitatif terdiri dari sejarah lokal desa, kalender musim, stratifikasi sosial, potensi ekonomi desa, kelembagaan desa, dan pohon masalah (Barlan *et al.* 2020). Dalam proses pengumpulan data kualitatif melibatkan narasumber dari tokoh-tokoh masyarakat memahami kondisi historis dan aktual kondisi desa. Kepentingan pengumpulan data kualitatif untuk mengeksplorasi ingatan kolektif warga dalam memahami situasinya desanya (Talawanich *et al.* 2019).

2.2 Pelaksanaan Sensus dan Partisipatoris

Tahapan ini dilakukan oleh para pemuda desa (*enumerator*) perwakilan dari setiap RW untuk mendata setiap jiwa dalam rumah tangga (*sensus*) yang berada di wilayah masing-masing RW. Dalam proses sensus, *enumerator* dibekali dengan MERDESA Sensus yang dapat diakses melalui android milik *enumerator*. Masing-masing *enumerator* akan mendatangi setiap rumah tangga dengan menanyakan berbagai pertanyaan tentang status bangunan, identitas responden, data kepemilikan lahan, partisipasi dalam kegiatan desa, etnis, tingkat konsumsi, pekerjaan, pekerjaan sampingan, jumlah anggota rumah tangga, usia anggota rumah tangga, jumlah KK dalam rumah tangga, penyakit yang diderita, aksesibilitas pada asuransi kesehatan, sanitasi, komunikasi, kondisi tempat tinggal, frekuensi makan, menu makan,

bahan bakar masak, sumber air mencuci, riwayat komoditas yang diusahakan, pendapatan non pertanian, rata-rata pengeluaran rumah tangga, seras titik koordinat rumah warga yang teridentifikasi secara otomatis dalam MERDESA Sensus. Deskripsi parameter sensus dengan Merdesa Sensus Aplikasi ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Parameter sensus dengan Merdesa Sensus Aplikasi

Sasaran Pertanyaan	Variabel	Jumlah parameter (pertanyaan)	Keterangan
Kepala Keluarga dan Keluarga secara Umum	Identitas Keluarga	22	Terkait identitas kepala keluarga, identitas keluarga
	Pendidikan dan Kebudayaan	5	Terkait pendidikan, etnis, agama, status pendidikan, dan biaya pendidikan
	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	9	Kondisi pekarangan rumah, aset ekonomi yang dimiliki, tempat pembuangan sampah, kepemilikan alat komunikasi
	Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum, dan HAM	22	Status tinggal, program bantuan dan jaminan, biaya-biaya bulanan, jumlah aset kendaraan, partisipasi organisasi, hiburan, keagamaan
	Kesehatan Pekerjaan dan Jaminan Sosial	36	Pekerjaan, jaminan sosial, penyakit, program kesehatan, akses dan komoditas lahan pertanian, kepemilikan ternak
	Sandang, Pangan, dan Papan	61	Jumlah pangan, tempat tinggal, sandang
	Pertanyaan Khusus Nelayan	19	Tipe nelayan, teknik budidaya dan tangkap, jenis alat tangkap, jenis ikan yang dibudidaya/ditangkap
Terkait Anggota Keluarga	Identitas Anggota Keluarga	8	Terkait identitas anggota keluarga, identitas keluarga
	Pendidikan dan Kebudayaan	5	Terkait pendidikan, etnis, agama, status pendidikan
	Kesehatan Pekerjaan dan Jaminan Sosial	17	Pekerjaan dan kesehatan. Titik tekan kepada pemberantasan <i>stunting</i> .
	Kehidupan Sosial, Perlindungan Hukum, dan HAM	1	Partisipasi organisasi

Selama proses sensus berlangsung, tim melakukan pengawasan dan evaluasi data yang ter-*input* dalam server, memastikan data yang ter-*input* sudah valid. Proses pengawasan dan evaluasi data sensus dilakukan oleh supervisi di dalam Aplikasi Merdesa Sensus dan secara berkala dilakukan pertemuan tatap muka dengan para enumerator desa untuk memastikan proses sensus berjalan baik.

3. Metode Validasi Data

Integrasi data spasial dan data numerik dalam metode DDP diawali dari penggunaan peta kerja yang dimasukkan ke dalam aplikasi Sensus MERDESA (peta kerja digital). Peta kerja digital tersebut berfungsi sebagai navigasi enumerator sosial dalam melakukan penelusuran setiap rumah dan bangunan yang ada di pedesaan. Peta kerja digital ini merupakan informasi spasial sebaran pemukiman dan bangunan lainnya dalam satuan RW/Jorong/Lingkungan di pedesaan. Data yang ditampilkan pada peta tersebut, meliputi: nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, kode desa, kode pemukiman dan bangunan lainnya, dan titik koordinat (*longitude/latitude*).

Teknik penggunaan peta kerja digital berfungsi apabila enumerator sosial berada pada titik koordinat kode rumah dan bangunan lain yang sudah diberi *pin-point*. Informasi spasial dari data ini merupakan hasil digitasi persil bangunan melalui citra *drone* terkoreksi secara geometrik. Basis pemberian kode pada setiap bangunan adalah bentuk atap tegak lurus terhadap permukaan bumi. Dengan teknik ini, maka jumlah total bangunan teridentifikasi secara keseluruhan berdasarkan kode tersebut. Namun demikian, setiap kode rumah dan bangunan lain yang teridentifikasi tersebut belum dapat dipastikan dengan tepat, apakah basis atap yang digunakan sudah sesuai dengan jumlah bangunan per unit atau masih gabungan unit. Adapun validasi untuk memastikan hal tersebut, melalui hasil verifikasi dari enumerator sosial yang melakukan sensus untuk memastikan bahwa setiap kode sudah sesuai atau belum. Beberapa kemungkinan hasil verifikasi yang dilakukan, seperti: satu kode bangunan bisa jadi lebih dari satu bangunan. Atau sebaliknya, dua atau lebih kode bangunan yang ada bisa jadi satu kode bangunan.

Selanjutnya hasil verifikasi enumerator sosial terhadap peta kerja awal yang dibuat tim spasial, divalidasi kembali untuk memastikan bahwa setiap kode bangunan yang diberikan sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Validasi ini mempertegas identifikasi kode bangunan yang dihuni warga atau tidak dihuni warga. Setelah verifikasi dan validasi dilakukan, informasi hasil sensus disajikan secara geostatistik sesuai kategori tematik yang dibutuhkan. Proses integrasi data spasial dan numerik ini, tidak lain untuk menghasilkan DDP berbasis keluarga di setiap RW/Dusun/Lingkungan di pedesaan.

Untuk metode validasi data sosial dilakukan melalui: pertama, sensus yang berpedoman peta kerja digital berbasis RW. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peta kerja digital berfungsi sebagai navigasi enumerator sosial untuk melakukan sensus secara *door to door*. Peta kerja ini juga mampu memverifikasi dan memvalidasi bangunan dan rumah tangga yang tidak terdigitasi; kedua, perekrutan pemuda desa sebagai enumerator sosial

berbasis RW. Tujuan rekrutmen enumerator sosial berbasis RW dari pemuda desa adalah pelibatan warga sebagai subyek yang memiliki pemahaman tata ruang desa, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat desa, serta adanya transformasi pengetahuan dari perguruan tinggi ke warga; dan ketiga, pendampingan intensif oleh supervisor sensus. Pendampingan intensif dimulai dari proses pelatihan kepada enumerator sosial, mengorganisir enumerator sosial, perencanaan strategi penyelesaian sensus, *monitoring*, mengevaluasi, mengonfirmasi data-data yang kurang valid selama proses sensus, sampai dengan penyusunan *output* DDP.

4. Aktivitas Penyusunan Artificial Intelligence

4.1 Pengolahan dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Pada makalah ini, implementasi DDP mengambil studi kasus di Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun luaran dari pendekatan spasial adalah berupa peta tematik berbasis citra *drone* dan diverifikasi secara partisipatif oleh warga desa. Adapun luaran dari pendekatan Sensus dan partisipatif berupa kumpulan lembar data yang berisikan keterangan bangunan, identitas keluarga dan individu, serta data terkait parameter sensus yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian diolah dan dikumpulkan dalam bentuk monografi sebagai luaran yang dapat disajikan secara info grafik dalam bentuk peta dasar, dan peta tematik. Lembar data yang ada dapat dianalisis lebih lanjut untuk berbagai kepentingan.

Lembar data ini menjadi lebih unggul dibandingkan metode pendataan yang dilakukan BPS karena diambil langsung oleh penduduk, serta adanya prosedur yang membuat enumerator harus benar-benar mengambil data secara satu per satu berdasarkan nama, alamat, dan titik koordinat. Begitu pun peta yang dihasilkan dari pendekatan spasial menjadi lebih unggul dibandingkan luaran data spasial BIG dikarenakan penentuan batas desa, RW, bahkan hingga RT, diverifikasi langsung oleh penduduk desa sebagaimana ketetapan atau aturan yang sudah ada dalam kemasyarakatan mereka. Dua keunggulan ini menjadikan DDP dengan pendekatan yang mengintegrasikan spasial, kuantitatif, maupun kualitatif dapat diandalkan sebagai *baseline* perencanaan pembangunan desa.

4.2 Integrasi Data Spasial dan Sosial

Pendataan DDP menghasilkan data terintegrasi antara data spasial dan data numerik. Pengintegrasian data tersebut memberikan gambaran kondisi aktual desa. Hasil analisis dan pengimplementasi DDP memberikan potret penggunaan lahan terbangun dan non terbangun dalam satuan analisis Rukun Warga (RW) atau satuan lingkungan masyarakat. Selain itu, integrasi data

spasial dan sosial juga digambarkan dari hasil sensus berbasis rukun warga yang ditampilkan secara spasial dalam bentuk tematik pada setiap indikator kesejahteraan rakyat. Pada Desa Lahabaru disajikan dalam satuan jorong karena jorong menjadi satuan *sodality* dalam masyarakat karena merepresentasikan ikatan kekeluargaan dan kekerabatan (Tjondronegoro 1984). Dusun adalah sebuah lembaga tradisional di bawah desa yang menjadi ruang bertemunya kepentingan bersama atau ruang mediasi kultural di mana agroekologi budaya dilihat sebagai representasi dari agensi serta tindakan petani, persoalan partisipasi dalam pembangunan pedesaan dapat dilihat secara lebih luas.

TINJAUAN PUSTAKA

Diskursus Metodologi Pendataan Pedesaan

Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan artikel ini melalui diskursus perkembangan metodologi dalam ilmu-ilmu sosial. Secara garis besar metodologi riset penelitian dibagi menjadi tiga metode, kuantitatif, kualitatif, dan *mixed methods*. Pada dekade tahun 1920-1930-an pendekatan kualitatif menjadi metode paling dominan dalam mengkaji kehidupan kelompok manusia. Pada dekade penggunaan metode kualitatif oleh mazhab Chicago di sosiologi mempengaruhi ilmu sosial lainnya termasuk ilmu komunikasi, pendidikan, dan kerja sosial (Denzin dan Lincoln 2009).

Pada dekade 1970-1980-an metode kualitatif mendapatkan kritikan tajam dari berbagai ilmuwan sosial. Metode ini dikritik karena para ilmuwan sosial terjebak dalam subjektivisme dan relativisme *post-modern*. Metode ini sangat kontras dengan pendekatan kuantitatif yang mengedepankan pada objektivitas yang identik dengan ekonomi dan statistik sosial. Metode kuantitatif menjadi dasar dari demografi sejarah dan sosiologi sejarah. Pasca Perang Dunia Kedua, data numerik semakin dibutuhkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial (Hudson dan Ishizu 2017).

Dekade dikotomi penggunaan metode antara kuantitatif dan kualitatif mengalami kemandekan. Gagasan penggabungan metode keduanya menjadi jalan terbaru dalam menutupi kekurangan masing-masing metode tersebut. Metode campuran (*Mixed-methods*) yang mengombinasikan metodologi kuantitatif dan kualitatif memberikan peluang saling melengkapi dan mempertemukan prinsip subjektivitas dan objektivitas dalam satuan penelitian yang utuh (Creswell 2016; Creswell dan Clark 2017). Pendekatan ini menjadi dasar pengembangan metode DDP sebagai pendekatan pendataan pedesaan.

Metode DDP sebagai pendekatan dalam *mixed methods* menghasilkan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data ini diambil, divalidasi, diverifikasi, dan dikonfirmasi oleh warga desa. Serta, dibantu pihak luar desa (misal Perguruan Tinggi). Membangun dan menghasilkan data yang akurat dan presisi hanya dapat dilakukan dengan *mixed-methods* yang mengombinasikan tiga pendekatan yaitu sensus, spasial dan partisipatoris. Gabungan dari ketiga pendekatan tersebut diistilahkan sebagai pendekatan *Drone Participatory Mapping* (DPM) (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022).

Pendekatan ini dikembangkan sejak tahun 2014 yang sudah mengalami transformasi signifikan dalam penyempurnaan metode dalam pendataan pedesaan. Pendekatan ini mengintegrasikan antara teknologi mutakhir, *drone*

dan satelit dengan kualitas citra beresolusi tinggi untuk menghasilkan data spasial. Selain itu, secara teknis dalam pengumpulan dan analisis menggunakan instrumen teknologi digital. Dari pendekatan DPM, sensus dilakukan berbasis data spasial yang dihasilkan dari instrumen *drone* atau citra satelit beresolusi tinggi, aplikasi *marking object* (untuk mengumpulkan titik koordinat pemukiman, lokasi usaha warga, sebaran biodiversitas desa, serta data kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA)(Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022). Pendekatan PRA digunakan untuk mengajak *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam menilai dan memutuskan program atau kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Chambers 2008; Chambers 2013) Pendekatan PRA menjadikan masyarakat desa sebagai peneliti, perencana dan juga pelaksana program bukan hanya sebagai objek pada proses pelaksanaan pemberdayaan. Pendekatan ini digunakan dalam DDP untuk mengajak masyarakat untuk menilai pembangunan desa, menyusun sejarah desa, menilai kepentingan dan pengaruh kelembagaan desa, dan membuat kalender musim sesuai konteks wilayah masing-masing. Pendekatan PRA digunakan untuk melengkapi data-data kuantitatif (data numerik dan spasial) dalam menghitung IDM dan IPD di pedesaan.

Metode DDP sebagai pendekatan pendataan pedesaan merupakan penyempurnaan pendataan yang telah dilakukan pemerintah. Bahkan, metode DDP sebagai pendekatan baru dalam proses datafikasi dalam mengumpulkan data kependudukan. Hal ini juga berbeda dengan sistem *data mining* (penambangan data) di media sosial, data-data personal dikumpulkan melalui pelacakan algoritma pencarian dan identitas pengguna media sosial. Penambangan data di media masih memiliki ketidakakuratan yang tinggi (*volacity*)(Couldry 2004; Couldry dan Powell 2014; Couldry 2020). Oleh karena itu, metode DDP tidak mengandalkan sepenuhnya teknologi digital sebagai instrumen penelitian dalam membangun *big data*. Tapi, metode DDP tetap menggunakan instrumen manusia dalam pengumpulan, validasi, verifikasi, dan konfirmasi data.

DDP Sebagai Metode dan Pendekatan Baru Pendataan Pedesaan

Metode DDP adalah pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk mengumpulkan data desa presisi yang meliputi dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus (Sjaf *et al.* 2020; Sjaf *et al.* 2022). Metode yang mensintesis tiga pendekatan yaitu teknologi drone yang menghasilkan data spasial, sensus menghasilkan data numerik dan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) menghasilkan data kualitatif. Sintesis berbagai pendekatan tersebut bertujuan untuk saling

menutupi kelemahan pendekatan yang ada. Hal ini sejalan dengan pernyataan Creswell, (2016) bahwa metodologi *mixed-method* dilakukan untuk menghasilkan data yang komprehensif.

DDP sebagai metode dan pendekatan baru dalam pendataan pedesaan menempatkan warga sebagai subjek pendataan, membuka akses warga terhadap data, dan transformasi pengetahuan pendataan dari perguruan tinggi kepada warga desa. Selain itu, DDP mengutamakan pengorganisasian sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital mutakhir. Metode ini sudah selayaknya memberikan kontribusi terhadap perbaikan praktik pembangunan pedesaan dan pengembangan sistem pendataan di Indonesia. Atas dasar ini, metode menjadi salah satu praktik dekolonisasi pendataan pedesaan. Sebab, pendekatan berupaya mengangkat permasalahan-permasalahan lokalitas sebagai basis perencanaan pembangunan. Selain itu, DDP menjadi jalan meracik merumuskan pembangunan pedesaan berbasis kebutuhan dan permasalahan dari berbagai instrumen pengukuran pembangunan. Perumusan, pengukuran, dan analisis pembangunan dilakukan di level terbawah di pedesaan sebagai satuan *sodality* masyarakat yakni di level dukuh/kampung/dusun/rukun warga/satuan lingkungan setempat (Kolopaking *et al.* 2020). *Sodality* merupakan sebagai lingkungan pemenuhan kebutuhan hidup dan lingkungan yang tunduk pada kekuasaan.

Satuan *sodality* ini digunakan DDP dalam perencanaan pembangunan berbasis rumah tangga pedesaan. Perencanaan pembangunan tersebut langsung menysasar permasalahan pokok yang dihadapi dalam rumah tangga pedesaan. Permasalahan pokok tersebut meliputi aspek kesejahteraan rakyat yakni (1) sandang, pangan, papan; (1) pendidikan dan kebudayaan; (3) kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial; (4) kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM; (5) infrastruktur dan lingkungan hidup. Lima aspek tersebut menjadi skala prioritas dalam intervensi pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan DDP diharapkan menghapus dosa para perencana pembangunan yang selalu bermain dengan angka-angka, mengabaikan kekuatan sumber daya manusia, pertumbuhan tanpa keadilan, dan berorientasi pada implementasi atau realisasi pembangunan dari pada tujuan utamanya (Haq 1976). Dosa-dosa perencana ini hanya bisa dilakukan melalui pendekatan inklusif yang dimulai dari reformasi pendekatan pendataan pedesaan. Pendekatan ini melanjutkan reformasi demokrasi substansial desa melalui DDP (Hakim 2022). Demokrasi substansial dalam pendataan pedesaan artinya membangun sistem pendataan yang inklusif menempatkan warga sebagai subjek pendataan dan pembangunan.



Lab.
DATA DESA
PRESISI

Fakultas Ekologi Manusia - IPB University





Bagian 2

GEOGRAFI DESA

Monografi Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu
Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara

GEOGRAFI DESA

2.1 Sejarah Desa

Data Desa Presisi (DDP) sebagai pendekatan baru dalam pendataan kependudukan, tidak hanya memberikan pengetahuan baru bagi kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam hal ini DDP juga tidak meninggalkan metode lama untuk menelaah perkembangan desa dengan melakukan *forum group discussion (FGD)* sebagai pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data. FGD dilakukan sebagai upaya untuk melihat lebih dalam perkembangan desa termasuk didalamnya Sejarah desa.

Penelusuran Sejarah dilakukan untuk menggali berbagai informasi, diantaranya:

1. Asal usul pemberian nama Desa Lahabaru
2. Mengetahui priodisasi pemerintahan serta program unggulan
3. Mengetahui kehidupan masyarakat lahabaru
4. Mengetahui peristiwa penting yang pernah terjadi di Desa Lahabaru

Pemberian Nama Desa Lahabaru

Berdasarkan hasil FGD pemberian nama Lahabaru berangkat dari kata *lahan baru* yang bertujuan untuk menunjukkan suatu kawasan pertanian yang baru di akses oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas pertanian. Menurut SF (60).

“kenapa dikasi nama lahabaru karena dulunya itu ‘lahan baru’ terbuka untuk tempat bertani. Untuk memudahkan dalam penyebutan maka dikasimi nama lahabaru dan semua orang setuju. Nama lahan baru dipakai karena ini lahan subur sekali apapun yang ditanami bagus semua tumbuh. Jadi untuk kasi muda penyebutan dibilangmi saja lahabaru.”

Pemberian nama Lahabaru sangat erat kaitannya dengan suku Bugis, yang mayoritas mendiami Desa Lahabaru. Sejak awal ditemukannya Lahabaru sebagai kawasan pertanian baru oleh suku Bugis maka orang Bugis secara bertahap berdatangan di Lahabaru, dengan alasan kesuburan tanah dan didorong oleh budaya suku Bugis yang menyukai kepemilikan lahan karena salah satu tolak ukur keberhasilan menurut suku Bugis adalah kepemilikan lahan yang luas.

Periodisasi Pemerintahan Desa Lahabaru

Secara administratif Desa Lahabaru berada di Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah saat ini 1,35 km² dengan jarak ibu kota kabupaten 45 km. Desa Lahabaru adalah satu dari 8 desa yang ada di Kecamatan Watunohu, Lahabaru juga merupakan desa induk dari tiga desa yang telah dimekarkan yaitu: Sarona tahun 1999, Samaturu dan nyule tahun 2006.

Desa Lahabaru awalnya merupakan hasil pemekaran dari Desa Watunohu yang memiliki dua dusun dan salah satu dusun dimekarkan menjadi lahabaru. Pemekaran di inisiasi oleh M. Sabir, Ali PS dan H. Abd. Rauf dan disepakati oleh masyarakat. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pada tahun 1977 pemerintahan pertama secara defenitif bentuk yang dipimpin oleh H. Muh. Sabir. Sejak tahun 1997-2023 pemerintahan secara definitive telah mengalami 5 kali pergantian dan 2 kali dijabat masa transisi.

Tabel 3 Nama-nama kepala desa lahabaru sejak tahun 1977-2023

No	Tahun	Nama	Program Unggulan	Keterangan
1	1977-1982	H. Muh Sabir	Cocoa/coklat	Definitif
2	1982-2007	H. Abd. Samad	Cocoa, Jalan, Listrik	Definitif
3	2007	Sufyan, S. Sos	Melanjutkan	PLT
4	2008-2014	Firdaus Karim	Melanjutkan	Definitif
5	2014-2018	Bustan	Melanjutkan	Definitif
6	2018	Nurhawa Wahid, S. Sos	Melanjutkan	PLT
7	2020-2026	Syahrudin	Infrastruktur, Kesehatan	Definitif

Berdasarkan tabel 1 dapat dikatakan bahwa perkembangan dan kemajuan desa lahabaru sangat erat kaitannya dengan program Pembangunan yang di canangkan dan yang dilaksanakan oleh pemerintah di tiap-tiap periode. Jika kita melihat kebelakang Ketika terjadi krisis moneter di Indonesia, justru bagi masyarakat yang menanam coklat, khususnya di Desa Lahabaru tidak merasakan krisis. Hal ini disebabkan pada saat krisis buah coklat mengalami peningkatan (masa puncak) panen disertai harga yang tinggi. SF (60) dan BR (65) mengatakan:

“waktunya krisis moneter kita justru disini tidak dirasa karena waktu itu masa jaya jayanya coklat, kalau tidak salah itu masa pemerintahannya presiden Habibie”

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dipandu oleh tim DDP bersama dengan elemen masyarakat di Desa Lahabaru proses penulisan alur sejarah sejak awal berdirinya desa hingga pada kondisi hari ini. Lebih lanjut, beberapa kejadian penting yang mempengaruhi aspek sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan masyarakat di Desa Lahabaru juga diuraikan pada bagian selanjutnya.

2.2 Kejadian Penting

Sejak dimekarkannya Desa Lahabaru sampai saat ini, Lahabaru telah mengalami banyak peristiwa penting yang mengiringi perkembangannya sampai saat ini. Mulai dari infrastruktur jalan pada tahun 1976 yang tentunya akan memudahkan masyarakat dalam proses distribusi sumberdaya baik kebutuhan maupun hasil panen. Perkembangan tidak berhenti hanya pada pembangunan infrastruktur jalan, ada banyak aspek yang dibangun mulai dari pendidikan, penerangan, dan Kesehatan (lihat tabel 2).

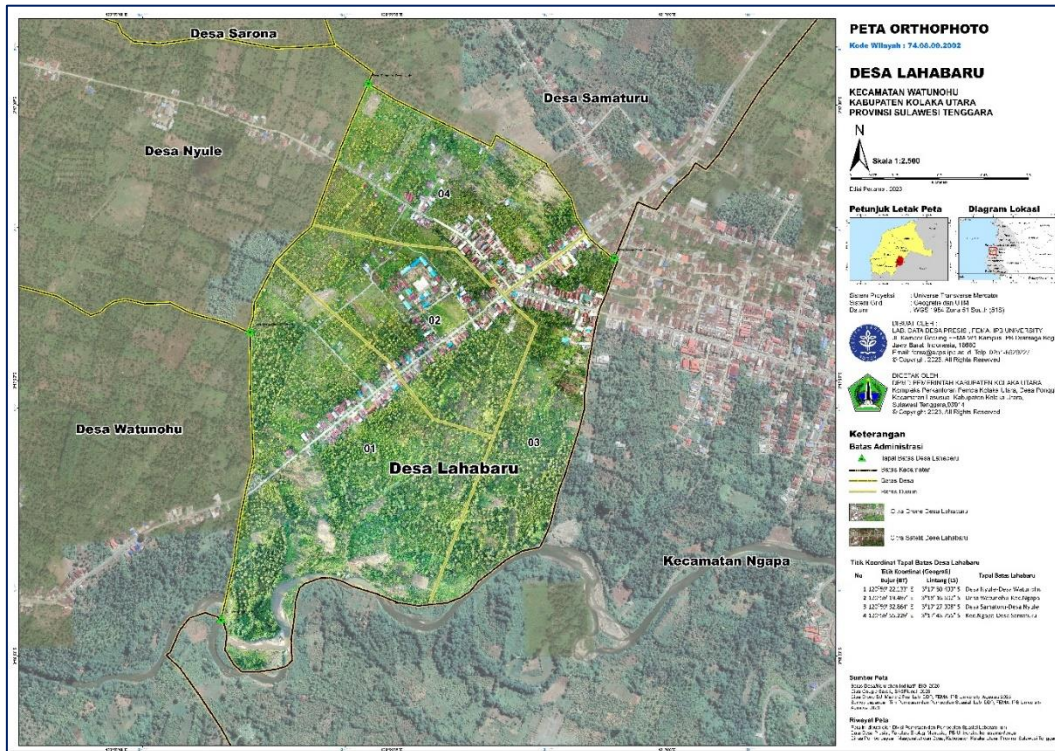
Aspek lain yang juga dibangun adalah sektor pertanian. Bagaimana tidak, diawal perkembangan Desa Lahabaru bisa dikatakan hampir keseluruhan masyarakatnya menggantungkan kehidupan mereka dengan sektor pertanian. Melihat hal tersebut pemerintah memberikan berbagai bantuan seperti bibit coklat pada tahun 1980. Sejak tahun 1980 sampai sekarang coklat masih menjadi salah satu komoditi andalan masyarakat desa lahabaru. Selain itu tentu ada juga komoditi lain yang menjadi primadona seperti nilam, cengkeh dan pala serta tanaman hortikultura lainnya.

Lahabaru bukanlah daerah subur yang selama ini tanpa masalah. Persoalan seperti banjir masih kerap melanda daerah tersebut meskipun tidak semua masyarakat merasakannya, karena hanya sebagian dari wilayah Lahabaru yang tergenang pada tahun 2021 dan 2023. Selain itu, wabah penyakit covid 19 juga pernah menjadi momok bagi masyarakat. Mengapa tidak, masyarakat dengan budaya kebersamaan yang sangat tinggi dipaksa agar tidak melakukan aktivitas seperti biasanya dan sedikit banyak juga berimbas pada pendapatan masyarakat. Untuk melihat berbagai peristiwa penting yang telah terjadi di Lahabaru perhatikan pada halaman selanjutnya.

Tabel 4 Peristiwa Penting Desa Lahabaru

Tahun	Peristiwa Penting	Dampak sosial	Dampak Ekonomi	Dampak Politik
1976	Pembukaan jalan	Memudahkan akses	Peningkatan pendapatan	
1979	Pembangunan sekolah	Akses pengetahuan	Pengeluaran pendidikan	
1980	Masuknya coklat	Berbagi bibit	Peningkatan pendapatan	
1984	Angkutan kuda		Peningkatan pendapatan	
1986	Masuknya kendaraan roda empat	Memudahkan mobilitas	Meningkatkan pendapatan	
1989	Masuknya listrik	Memudahkan aktivitas dimalam hari	Meningkatkan pendapatan	
1997	Masuknya air	Memudahkan aktivitas MCK	Peningkatan pendapatan	
2015	Masuknya tanaman nilam	Berbagi bibit	Peningkatan pendapatan	
2018	Masuknya jaringan internet	Memudahkan silaturahmi dengan keluarga jauh	Peningkatan pendapatan	Banyak bertebaran isu politik
2020	Covid 19	Aktivitas dibatasi	Berkurangnya pendapatan	Kebijakan pemdes untuk penanggulangan covid
2021	Digitalisasi desa	Memudahkan proses pembuatan KTP, akta lahir dan kk	Mengurangi pengeluaran	
2021,2023	Banjir	Kerusakan	Mengurangi pendapatan	

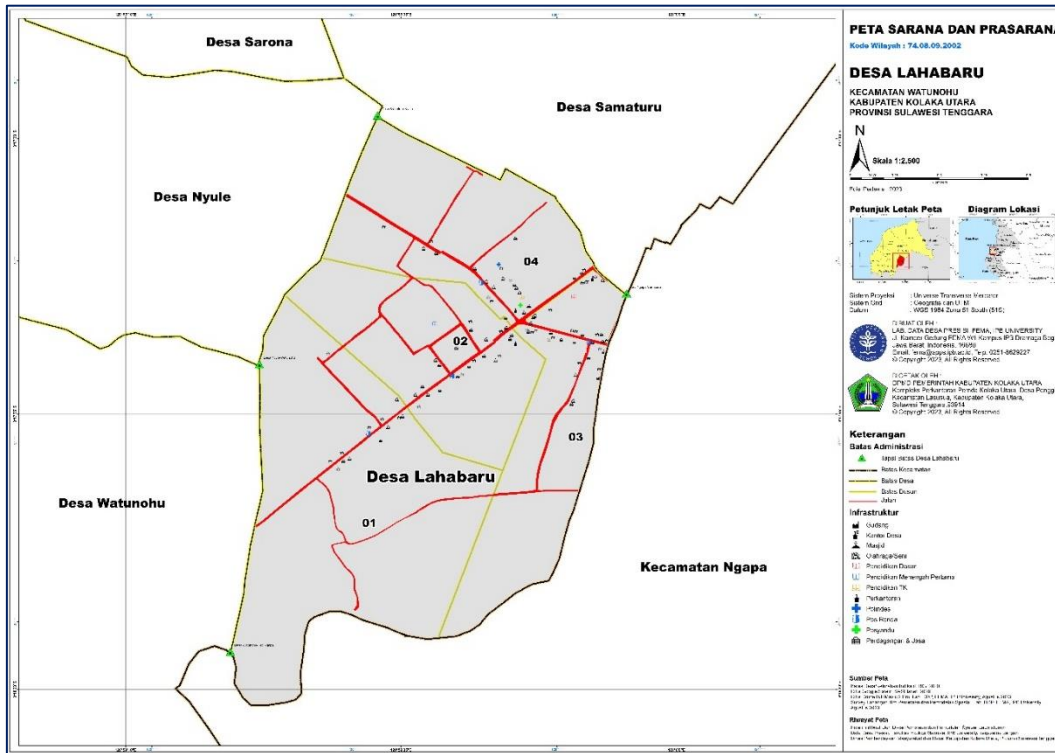
2.3 Peta Orthophoto



Gambar 2 Peta orthophoto Desa Lahaburu

Peta Orthophoto Desa Lahaburu merupakan gambaran visual permukaan Desa Lahaburu yang tampak dari atas, dibuat dengan overlay citra satelit dan citra drone. Citra drone memiliki resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan citra satelit, sehingga pada *layoting* peta orthophoto. Desa Lahaburu yang menggunakan citra drone memiliki visual yang lebih jelas dibandingkan dengan desa tetangganya yang menggunakan citra satelit. Hasil foto udara menggunakan drone yang diambil dengan ketinggian tertentu selanjutnya dimosaic menghasilkan satu citra desa yang utuh. Citra desa kemudian digeoreferencing agar memiliki koordinat dan proyeksi yang sama dan saling tumpang tindih dengan citra satelit. Dari peta orthophoto secara visual, tutupan lahan Desa Lahaburu didominasi oleh kebun campuran. Peta orthophoto juga menunjukkan di Desa Lahaburu memiliki pemukiman yang tersebar dan memiliki pola yang mengikuti jalan.

2.5 Peta Sarana dan Prasarana



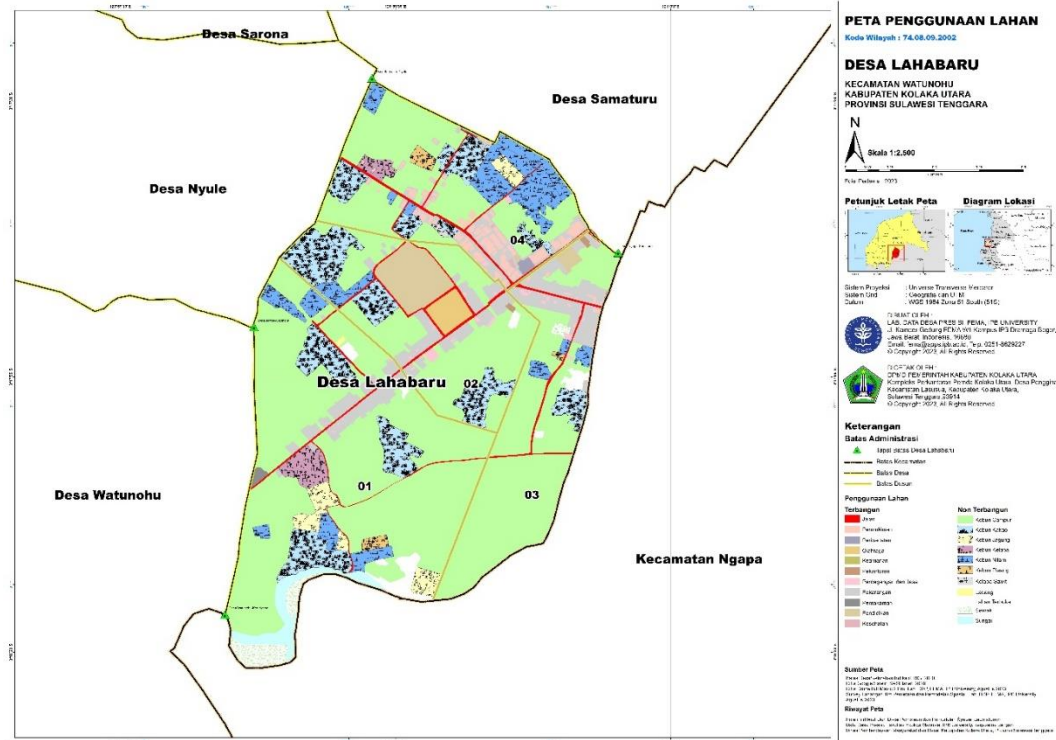
Gambar 4 Peta sarana dan prasarana Desa Lahaburu

Sebaran sarana dan prasarana yang menjadi fasilitas umum di Desa Lahaburu menyebar di berbagai Dusun. Fasilitas umum tersebut terdiri dari fasilitas peribadatan seperti Masjid, fasilitas kesehatan, dan perkantoran seperti ditampilkan pada (Tabel 4). Kantor Desa Lahaburu berada di Dusun 3.

Tabel 5 Sarana dan Prasarana Umum Desa Lahaburu

No	Infrastruktur	Dusun			
		1	2	3	4
1	Perkantoran	0	1	1	1
2	Peribadatan	0	0	0	1
3	Kesehatan	0	0	0	2
4	Keamanan	1	1	1	1
5	Pendidikan	0	1	1	1
6	Pemukaman	1	0	0	0
7	Olahraga	0	1	1	0
8	Perdagangan dan Jasa	12	23	34	20
9	Gudang	1	0	1	0

2.6 Peta Penggunaan Lahan



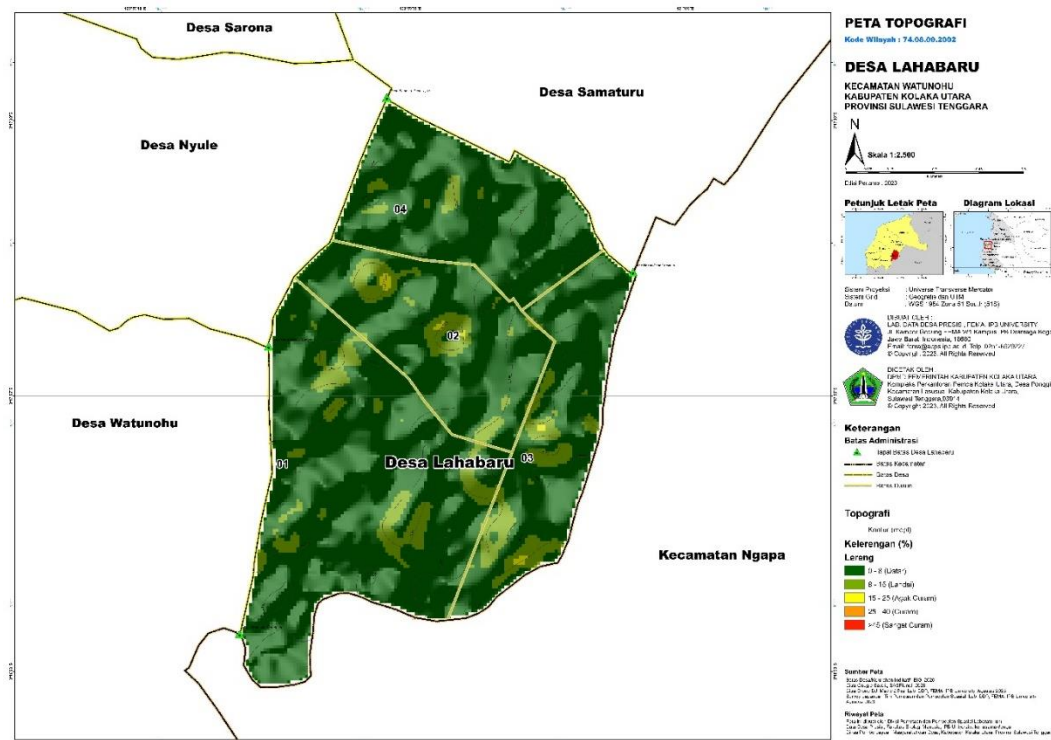
Gambar 5 Peta Penggunaan Lahan Desa Lahabaru

Jenis penggunaan lahan di Desa Lahabaru terdiri dari 22 jenis penggunaan lahan yang terbagi menjadi 11 jenis penggunaan lahan terbangun dan 11 jenis penggunaan lahan non terbangun. Jenis penggunaan lahan terbangun diantaranya jalan, jasa dan perdagangan, keamanan, kesehatan, olahraga, pemakaman, pendidikan, peribadatan, perkantoran, permukiman dan pekarangan. Adapun jenis penggunaan lahan non terbangun diantaranya adalah kebun campur, kebun kakao, kebun jagung, kebun kelapa, kebun nilam, kebun pisang, kebun kelapa sawit, ladang, lahan terbuka, semak dan Sungai (Tabel 2). Wilayah kebun campur merupakan area yang paling luas yaitu sekitar 67,247 Ha dari total luas desa. Pola pemukiman di dalam desa ini mengikuti alur jalan utama dan jalan desa. mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Lahabaru adalah sebagai petani karena penggunaan lahannya di dominasi oleh kebun campur.

Tabel 6 Jenis penggunaan lahan Desa Lahabaru

No	Penggunaan Lahan	Dusun				Luas (Ha)
		1	2	3	4	
1	Jalan	0,632	0,688	0,615	0,838	2,773
2	Olahraga		0,907836			0,908
3	Keamanan	0,001064			0,001813	0,003
4	Pekantoran		0,040	0,056		0,096
5	Pekarangan	2,064	2,325	3,024	1,846	9,259
6	Pemakaman	0,155				0,155
7	Pendidikan		2,589	0,305348	0,026968	2,921
8	Perdagangan dan Jasa	0,034	0,293	0,280	0,174506	0,781
9	Peribadatan				0,146941	0,147
10	Permukiman	0,870	1,007	1,367	1,502	4,745
11	Kesehatan				0,037024	0,037
12	Kebun Campur	31,007	10,301	14,777	11,162	67,247
13	Kebun Kakao	4,206	4,465	0,773	2,714	12,159
14	Kebun Jagung	1,467651			0,397	1,865
15	Kebun Kelapa	1,030867			0,439	1,470
16	Kebun Nilam	1,859	0,623	0,569	4,087	7,138
17	Kebun Pisang	0,244148		0,056514	0,310768	0,611
18	Kelapa Sawit				0,082	0,082
19	Ladang	0,040136				0,040
20	Lahan Terbuka	1,101355	0,107536	0,361063		1,570
21	Semak	1,363028		0,141		1,504
22	Sungai	1,718				1,718
	Total (Ha)	47,793	23,345	22,326	23,766	117,230

2.7 Peta Topografi



Gambar 6 Peta Topografi Desa Lahabaru

Peta topografi Desa Lahabaru merupakan gambaran relief permukaan Desa Lahabaru yang memiliki informasi ketinggian di atas permukaan air laut (mdpl), bentuk kontur dan kemiringan lereng. Desa Lahabaru termasuk dalam dataran tinggi yang memiliki ketinggian berkisar antara 8,5 mdpl – 18,5 mdpl. Garis kontur menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Garis-garis kontur menunjukkan informasi perbedaan ketinggian dan juga kemiringan lereng di Desa Lahabaru. Semakin rapat kontur, maka semakin curam area tersebut.

Berdasarkan pedoman penyusunan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, kelas kemiringan lereng dibagi menjadi 5 yaitu Datar (0 – 8 %), Landai (8 – 15 %), Agak Curam (15 – 25 %), Curam (25 – 40 %) dan sangat curam (> 40 %). Kemiringan lereng di Desa Lahabaru ditunjukkan dengan perbedaan warna pada peta topografi. warna hijau tua menunjukkan area datar, warna hijau muda area landai, warna kuning area agak curam, warna orange area curam dan warna merah area yang sangat curam. Pada area datar, landai dan agak curam di Desa Lahabaru digunakan untuk area kebun campuran dan pemukiman, sementara area curam dan sangat curam tidak terdapat pada wilayah Desa Lahabaru.



Lab.
DATA DESA
PRESISI

Fakultas Ekologi Manusia - IPB University





Bagian 3

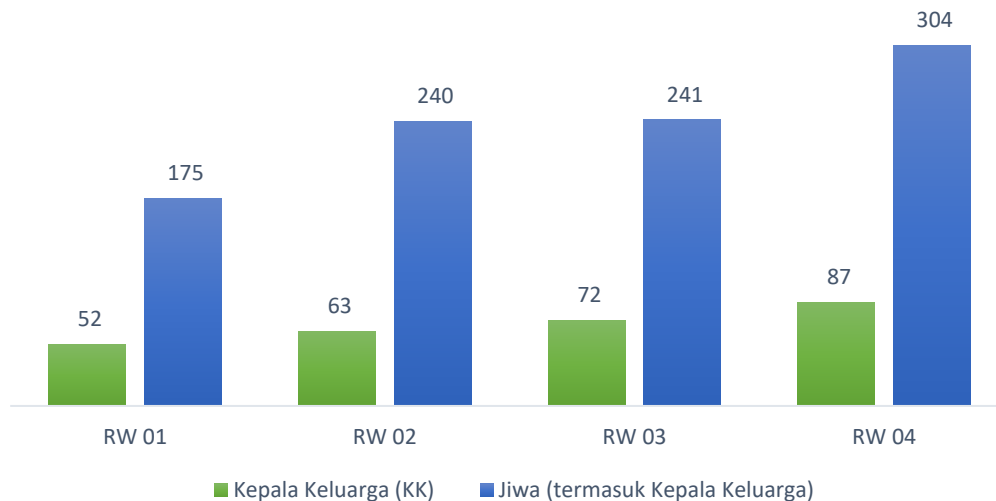
DEMOGRAFI DESA

Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu
Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara

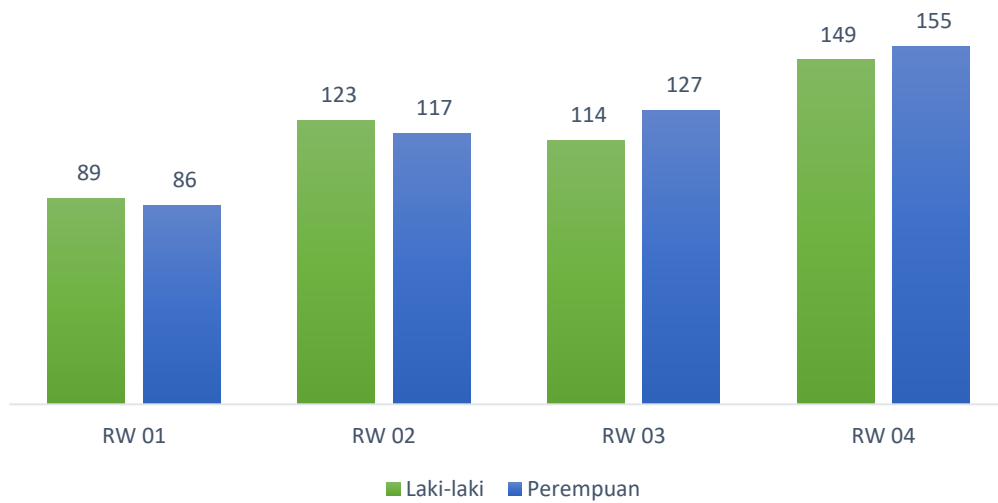
DEMOGRAFI DESA

Berdasarkan hasil pendataan Data Desa Presisi (DDP) di Desa Lahabaru. Diperoleh jumlah kepala keluarga sebanyak 274 KK. Berdasarkan jumlah tersebut diperoleh angka jumlah jiwa penduduk Desa Lahabaru sebanyak 960 jiwa, dengan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki 475 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin Perempuan 485 jiwa.

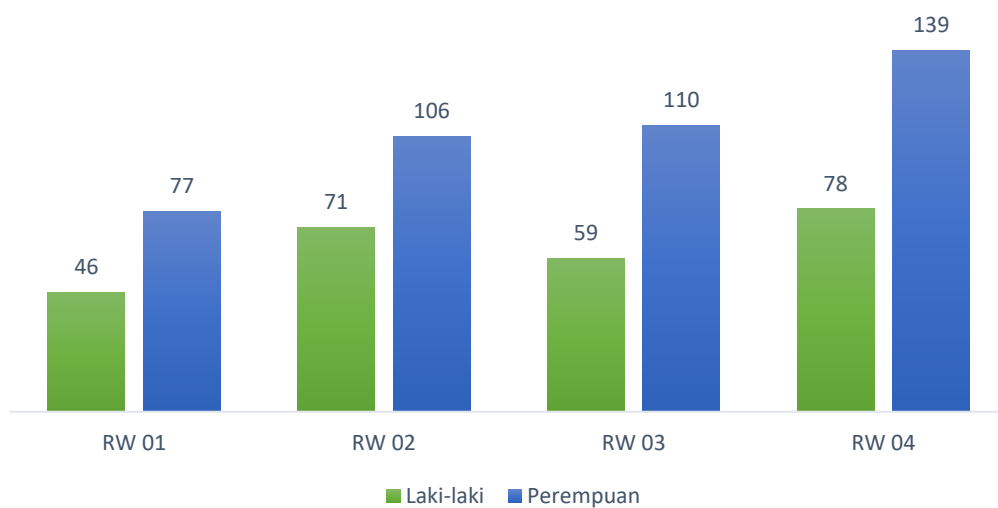
Berdasarkan rentang umur, umumnya penduduk Desa Lahabaru berada pada kualifikasi produktif (15-64 tahun) dengan jumlah 668 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk dengan kualifikasi non produktif dan > 65 tahun yaitu 292 jiwa. Berikut atau dibawah ini dipaparkan data-data rinci terkait dengan monografi Desa Lahabaru.



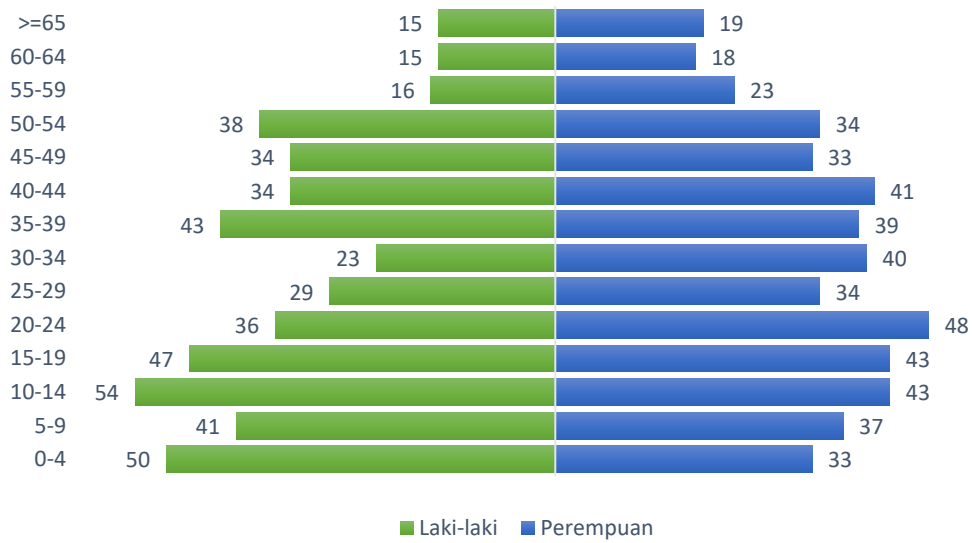
Gambar 7 Jumlah kepala keluarga dan penduduk di setiap Dusun di Desa Lahabaru



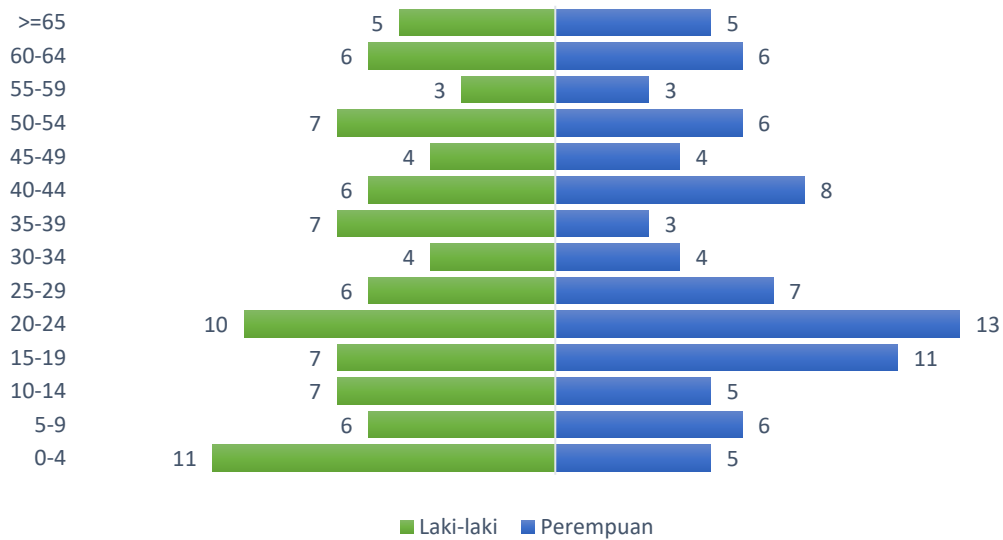
Gambar 8 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Lahabaru



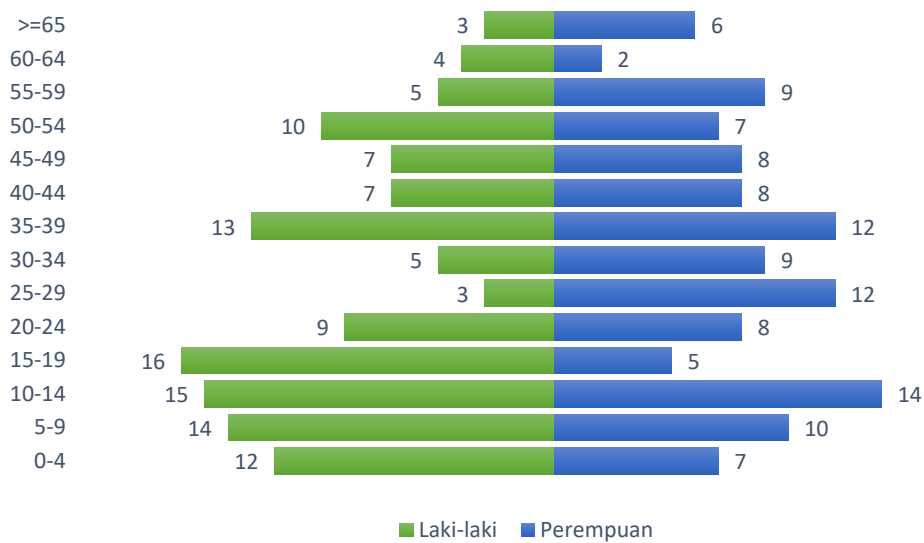
Gambar 9 Jumlah anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin di Desa Lahabaru.



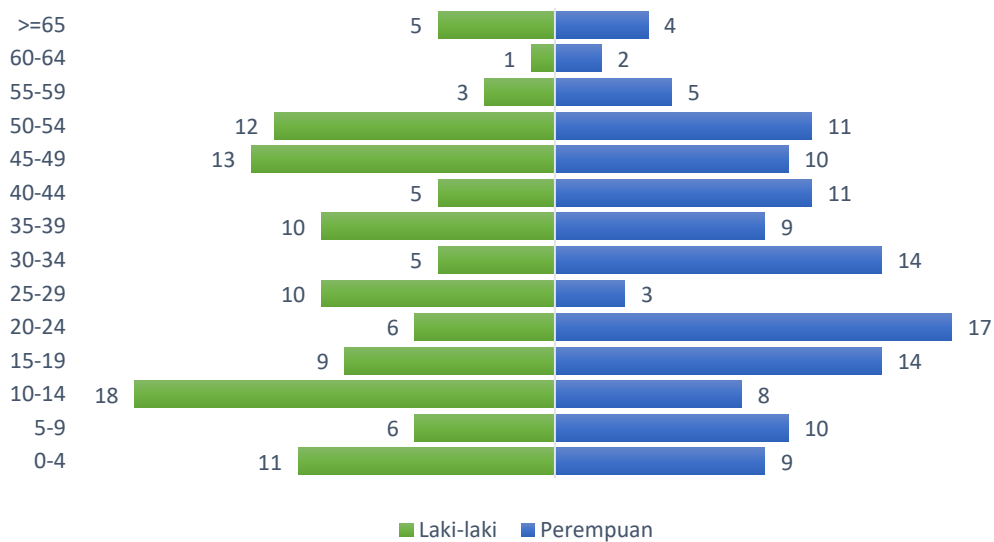
Gambar 10 Sebaran penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan usia (piramida penduduk) Desa Lahabaru



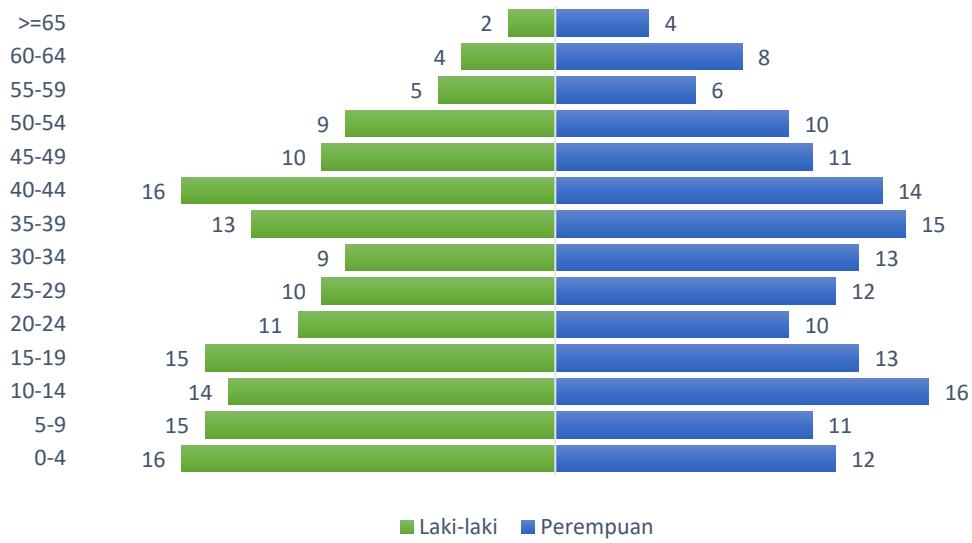
Gambar 11 Piramida penduduk Dusun 1



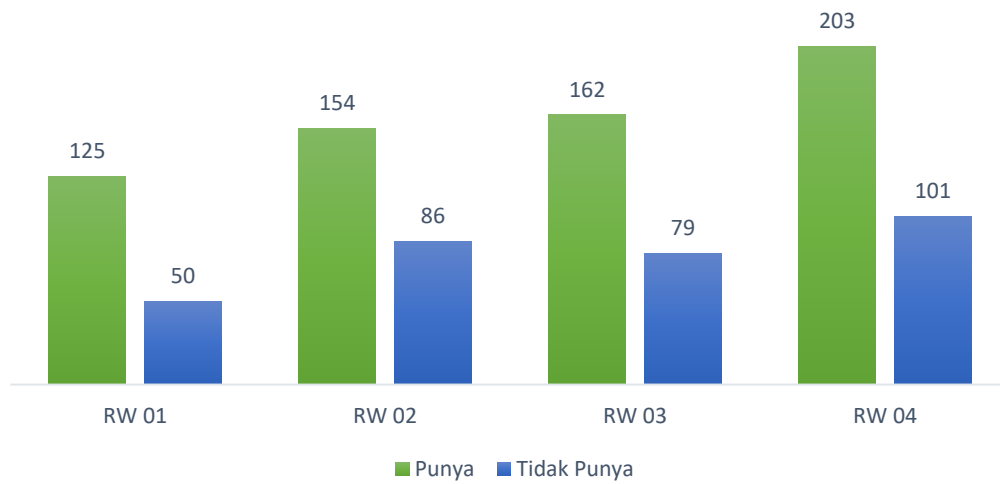
Gambar 12 Piramida penduduk Dusun 2



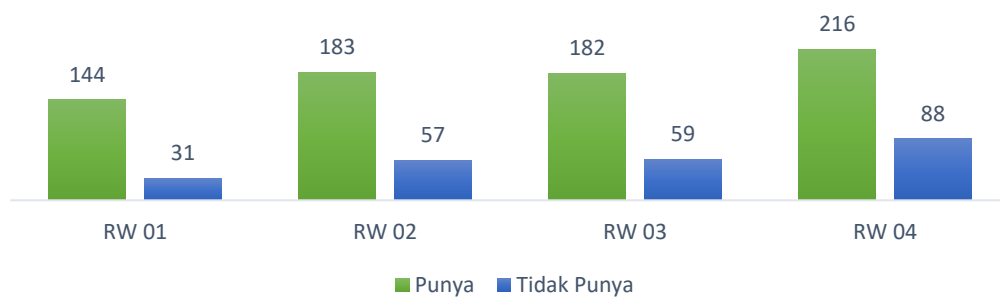
Gambar 13 Piramida penduduk Dusun 3



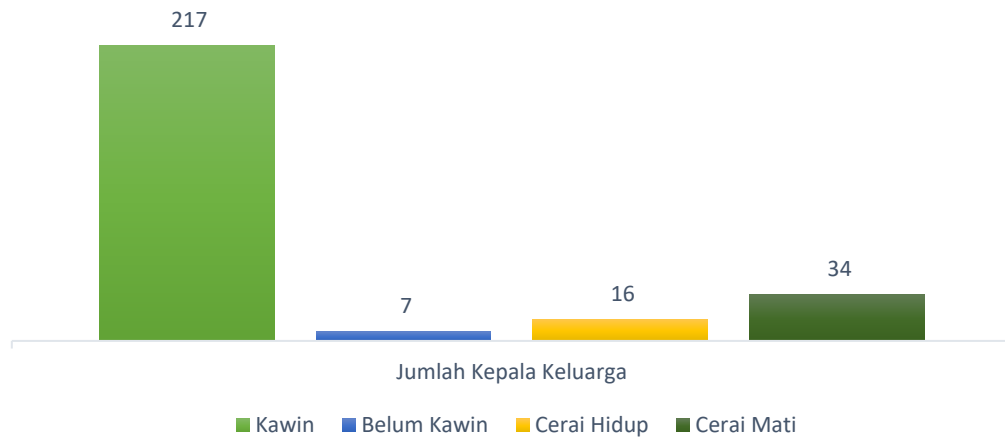
Gambar 14 Piramida penduduk Dusun IV



Gambar 15 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan ktp di Desa Lahabaru



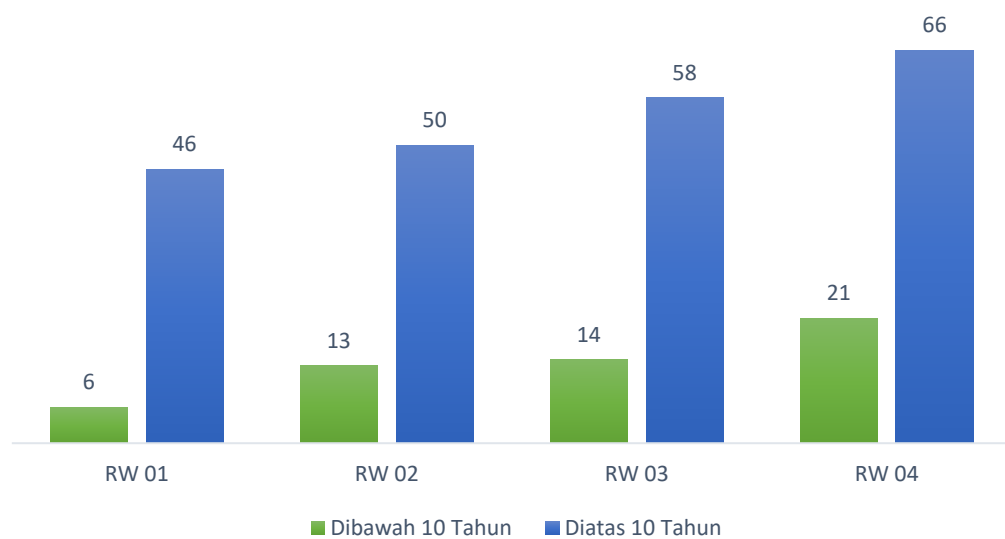
Gambar 16 Jumlah penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran di Desa Lahabaru



Gambar 17 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin penduduk di Desa Lahabaru

Tabel 7 Jumlah penduduk berdasarkan status kawin Desa Lahabaru

Dusun	Status Kawin Penduduk				Total
	Kawin	Belum Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
1	41	1	3	7	52
2	51	3	3	6	63
3	52	3	6	11	72
4	73	0	4	10	87
Total	217	7	16	34	274



Gambar 18 Jumlah keluarga berdasarkan lama tinggal di Desa Lahabaru



Lab.
DATA DESA
PRESISI

Fakultas Ekologi Manusia - IPB University





Bagian 4

PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

**Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu,
Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara**

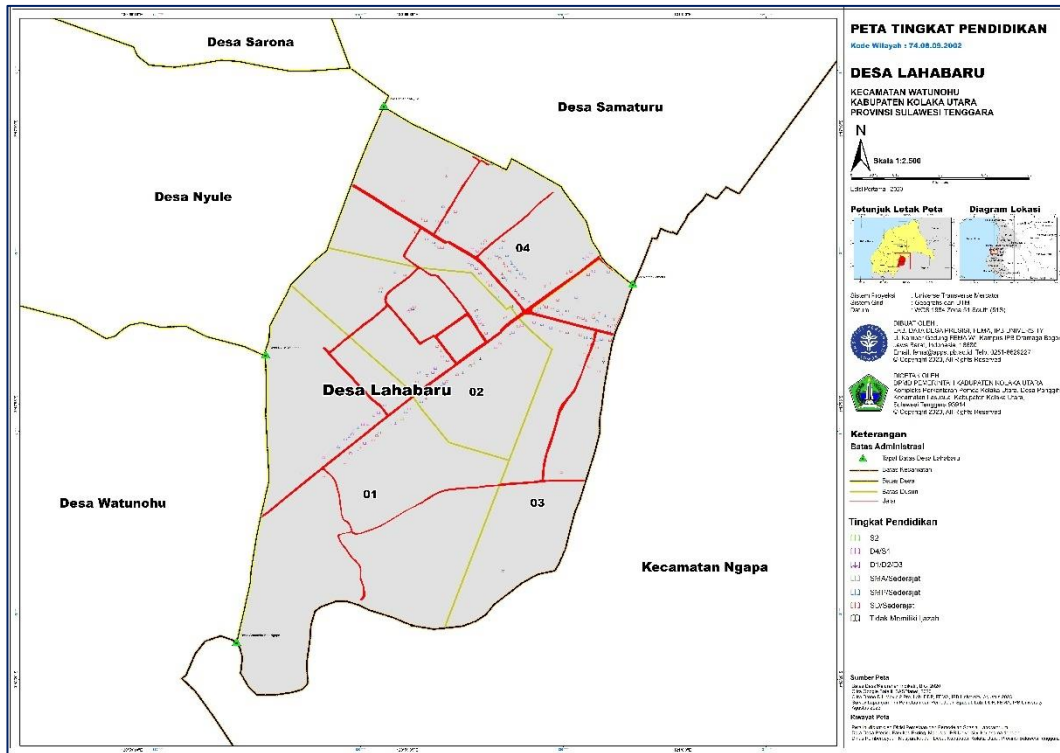
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Aspek pendidikan Desa Lahabaru, berdasarkan hasil sensus Data Desa Presisi (DDP) menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Desa Lahabaru memiliki tingkat Pendidikan SD/ sederajat dengan jumlah 245 jiwa. Selanjutnya penduduk yang tidak memiliki ijazah untuk Desa Lahabaru berada pada urutan kedua yaitu 241 jiwa. SMP/ sederajat sebanyak 176 jiwa. Penduduk dengan kualifikasi SMA/ sederajat berjumlah 182 jiwa. D1/D2/D3 sebanyak 44 jiwa. Untuk penduduk dengan tingkat Pendidikan D4/S1 sebanyak 68 jiwa dan S2 sebanyak 4 jiwa.

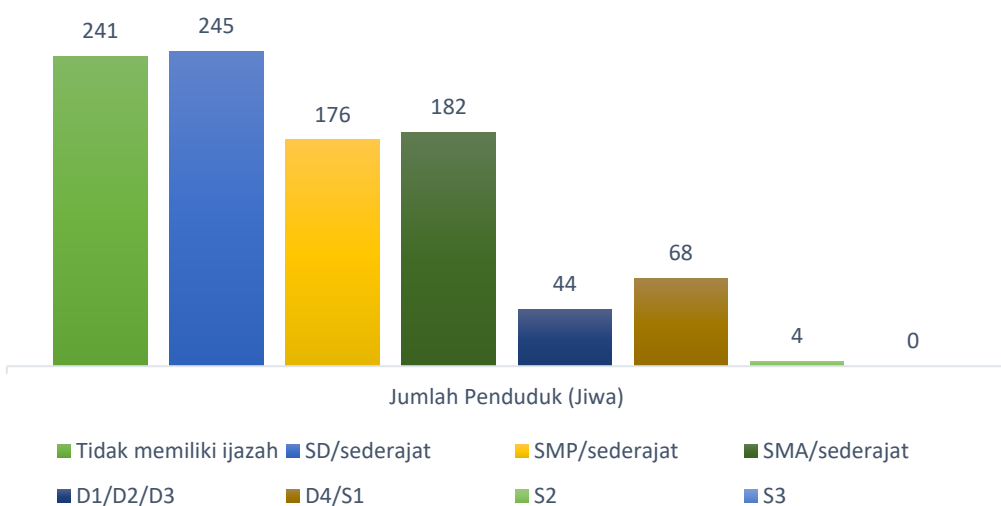
Aspek kebudayaan yang ada di Desa Lahabaru sangat erat kaitannya dengan etnis yang mendiami Lahabaru. Mayoritas etnis yang berada di Lahabaru adalah Bugis dengan 808 jiwa yang tersebar di empat dusun. Toraja 5 jiwa, Makassar 3 jiwa, Jawa 51 jiwa, Mori padoe 5 jiwa, Tolaki 6 jiwa, luwuk 2 jiwa, Malaysia 1 jiwa, Muna 5 jiwa, Enrekang 6 jiwa, Mandar 1 dan Lombok 23 jiwa.

Secara keagamaan mayoritas penduduk Desa Lahabaru beragama Islam dengan jumlah 959 jiwa. Selain penduduk agama Islam yang menjadi mayoritas, ada juga 1 jiwa yang merupakan penduduk dengan agama Kristen yang berada di dusun dua Desa Lahabaru.

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari Masyarakat Desa Lahabaru secara hanya menggunakan dua Bahasa saja yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. Bahasa Indonesia sejumlah 877 jiwa dan Bahasa Daerah 83 jiwa. Informasi dan data terkait dengan aspek Pendidikan dan Kebudayaan Desa Lahabaru secara lengkap atau rinci akan disajikan pada table dan gambar di bawah atau halaman selanjutnya.



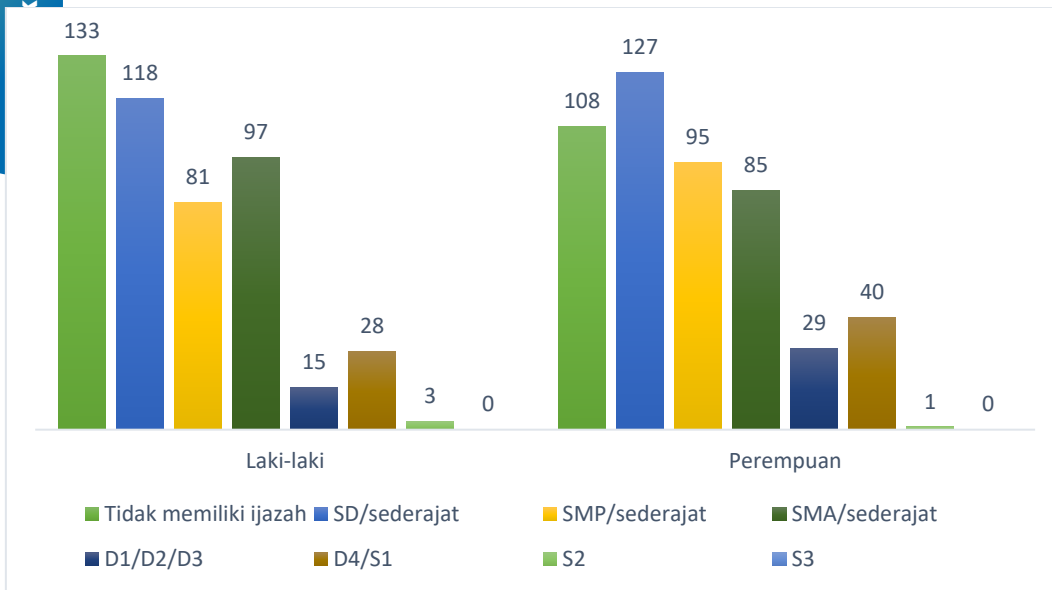
Gambar 19 Peta sebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Lahaburu



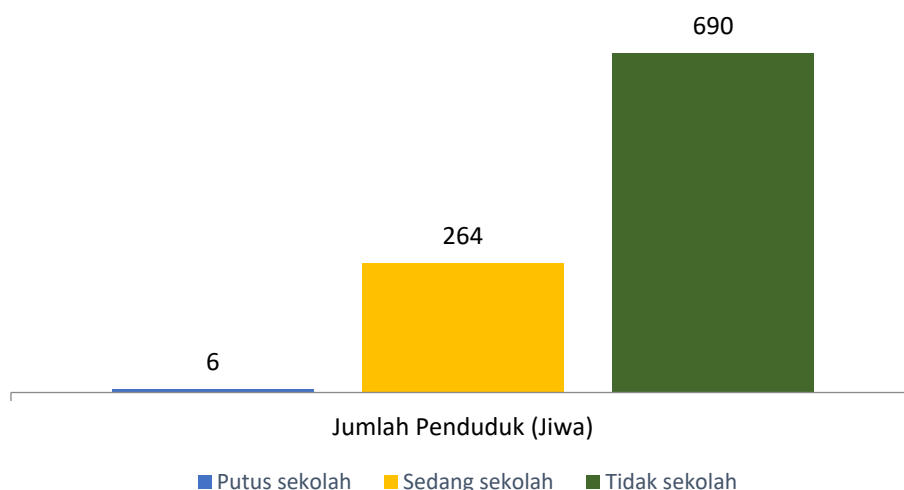
Gambar 20 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Lahaburu

Tabel 8 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Lahabaru

Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)							
	Tidak ada ijazah	SD/ sederajat	SMP/ se derajat	SMA/ sederajat	D1/D2/D3	D4/S1	S2	S3
	38	30	24	43	14	25	1	0
	61	61	34	41	18	23	2	0
	62	66	57	46	5	5	0	0
	80	88	61	52	7	15	1	0
TOTAL	241	245	176	182	44	68	4	0



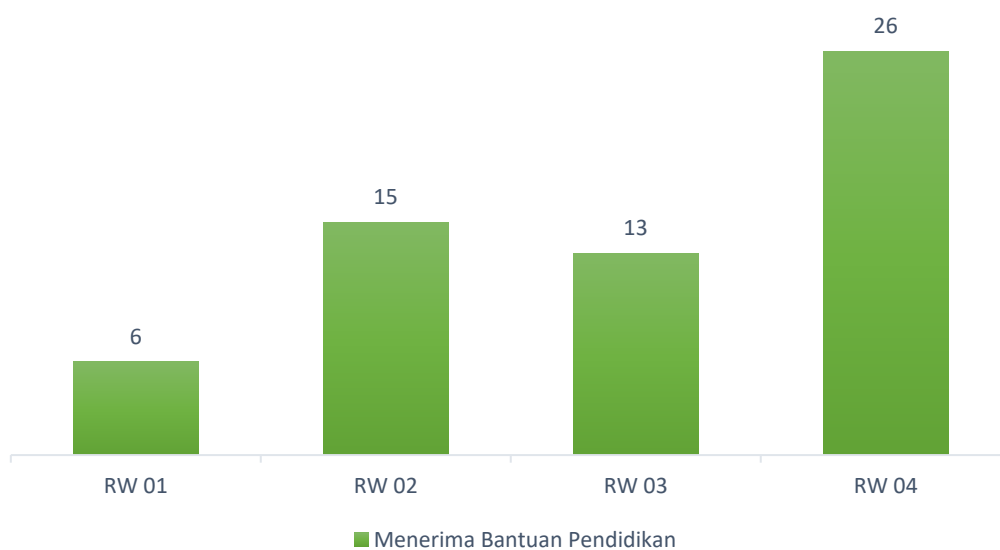
Gambar 21 Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki dan jenis kelamin di Desa Lahabaru



Gambar 22 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Desa Lahabaru

Tabel 9 Jumlah penduduk berdasarkan partisipasi sekolah di Desa Lahabaru

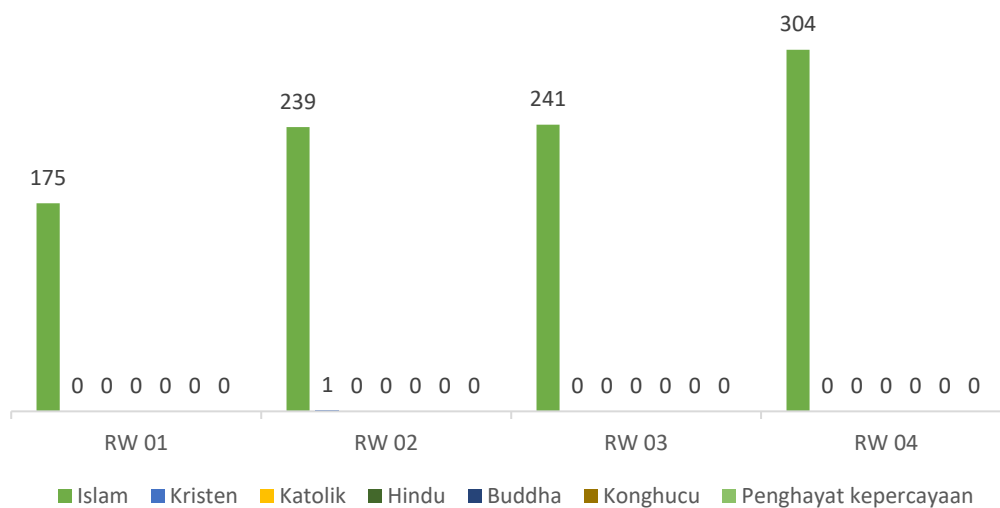
Dusun	Putus sekolah	Sedang sekolah	Tidak sekolah
1	0	42	133
2	0	73	167
3	3	64	174
4	3	85	216
TOTAL	6	264	690



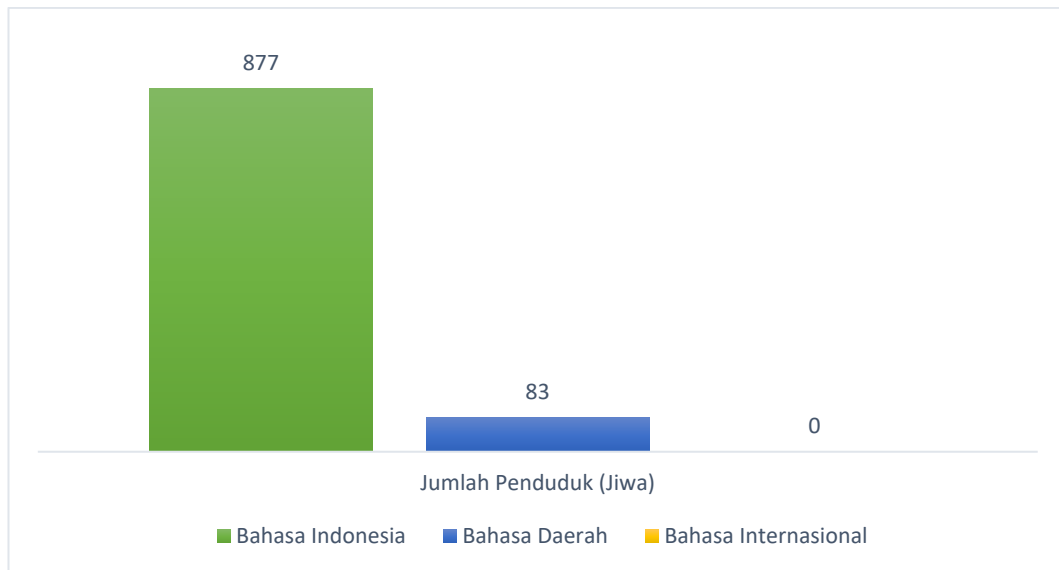
Gambar 23 Jumlah keluarga berdasarkan bantuan pendidikan yang diterima di Desa Lahabaru

Tabel 10 Jumlah penduduk berdasarkan etnisitas di Desa Lahabaru

Dusun	1	2	3	4	TOTAL
Toraja	5	0	0	0	5
Bugis	139	201	209	259	808
Makassar	0	0	0	3	3
Jawa	0	9	25	17	51
Mori Padoe	5	0	0	0	5
Tolaki	0	4	2	0	6
Luwuk	0	0	2	0	2
Malaysia	0	1	0	0	1
Muna	0	0	0	5	5
Enrekang	1	5	0	0	6
Luwu	23	16	3	2	44
Mandar	0	0	0	1	1
Lombok	2	4	0	17	23



Gambar 24 Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut di Desa Lahabaru



Gambar 25 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa yang digunakan di Desa Lahabaru.

Tabel 11 Jumlah penduduk berdasarkan bahasa daerah yang digunakan di Desa Lahabaru

Dusun	Bugis	Jawa
1	10	0
2	22	0
3	21	15
4	15	0
TOTAL	68	15



Lab.
DATA DESA
PRESISI
Fakultas Ekologi Manusia - IPB University





Bagian 5

INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu
Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara

INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pendataan Data Desa Presisi (DDP) bertujuan untuk mendapatkan informasi yang presisi (*by name, by address*) tentang aspek-aspek yang ada di suatu wilayah. Salah satu aspek yang didata secara seksama dalam DDP adalah infrastruktur dan lingkungan hidup, termasuk kebiasaan penduduk dalam membuang sampah dan kepemilikan handphone.

Berdasarkan hasil pendataan di Desa Lahaburu, diketahui bahwa secara umum penduduk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah (TPS) sebanyak 208 kepala keluarga. Selain itu, sekain itu, ada juga Masyarakat yang membakar sampah sejumlah 64 kepala keluarga dan terdapat dua kepala keluarga yang membuang sampah disungai.

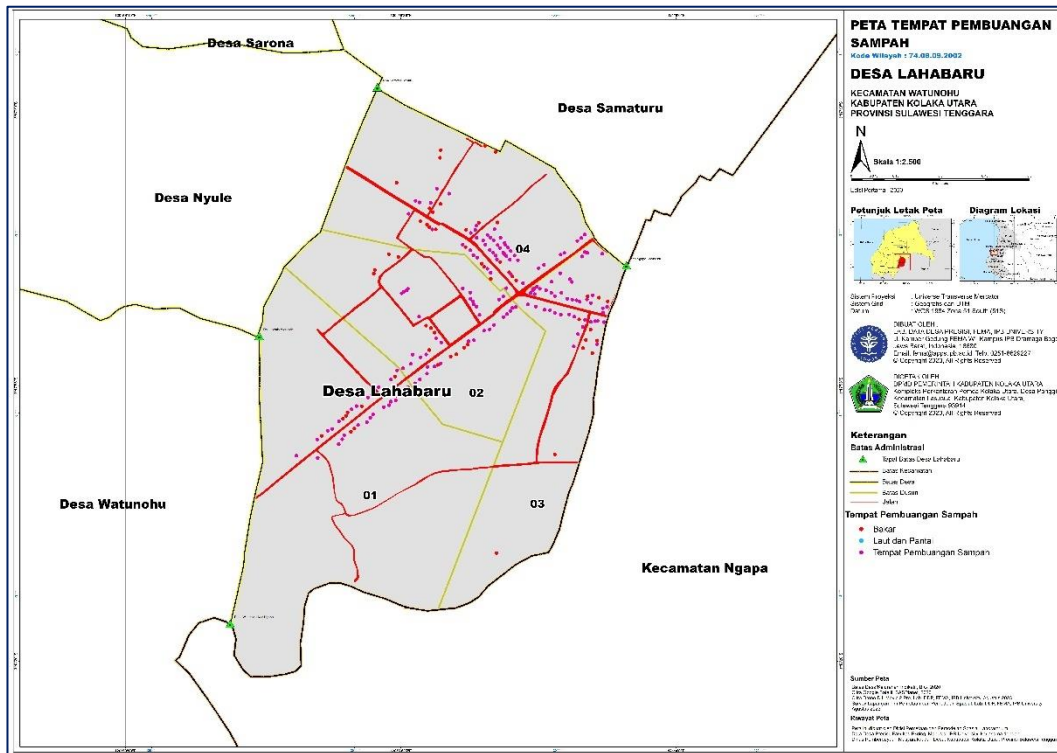
Kepemilikan handphone adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui sejauh mana informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat di Desa Lahaburu. Berdasarkan hasil pendataan, mayoritas penduduk memiliki handphone dengan jumlah 637 jiwa dan yang tidak memiliki handphone sebanyak 323. Angka tersebut menunjukkan tingkat keterhubungan dan serapan informasi penduduk Desa Lahaburu sangat baik. Sedangkan berdasarkan kepemilikan pekarangan, diperoleh bahwa mayoritas penduduk Desa Lahaburu memiliki pekarangan yang dapat ditanami sebanyak 121 kepala keluarga dan yang tidak memiliki pekarangan sejumlah 153 kepala keluarga..

Kualitas infrastruktur dan lingkungan di Desa Lahaburu sudah baik. Mayoritas masyarakat desa membuang sampah ke tempat pembuangan sampah (TPS), ini menandakan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah, namun masih ada beberapa keluarga (KK) yang masih menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan, yaitu dengan cara dibakar dan dibuang ke sungai.

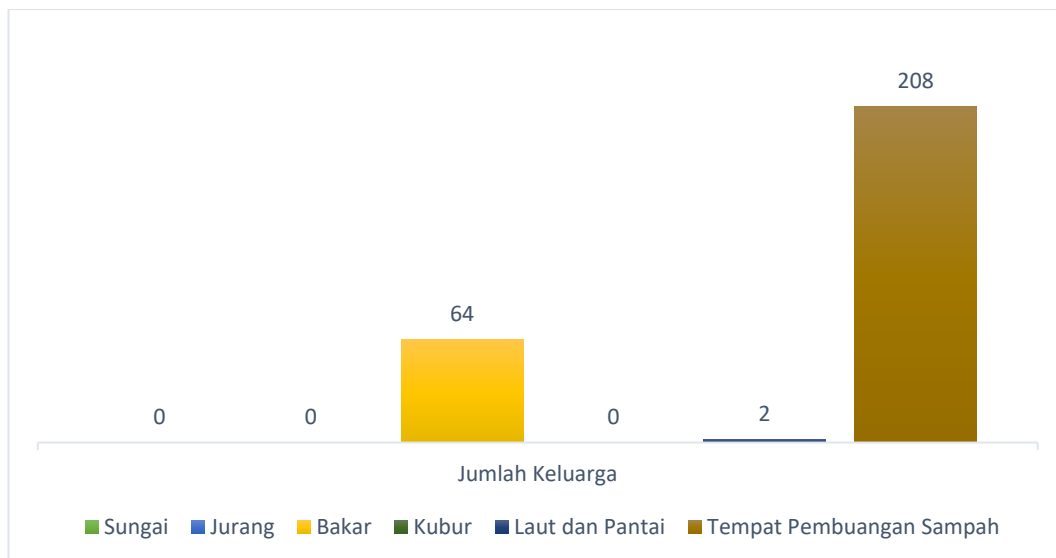
Selanjutnya banyaknya pekarangan rumah warga menunjukkan bahwa masyarakat Lahaburu memiliki kepedulian terhadap lingkungan

dan kesehatan keluarga dengan menata dan menanam tanaman di pekarangan. Di samping itu, dengan jumlah masyarakat yang memiliki *handphone* menunjukkan bahwa masyarakat desa sudah berkembang dan dapat mengakses informasi dengan baik.

Data-data lebih rinci terkait aspek infrastruktur dan lingkungan hidup penduduk Desa Lahabaru dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 26 Peta sebaran keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Lahabaru



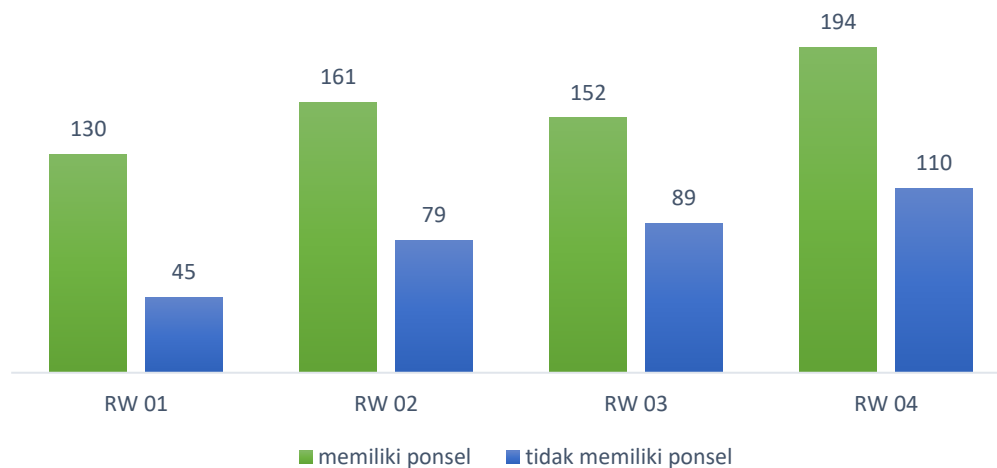
Gambar 27 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Lahabaru

Tabel 12 Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Lahabaru

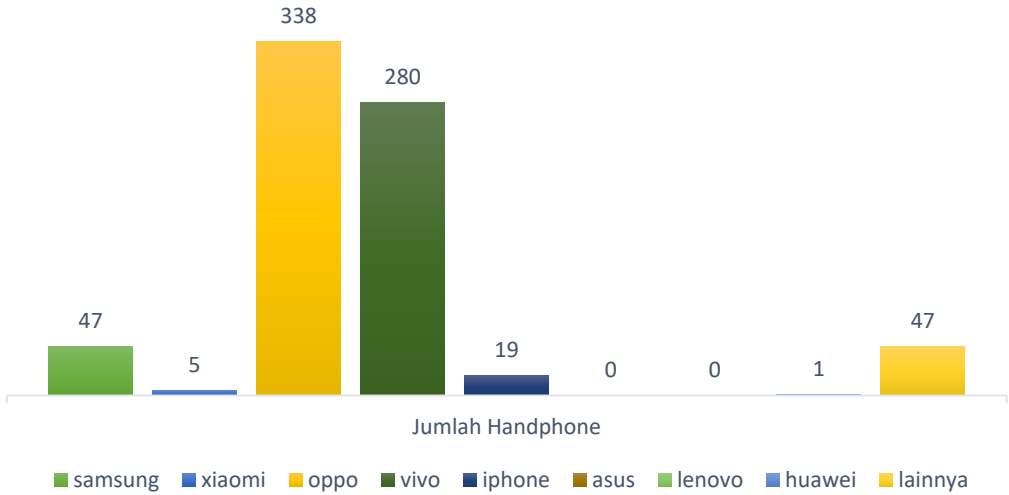
Dusun	Sungai	Jurang	Bakar	Kubur	Laut dan Pantai	Tempat Pembuangan Sampah
1	0	0	11	0	0	41
2	0	0	15	0	0	48
3	0	0	11	0	1	60
4	0	0	27	0	1	59
TOTAL	0	0	64	0	2	208

Tabel 13 Jumlah keluarga berdasarkan aset ekonomi yang dimiliki di Desa Lahabaru

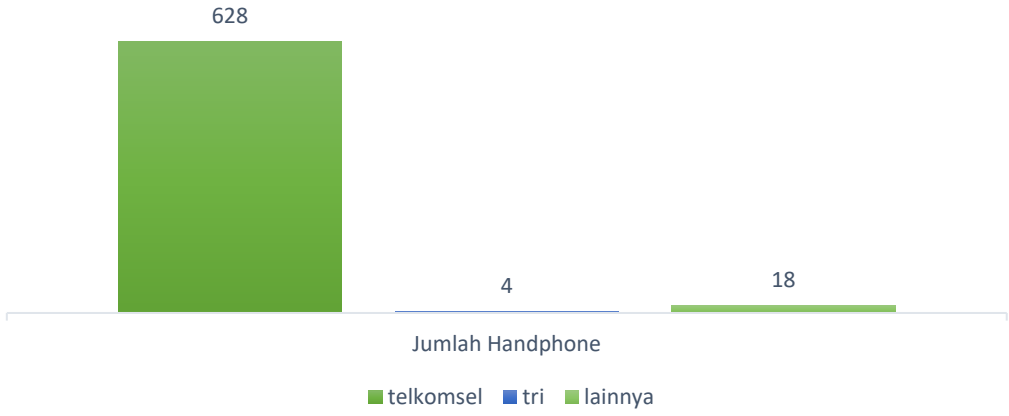
Dusun	Rumah/Kontrakan/ Villa (Tidak Ditinggali)	Restoran/ Rumah Makan	Ruko/Toko/Warung	Emas/Logam Mulia
1	6	0	2	24
2	6	1	2	33
3	5	0	5	26
4	1	0	2	35
TOTAL	18	1	11	118



Gambar 28 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan *handphone* di Desa Lahabaru



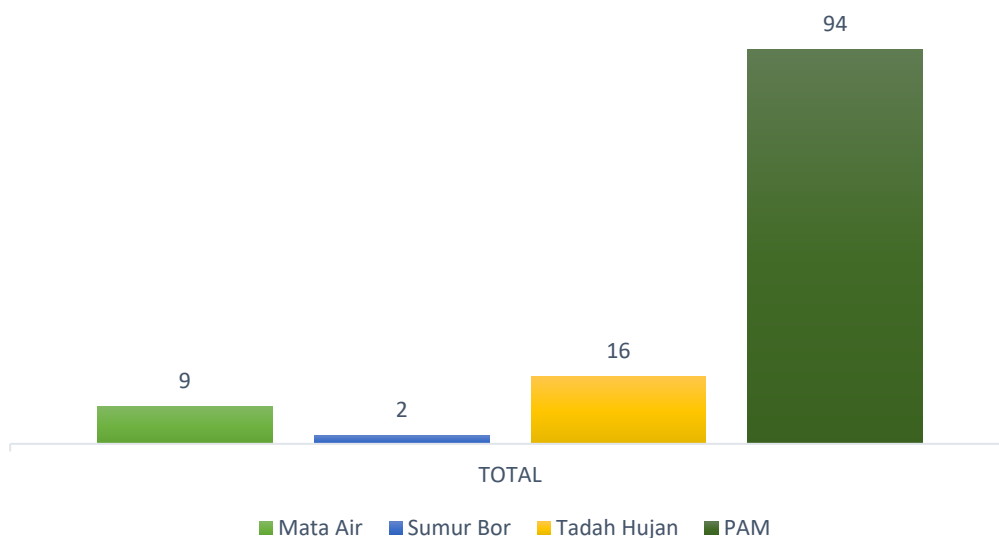
Gambar 29 Jumlah penduduk berdasarkan merek *handphone* yang digunakan di Desa Lahabaru



Gambar 30 Jumlah penduduk berdasarkan merek *provider* yang digunakan di Desa Lahabaru



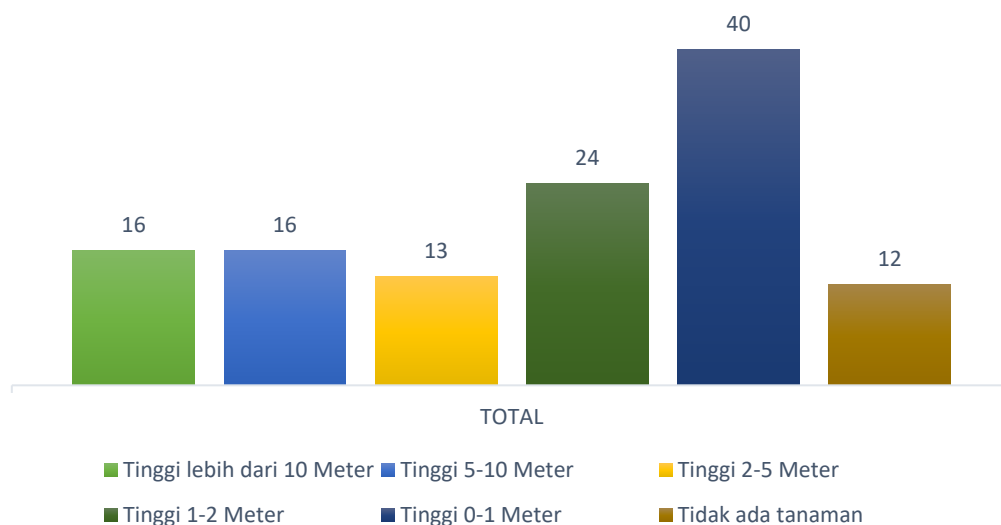
Gambar 31 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan pekarangan di Desa Lahabaru



Gambar 32 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Desa Lahabaru

Tabel 14 Jumlah keluarga berdasarkan sumber air pekarangan di Desa Lahabaru

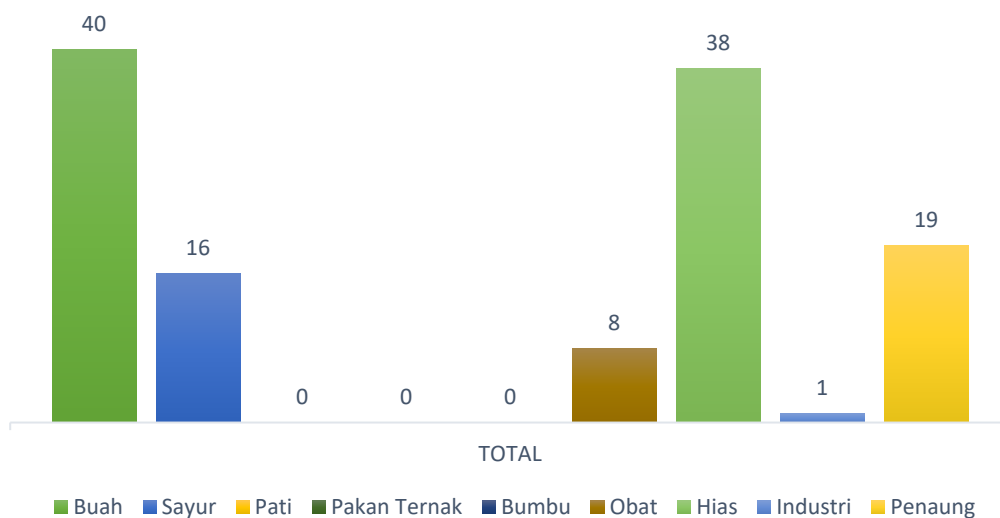
Dusun	Mata Air	Sumur Bor	Tadah Hujan	PAM
1	2	0	1	33
2	0	0	2	27
3	5	1	6	9
4	2	1	7	25
TOTAL	9	2	16	94



Gambar 33 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Desa Lahaburu

Tabel 15 Jumlah keluarga berdasarkan strata tanaman pekarangan di Desa Lahaburu

Dusun	Tinggi lebih dari 10 Meter	Tinggi 5-10 Meter	Tinggi 2-5 Meter	Tinggi 1-2 Meter	Tinggi 0-1 Meter	Tidak ada tanaman
1	4	4	6	6	15	1
2	6	7	2	6	8	0
3	1	1	2	3	11	3
4	5	4	3	9	6	8
TOTAL	16	16	13	24	40	12



Gambar 34 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di pekarangan pada Desa Lahaburu

Tabel 16 Jumlah keluarga berdasarkan ragam jenis tanaman di Pekarangan pada Desa Lahaburu

Dusun	Buah	Sayur	Pati	Pakan Ternak	Bumbu	Obat	Hias	Industri	Penaung
1	11	5	0	0	0	4	16	0	5
2	14	6	0	0	0	0	8	0	4
3	3	4	0	0	0	3	4	1	5
4	12	1	0	0	0	1	10	0	5
TOTAL	40	16	0	0	0	8	38	1	19

A photograph of a group of people in a rural setting, overlaid with a semi-transparent blue filter. In the foreground, a person is seen from the back, wearing a watch and gesturing with their hand while looking at a laptop. To the right, a woman in a hijab is sitting and looking towards the laptop. In the background, another person is visible, and there are clothes hanging on a line. The overall scene suggests a community meeting or a digital literacy session.

Bagian 6

SOSIAL, HUKUM DAN HAM

Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu
Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara

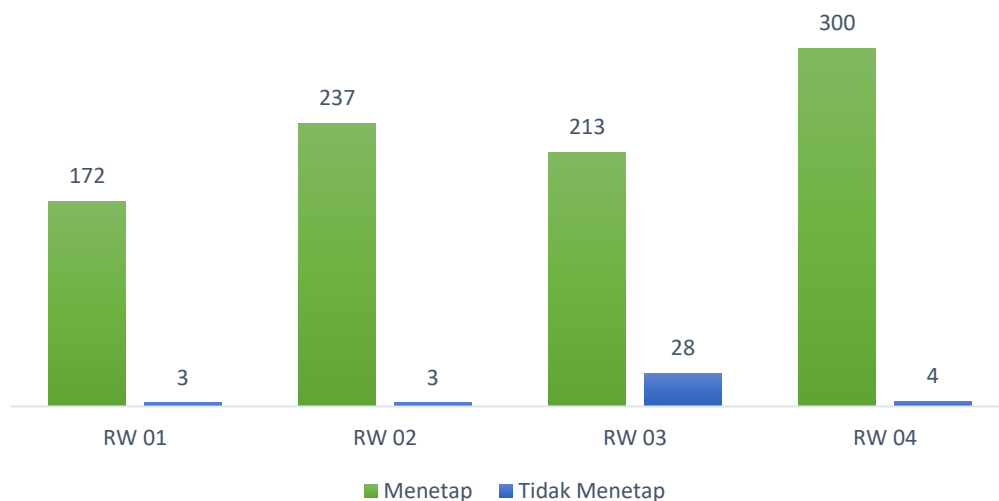
KEHIDUPAN SOSIAL, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM

Poin kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang harus mendapatkan perhatian serius. Data Desa Presisi dapat digunakan dan salah satu indikator yang diukur adalah penerima bantuan. Mayoritas masyarakat menerima subsidi energi karena didalamnya termasuk gas subsidi, listrik subsidi dan bahan bakar subsidi sejumlah 220 kk. Penerima bantuan beras sejumlah 12 kk, PKH 20 kk, BPNT 1 kk, KKS 3 kk, BLT dana desa 22 kk.

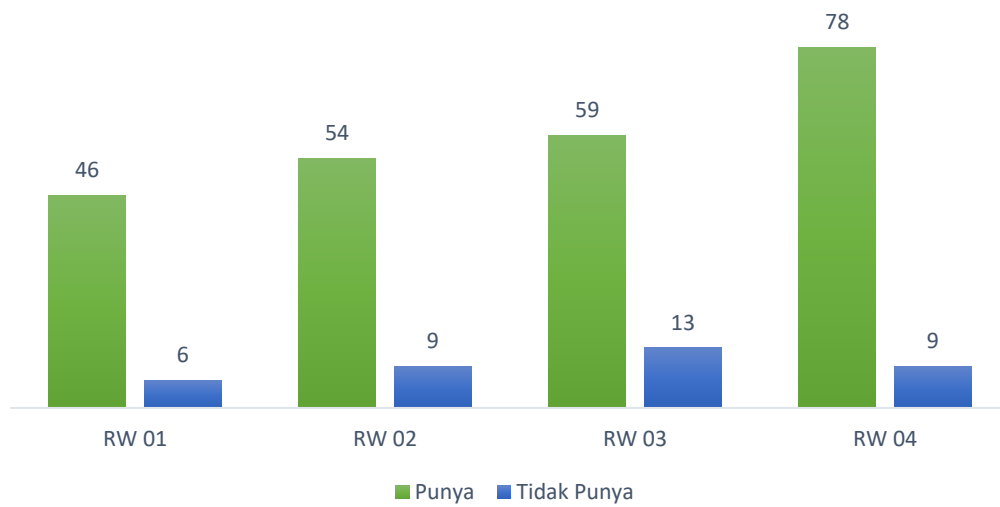
Indikator lain yang ditelisik dalam data desa presisi adalah status tinggal penduduk, dengan mayoritas penduduk berstatus menetap dan hanya sedikit yang tidak tinggal menetap. Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 922 jiwa yang menetap dan sebanyak 38 yang tidak ingin menetap di Desa Lahabaru

Selain itu, pengalaman kekerasan atau tindak kejahatan di desa juga diperhitungkan sebagai indikator yang mengkonfirmasi aspek kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM, dan mayoritas penduduk di Desa Lahabaru tidak pernah mengalaminya. Terbukti dari data yang diperoleh hanya ada dua yang pernah mengalami kekerasan yakni di dusun satu dan empat masing-masing satu orang.

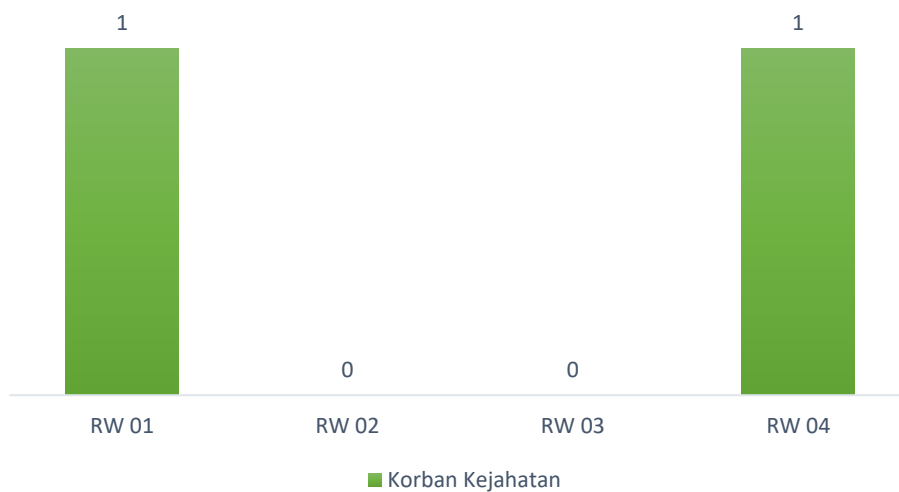
Data-data lebih rinci terkait dengan aspek kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan HAM di Desa Melinggih Kelod dapat dilihat di halaman berikutnya.



Gambar 35 Jumlah penduduk berdasarkan status tinggal di Desa Lahabaru



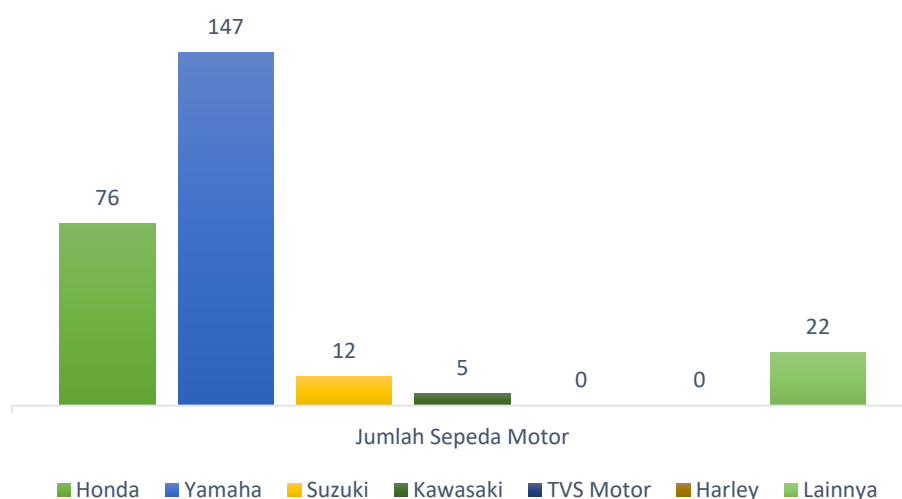
Gambar 37 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan kulkas di rumah di Desa Lahaburu



Gambar 38 Jumlah penduduk berdasarkan pengalaman menjadi korban kejahatan di Desa Lahaburu

Tabel 18 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan sarana transportasi di Desa Lahaburu

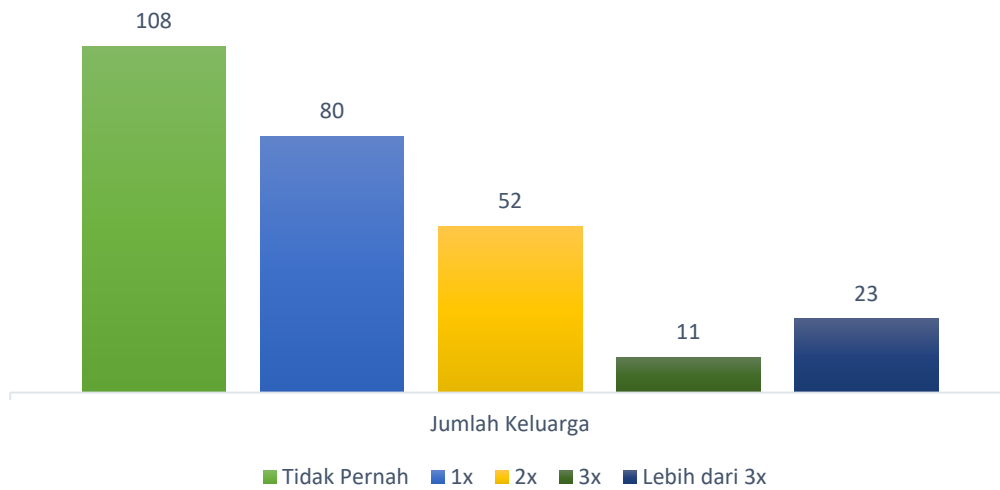
Dusun	Sepeda		Sepeda Motor		Mobil		Perahu		Perahu Motor		Kapal	
	1	>1	1	>1	1	>1	1	>1	1	>1	1	>1
1	9	1	25	16	13	0	1	0	0	0	0	0
2	10	2	30	23	14	1	0	0	0	0	0	0
3	6	2	36	18	11	1	0	0	0	0	0	0
4	14	6	53	22	11	5	0	0	0	0	0	0
TOTAL	39	11	144	79	49	7	1	0	0	0	0	0



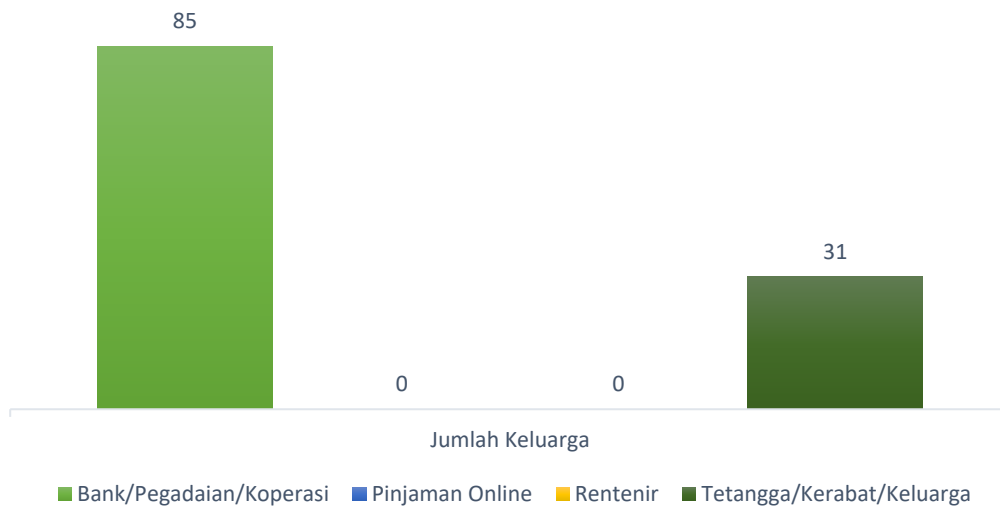
Gambar 39 Jumlah keluarga berdasarkan merek sepeda motor yang dimiliki Di Desa Lahaburu

Tabel 19 Jumlah keluarga berdasarkan merek mobil yang dimiliki di Desa Lahaburu

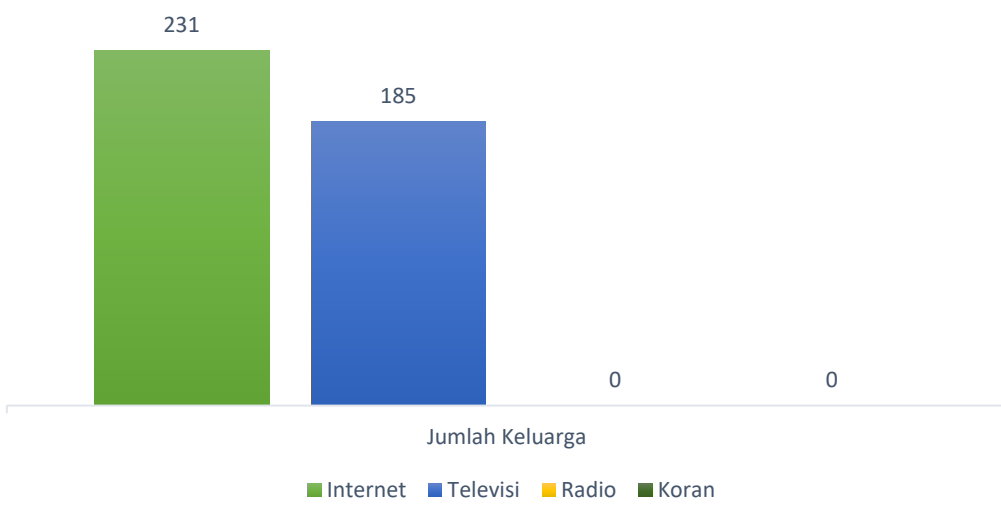
Dusun	Toyota	Honda	Daihatsu	Suzuki	KIA	Nissan	Madza	Isuzu	BMW	Mercedes -benz	Mitsubis hi	Lainnya
1	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2	9	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
4	7	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	4
TOTAL	33	5	4	1	0	1	0	0	0	0	3	9



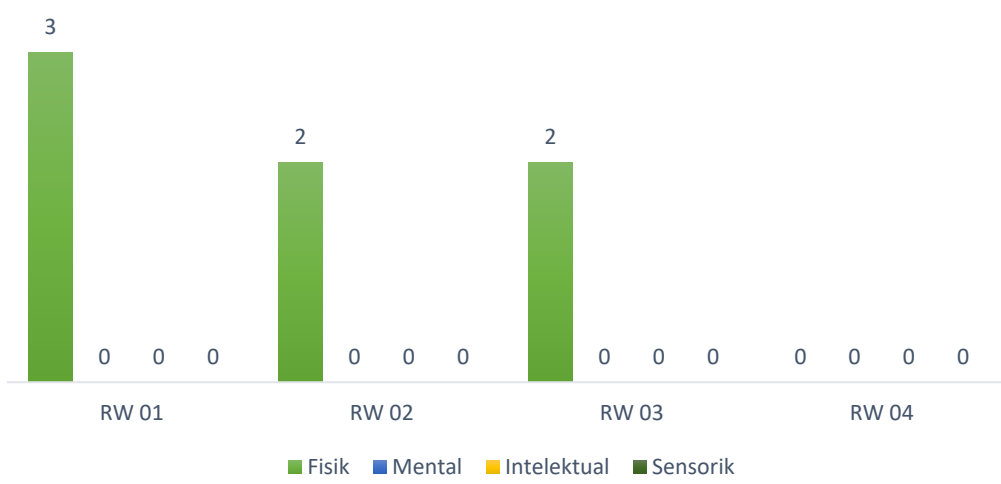
Gambar 40 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi *refreshing* di Desa Lahaburu



Gambar 41 Jumlah keluarga berdasarkan sumber pinjaman di Desa Lahaburu



Gambar 42 Jumlah keluarga berdasarkan akses media informasi di Desa Lahaburu




Gambar 43 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga penyandang disabilitas di Desa Lahaburu



Lab.
DATA DESA
PRESISI

Fakultas Ekologi Manusia - IPB University





Bagian 7

KESEHATAN, PEKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL

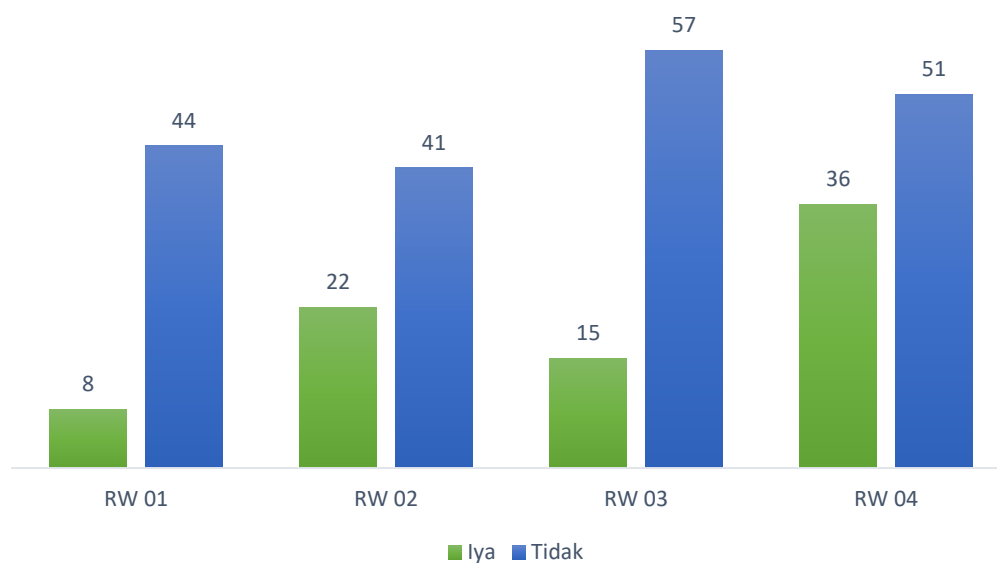
Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu,
Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara

KESEHATAN, PEKERJAAN DAN JAMINAN SOSIAL

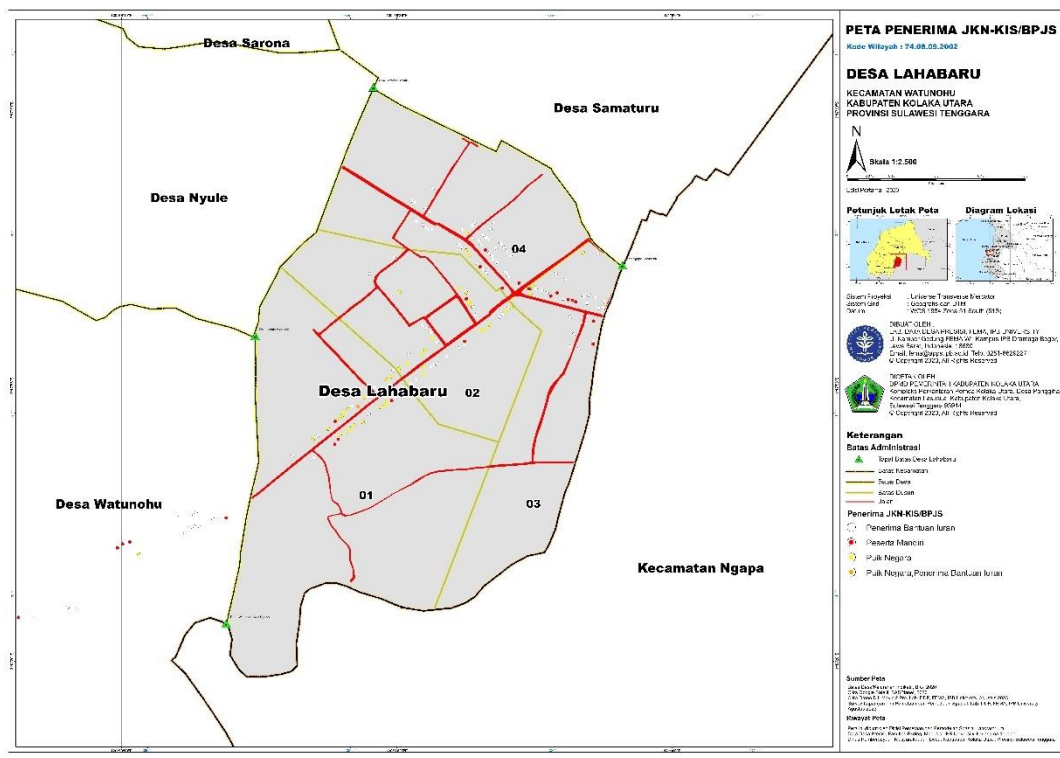
Aspek kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas hidup dan penghidupan penduduk di suatu wilayah. Data Desa Presisi (DDP) dapat menjadi sumber informasi untuk mengukur aspek tersebut. Dalam DDP Desa Lahabaru, terdapat beberapa indikator yang diukur, seperti profesi pekerjaan penduduk, jaminankesehatan, dan pekerjaan sampingan.

Sedangkan untuk jaminan kesehatan, mayoritas penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan melalui JKN-KIS/BPJS. Dari data keikutsertaan terhadap JKN/KIS/BPJS Masyarakat Desa Lahabaru dapat diketahui bahwa ada sekitar 374 yang menerima bantuan iuran, peserta mandiri sebanyak 60 jiwa, PUIK Negara sebanyak 172 jiwa dan PUIK Swasta satu jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih sedikit diantara Masyarakat Desa Lahabaru yang menganggap penting kepemilikan JKN/KIS/BPJS.

Dalam hal pekerjaan, mayoritas Masyarakat Desa Lahabaru mengolah lahan baik yang ada diluar kampung maupun didalam kampung. Selain mengolah lahan masyarakat juga beternak melakukan budidaya. Data lebih lengkap terkait aspek kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial dapat dilihat di halaman selanjutnya.



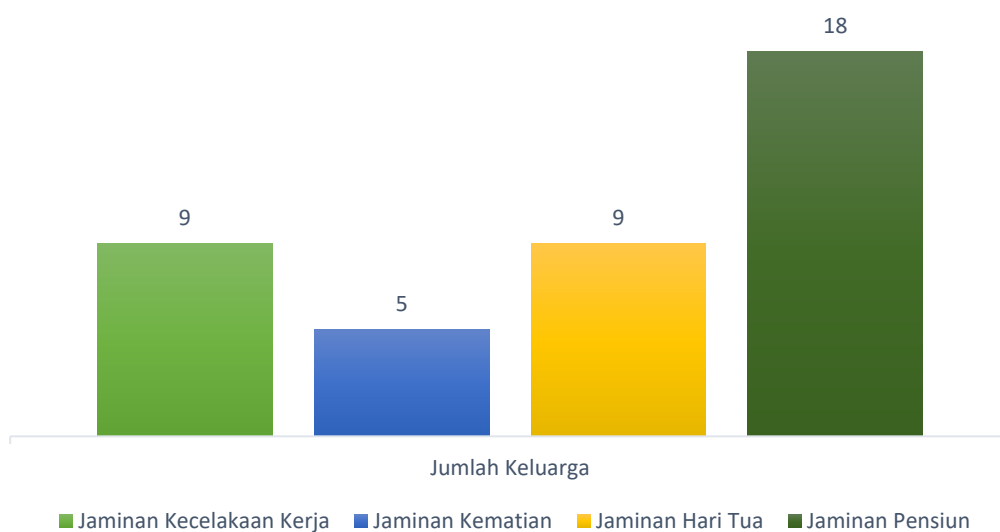
Gambar 44 Jumlah keluarga berdasarkan pengguna KB di Desa Lahabaru



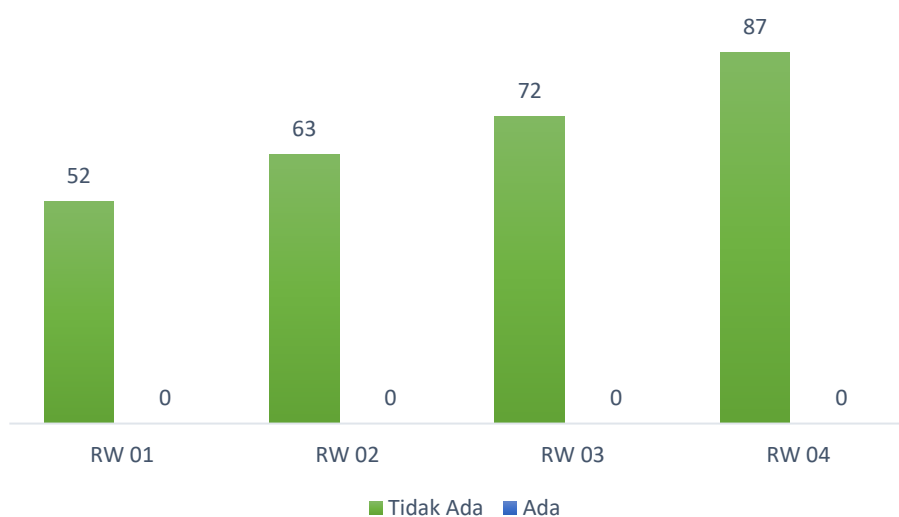
Gambar 45 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan penerima bantuan JKN-KIS/BPJS di Desa Lahaburu

Tabel 20 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS di Desa Lahaburu

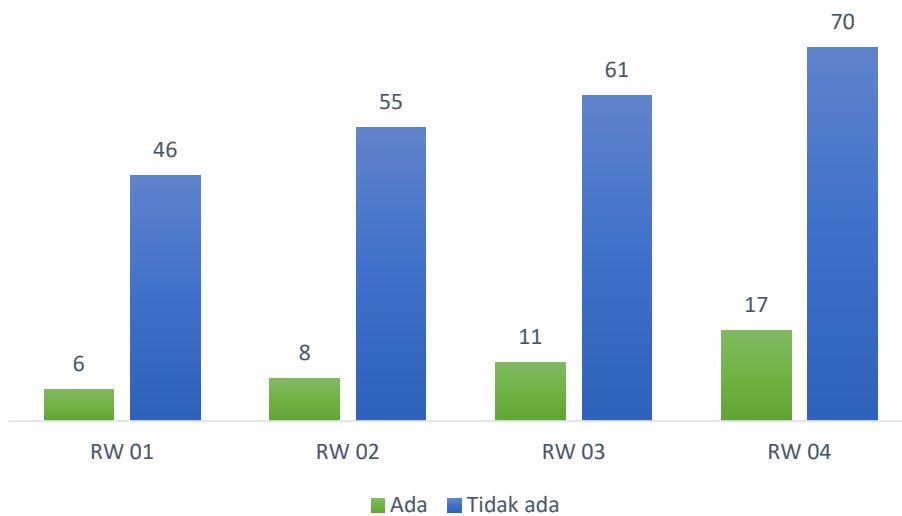
Dusun	Penerima Bantuan Iuran	Peserta Mandiri	PUIK Negara	PUIK Swasta
1	43	22	79	0
2	85	5	75	1
3	84	22	8	0
4	162	11	10	0
TOTAL	374	60	172	1



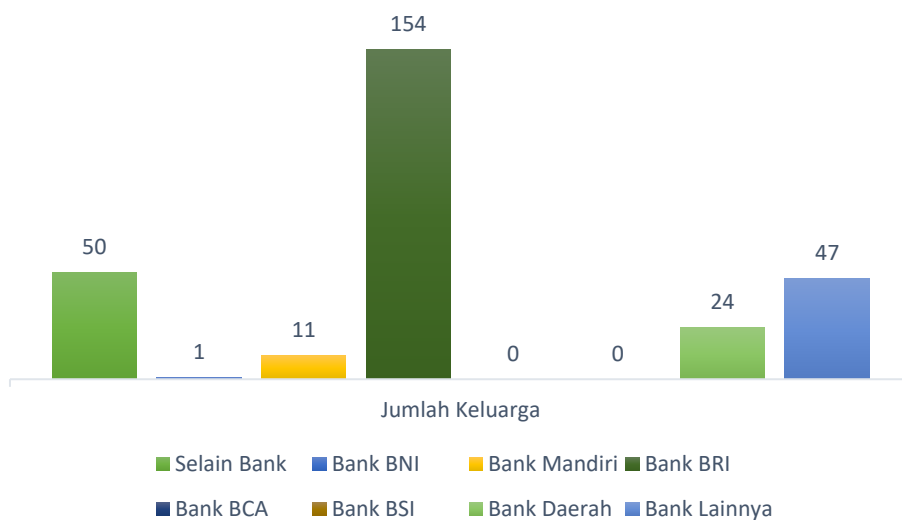
Gambar 46 Jumlah keluarga berdasarkan keikutsertaan bpjs ketenagakerjaan di Desa Lahaburu



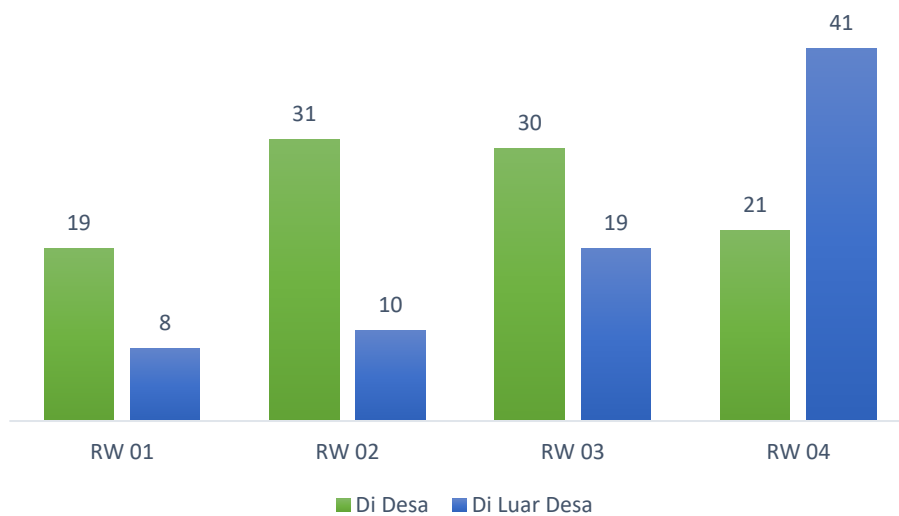
Gambar 47 Jumlah keluarga berdasarkan anggota keluarga menjadi TKI di Desa Lahaburu



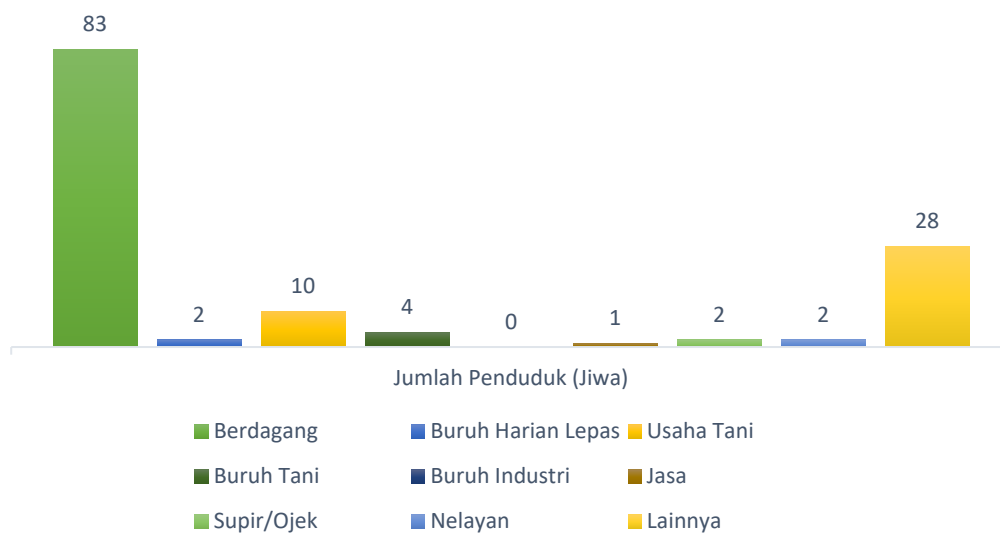
Gambar 48 Jumlah keluarga berdasarkan penyakit berat yang diderita di Desa Lahabaru



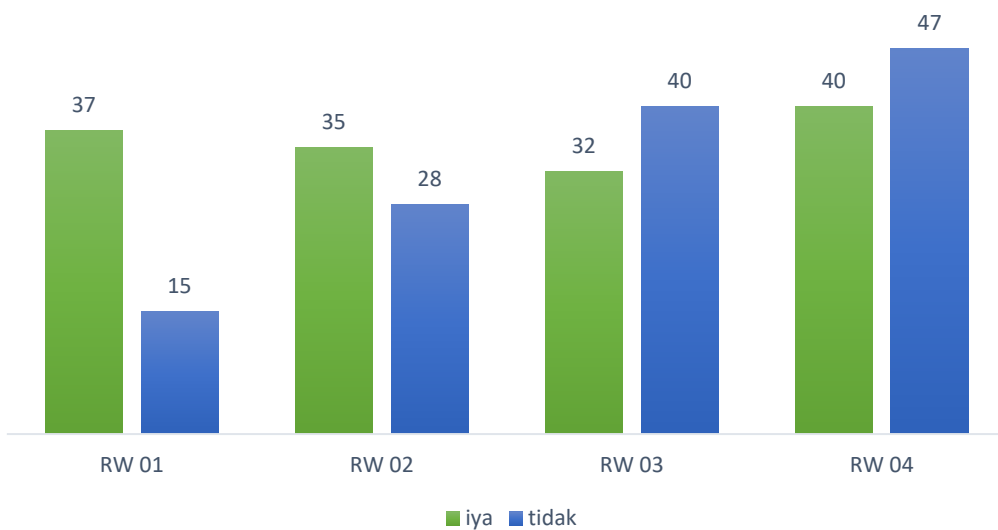
Gambar 49 Jumlah keluarga berdasarkan tempat menabung di Desa Lahabaru



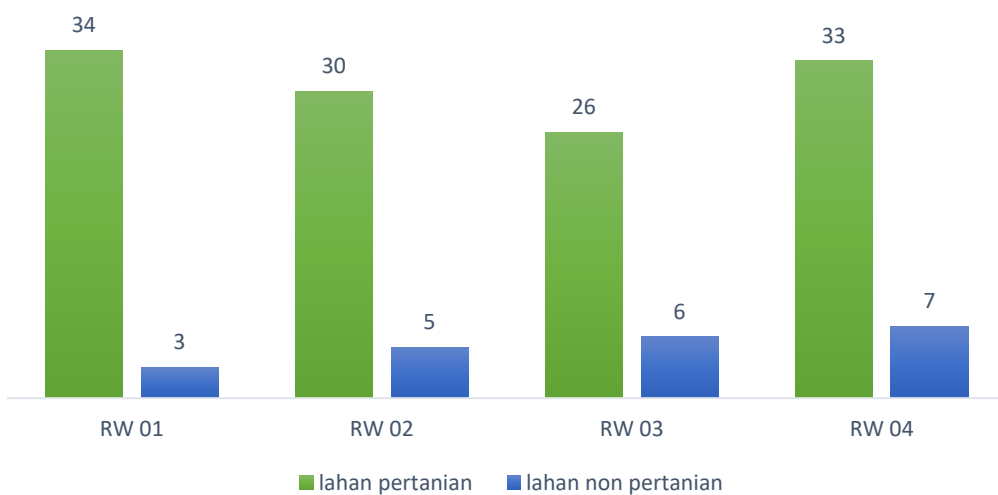
Gambar 50 Jumlah penduduk berdasarkan lokasi usaha di Desa Lahaburu



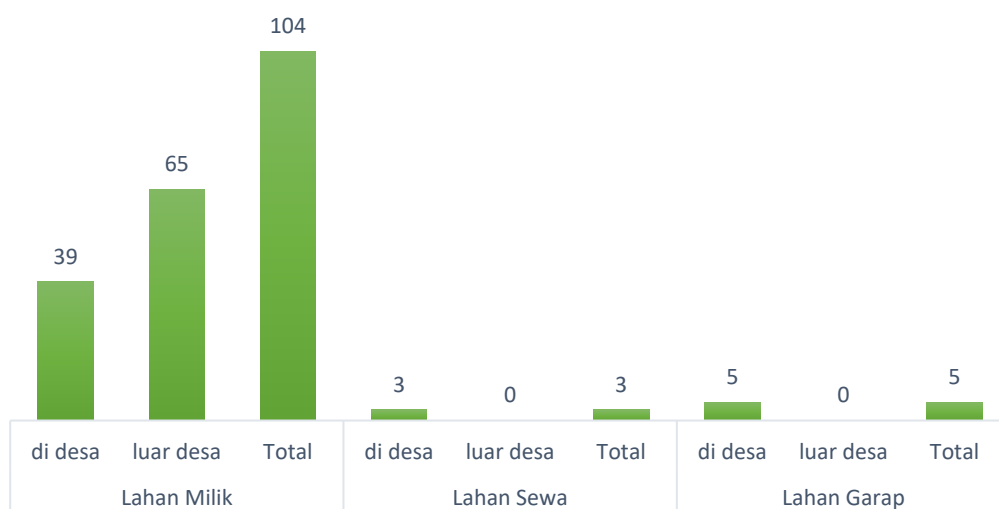
Gambar 50 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sampingan di Desa Lahaburu



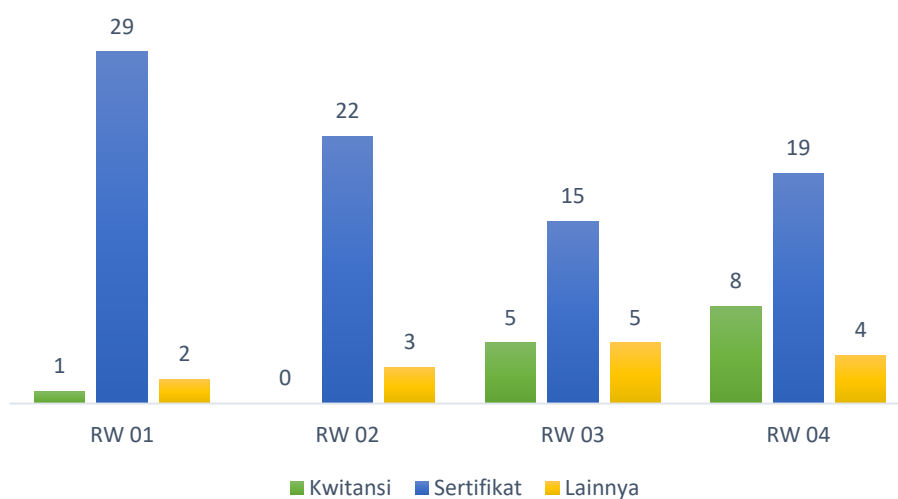
Gambar 51 Jumlah keluarga berdasarkan akses lahan di Desa Lahaburu



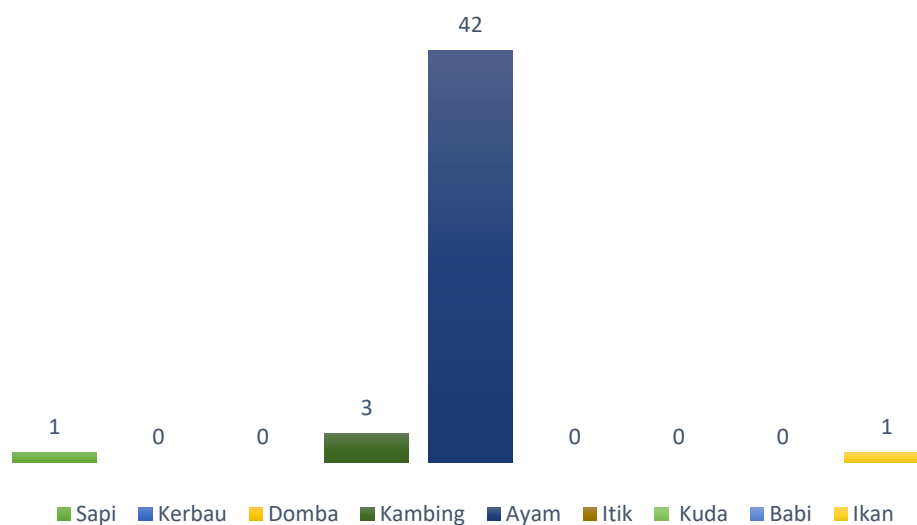
Gambar 52 Jumlah Keluarga berdasarkan Pemanfaatan Lahan yang dimiliki di Desa Lahaburu



Gambar 53 Jumlah keluarga berdasarkan status dan lokasi lahan pertanian di Desa Lahaburu



Gambar 54 Jumlah keluarga berdasarkan Bukti Kepemilikan Lahan Warga di Desa Lahaburu



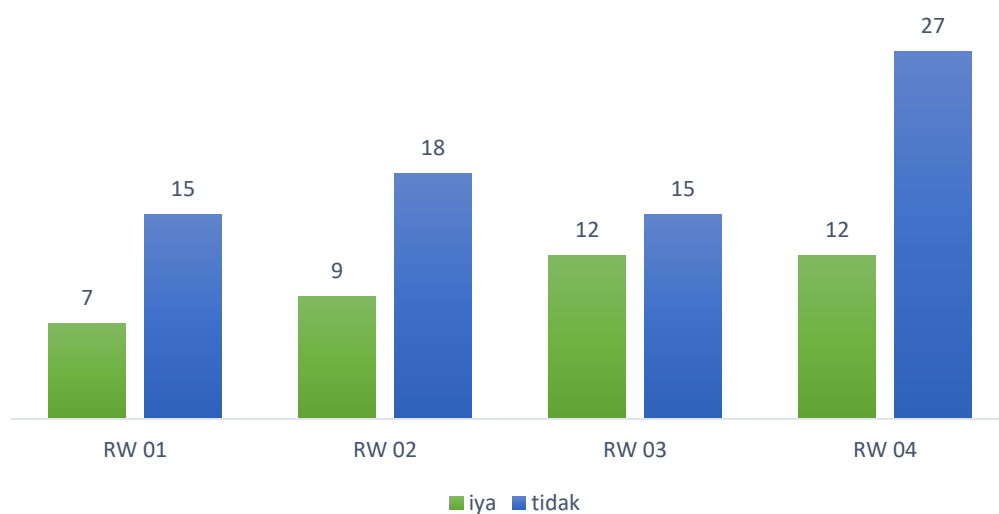
Gambar 55 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Desa Lahaburu

Tabel 21 Jumlah keluarga berdasarkan ternak yang dimiliki di Desa Lahaburu

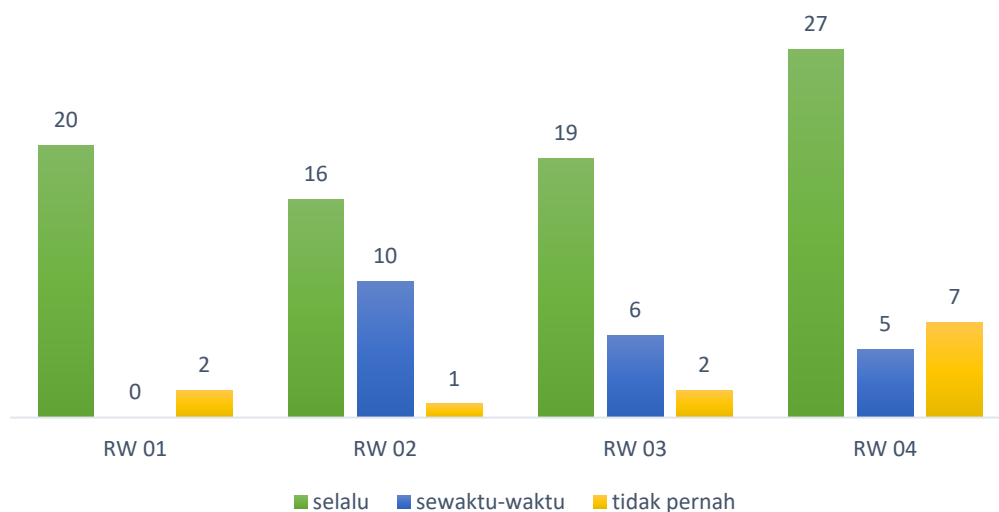
Dusun	Sapi	Kerbau	Domba	Kambing	Ayam	Itik	Kuda	Babi	Ikan
1	0	0	0	3	8	0	0	0	0
2	1	0	0	0	14	0	0	0	0
3	0	0	0	0	12	0	0	0	1
4	0	0	0	0	8	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	3	42	0	0	0	1

Tabel 22 Jumlah ternak yang dimiliki penduduk di Desa Lahaburu

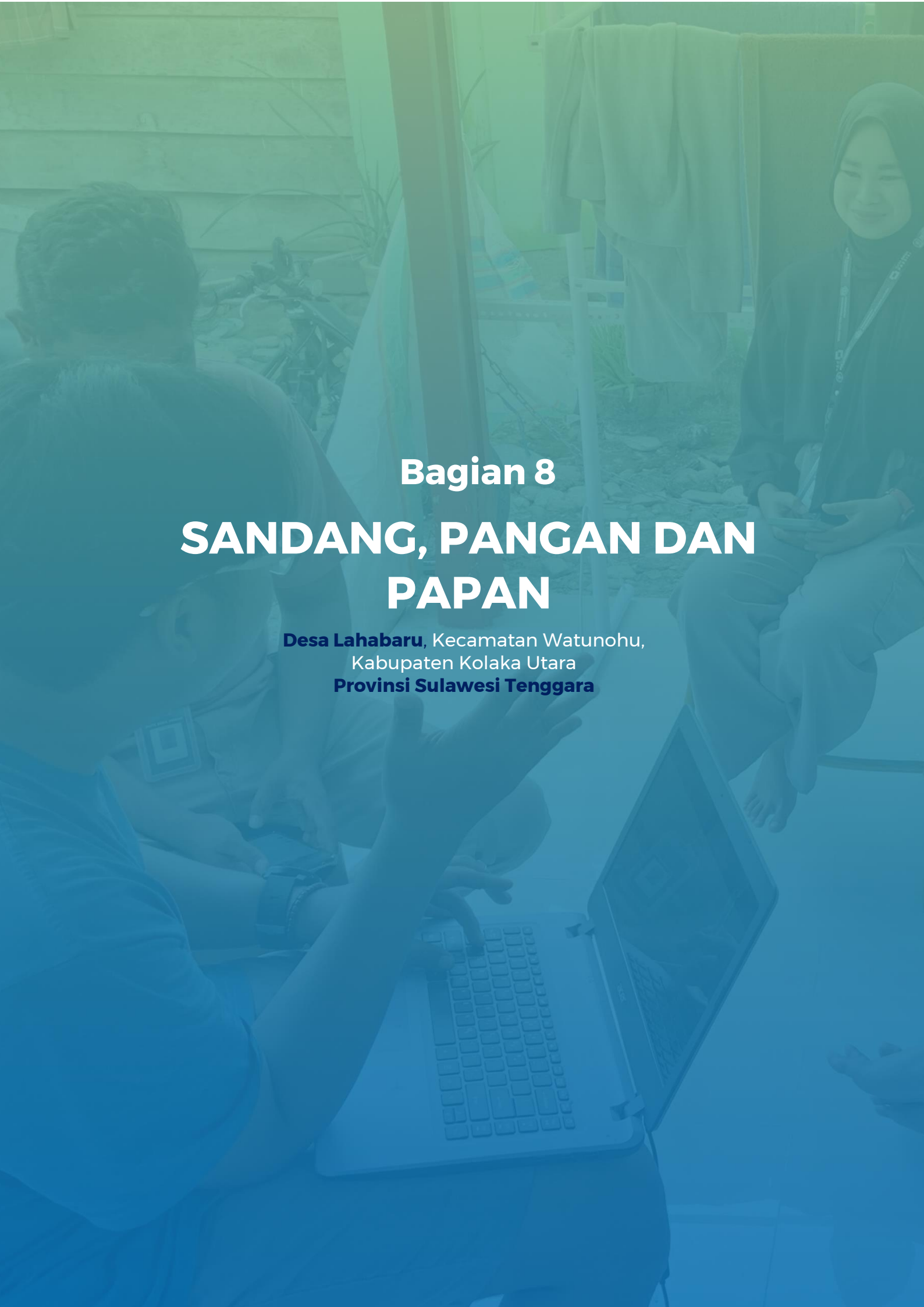
Dusun	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Domba (Ekor)	Kambing (Ekor)	Ayam (Ekor)	Itik (Ekor)	Kuda (Ekor)	Babi (Ekor)	Ikan (kg)
1	0	0	0	21	58	0	0	0	0
2	4	0	0	0	95	0	0	0	0
3	0	0	0	0	74	0	0	0	4
4	0	0	0	0	27	0	0	0	0
TOTAL	4	0	0	21	254	0	0	0	4



Gambar 56 Jumlah balita penerima asi eksklusif di Desa Lahaburu



Gambar 57 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi pemeriksaan kesehatan balita di Desa Lahaburu

A photograph of a group of people in a rural setting, overlaid with a semi-transparent blue filter. In the foreground, a person is sitting on the floor, using a laptop. To their right, another person is sitting on a stool, looking at a smartphone. In the background, a woman wearing a hijab is sitting on the floor, also looking at a smartphone. The setting appears to be a simple outdoor or semi-outdoor structure with wooden walls and laundry hanging on a rack in the background.

Bagian 8

SANDANG, PANGAN DAN PAPAN

**Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu,
Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara**

SANDANG, PANGAN DAN PAPAN

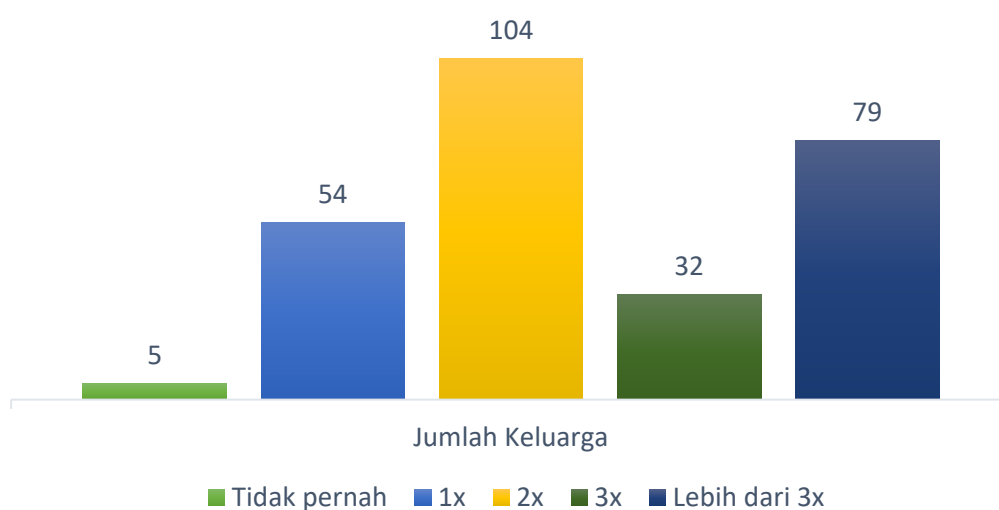
Aspek sandang, pangan, dan papan merupakan indikator penting untuk memberikan gambaran kehidupan keluarga dan turut diperhitungkan dalam pendataan Data Desa Presisi (DDP).

Untuk aspek sandang di Desa Lahaburu terdapat 104 kk yang membeli pakaian 2x dalam setahun, 79 kk membeli pakaian lebih dari 3x dalam setahun, 54 kk yang membeli pakaian hanya 1x dalam setahun dan ada 32 kk yang membeli 3x dalam setahun serta ada 5 kk yang samasekali tidak pernah membeli pakaian dalam setahun terakhir.

Dari segi pangan, mayoritas warga/penduduk Desa Lahaburu menggunakan gas 3 kg sebagai bahan bakar masak dengan jumlah 268 keluarga. Terdapat 2 keluarga yang menggunakan gas >3 kg sebagai bahan bakar masak, dan 4 keluarga yang menggunakan kayu bakar. Mayoritas warga/penduduk Desa Lahaburu makan 3 kali sehari dengan jumlah 247 keluarga. Terdapat 1 keluarga yang makan >3 kali sehari, 26 keluarga makan 2 kali sehari, dan terdapat 1 keluarga yang makan satu kali sehari.

Dalam hal papan, kepemilikan jamban untuk Desa Lahaburu dari keseluruhan keluarga, terdapat 5 keluarga yang belum memiliki jamban sendiri. Penggunaan daya PLN terbanyak Desa Lahaburu adalah 900 VA yang digunakan oleh 145 keluarga, diikuti dengan daya 450 VA sebanyak 58 keluarga, dan daya 1300 VA sebanyak 55 keluarga, 5 keluarga >2200 VA dan 4 keluarga yang menggunakan 2200 VA serta terdapat 7 keluarga yang belum menggunakan PLN.

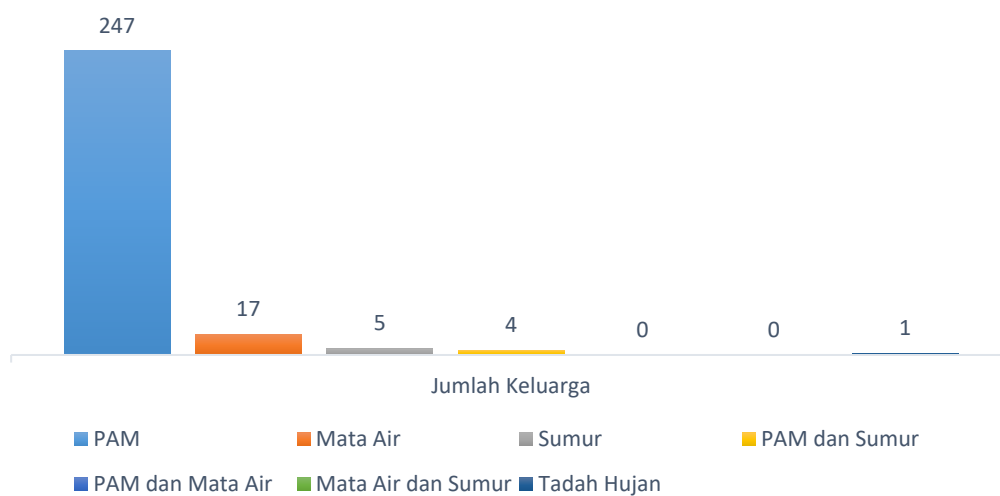
Data terkait aspek sandang, pangan, dan papan di Desa Lahaburu dapat dilihat sebagai berikut.



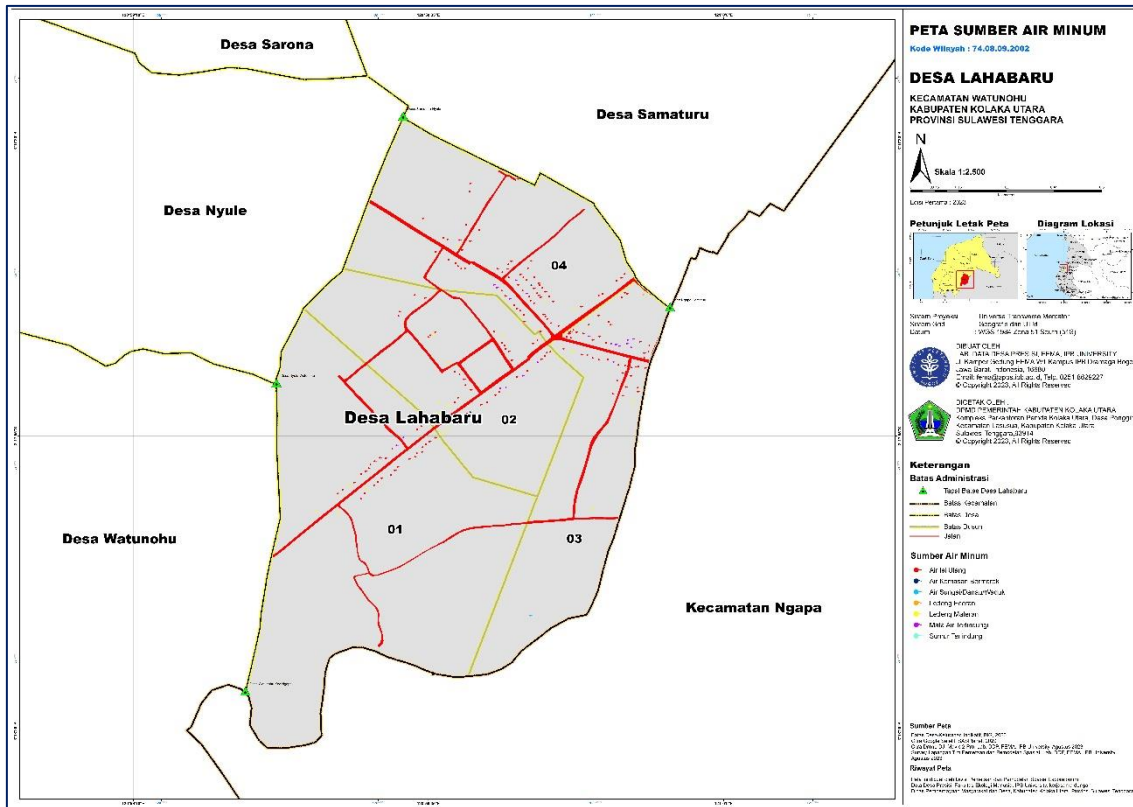
Gambar 58 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi beli pakaian per tahun di Desa Lahaburu

Tabel 23 Jumlah Keluarga Berdasarkan Frekuensi Beli Pakaian Per Tahun di Desa Lahabaru

Dusun	beli baju pertahun				
	Tidak pernah	1x	2x	3x	Lebih dari 3x
1	1	16	17	5	13
2	1	17	16	8	21
3	3	14	32	8	15
4	0	7	39	11	30
TOTAL	5	54	104	32	79

**Gambar 59** Jumlah keluarga berdasarkan sumber air keluarga di Desa Lahabaru**Tabel 24** Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Keluarga di Desa Lahabaru

Dusun	Sumber Air Keluarga						
	PAM	Mata Air	Sumur	PAM dan Sumur	PAM dan Mata Air	Mata Air dan Sumur	Tadah Hujan
1	47	3	0	1	0	0	1
2	61	0	2	0	0	0	0
3	62	6	2	2	0	0	0
4	77	8	1	1	0	0	0
TOTAL	247	17	5	4	0	0	1



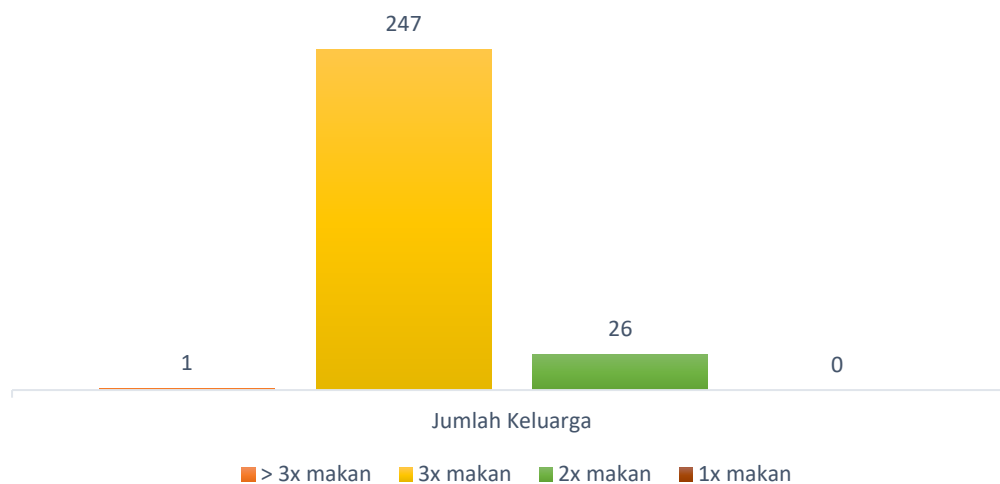
Gambar 60 Peta sebaran kepala keluarga berdasarkan sumber air minum

Tabel 25 Jumlah Keluarga Berdasarkan Sumber Air Minum Keluarga Di Desa Lahabaru

Dusun	Sumber Air Minum										
	Air hujan	Air sungai/dan au/waduk	Mata air tak terlindungi	Mata air terlindungi	Sumur tak terlindungi	Sumur terlindungi	Sumur Bor/Pompa	Ledeng eceran	Ledeng meteran	Air isi ulang	Air kemasan bermerek
1	0	0	0	2	0	1	0	0	6	43	0
2	0	0	0	5	0	0	0	0	18	39	1
3	0	1	0	11	0	0	0	1	5	54	0
4	0	0	0	7	0	1	0	0	3	75	1
TOTAL	0	1	0	25	0	2	0	1	32	211	2

Tabel 26 Jumlah keluarga berdasarkan bahan bakar masak di Desa Lahabaru

Dusun	Bahan Bakar Masak Keluarga								
	tidak memasak di rumah	kayu bakar	arang	briket	minyak tanah	gas kota/biogas	gas 3 kg	gas lebih dari 3 kg	
1	0	1	0	0	0	0	51	0	
2	0	0	0	0	0	0	62	1	
3	0	1	0	0	0	0	71	0	
4	0	2	0	0	0	0	84	1	
TOTAL	0	4	0	0	0	0	268	2	



Gambar 61 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Desa Lahaburu

Tabel 27 Jumlah keluarga berdasarkan frekuensi makan per hari di Desa Lahaburu

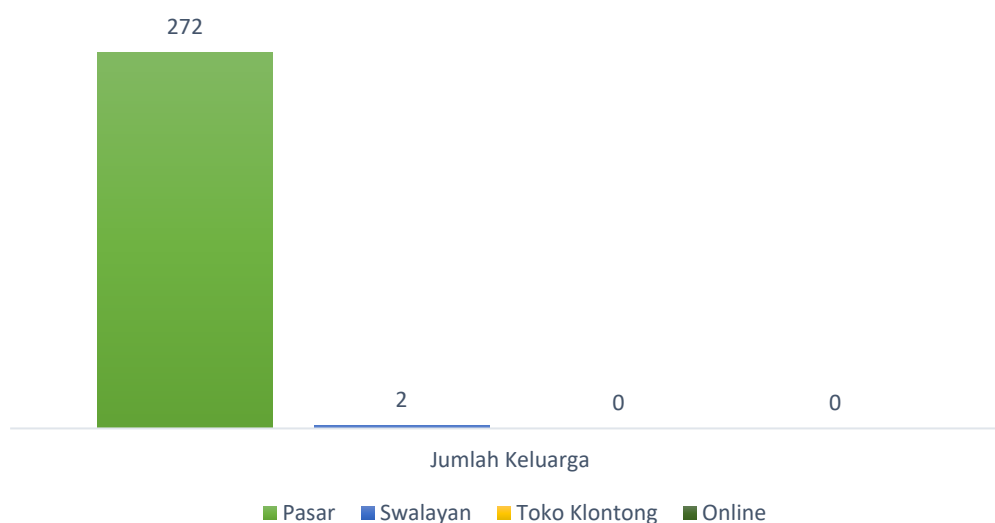
Dusun	Frekuensi Makan (Kali)			
	> 3x makan	3x makan	2x makan	1x makan
1	0	49	3	0
2	1	60	2	0
3	0	62	10	0
4	0	76	11	0
TOTAL	1	247	26	0



Gambar 62 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan Di Desa Lahaburu

Tabel 28 Jumlah keluarga berdasarkan kelengkapan menu makanan di Desa Lahabaru

Dusun	Menu Makan		
	Semi Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap
1	22	23	7
2	28	26	9
3	28	27	17
4	34	38	15
TOTAL	112	114	48

**Gambar 63** Jumlah keluarga berdasarkan tempat belanja kebutuhan pokok Di Desa Lahabaru**Tabel 29** Jumlah keluarga berdasarkan tempat belanja kebutuhan pokok di Desa Lahabaru

Dusun	lokasi belanja kebutuhan pokok			
	Pasar	Swalayan	Toko Klontong	Online
1	51	1	0	0
2	63	0	0	0
3	72	0	0	0
4	86	1	0	0
TOTAL	272	2	0	0

Tabel 30 konsumsi karbohidrat per bulan di Desa Lahabaru

Dusun	Beras (liter)	Biskuit (gram)	Jagung (kg)	Kentang (kg)	Mie (bks)	Roti Tawar (bks)	Singkong (kg)	Sukun (kg)	beras ketan (kg)
1	1746	25338	65	8	1010	34	72	5	19
2	1766	34021	41	14	1575	50	38	16	11
3	2054	35110	58	30	1551	87	34	4	64
4	2519	37956	53	27	1862	46	20	3	28
TOTAL	8085	132425	217	79	5998	217	164	28	122

Tabel 31 Jumlah konsumsi lauk hewani per bulan di Desa Lahabaru

Dusun	Daging Sapi (kg)	Daging Ayam (kg)	Daging Babi (kg)	Ikan Segar (kg)	Ikan Kering Asin (kg)	Telur Ayam (kg)
1	21	91	0	632	78	135
2	30	91	0	836	109	138
3	30	140	0	722	74	188
4	24	142	0	742	85	231
TOTAL	105	464	0	2932	346	692

Tabel 32 Jumlah konsumsi lauk nabati per bulan di Desa Lahabaru

Dusun	Kacang Hijau (kg)	Kacang Kedelai (kg)	Kacang Merah (kg)	Kacang Mete (kg)	Tahu (bks)	Tempe (bks)
1	17	0	0	0	111	170
2	14	2	2	2	191	305
3	7	1	6	1	254	307
4	11	2	3	0	285	384
TOTAL	49	5	11	3	841	1166

Tabel 33 Jumlah konsumsi sayuran per bulan di Desa Lahabaru

Dusun	Bayam (ikat)	Kangkung (ikat)	Sawi (ikat)	Terong (kg)	Oyong (kg)	Daun Singkong (ikat)	Daun Ubi (ikat)
1	121	113	16	67	20	21	19
2	135	112	31	111	45	5	24
3	151	139	60	90	68	15	24
4	155	170	47	126	92	21	25
TOTAL	562	534	154	394	225	62	92

Tabel 34 Jumlah konsumsi buah-buahan per bulan di Desa Lahabaru

Dusun	Jeruk (kg)	Mangga (kg)	Pepaya (kg)	Pisang (kg)	Alpukat (kg)	Semangka (kg)	Melon (kg)
1	92	32	35	161	15	13	0
2	115	58	47	190	24	39	3
3	86	53	84	234	15	38	3
4	126	53	76	235	11	37	0
TOTAL	419	196	242	820	65	127	6

Tabel 35 Jumlah konsumsi bumbu per bulan di Desa Lahabaru

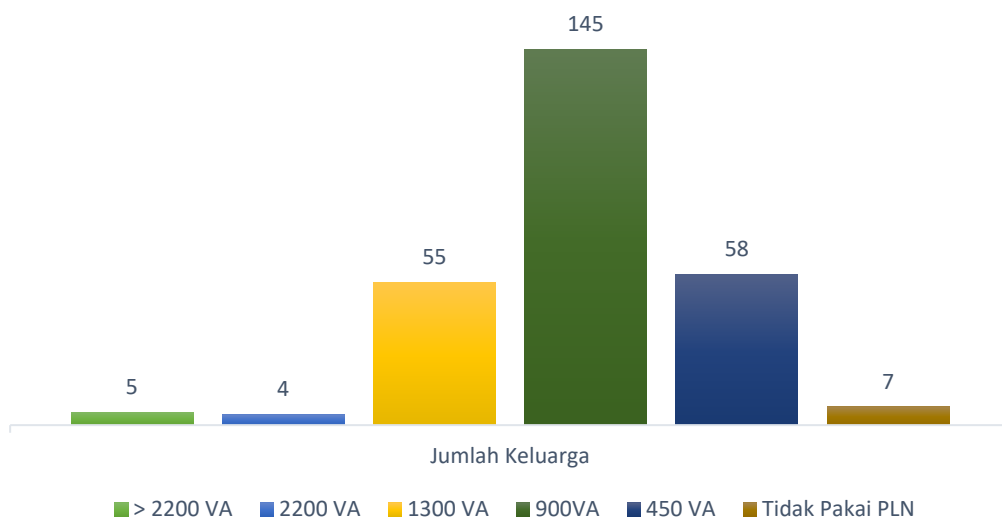
Dusun	Cabai (kg)	Bawang Merah (kg)	Bawang Putih (kg)
1	118	150	158
2	134	147	204
3	139	122	209
4	180	168	288
TOTAL	571	587	859

Tabel 36 Jumlah konsumsi bahan masak per bulan di Desa Lahabaru

Dusun	Minyak Goreng (liter)	Gas (kg)	Garam (gram)	Gula (kg)
1	173	328	24250	103
2	214	387	28850	123
3	238	469	34900	134
4	302	662	37750	178
TOTAL	927	1846	125750	538

Tabel 37 Jumlah konsumsi bahan pelengkap per bulan di Desa Lahabaru

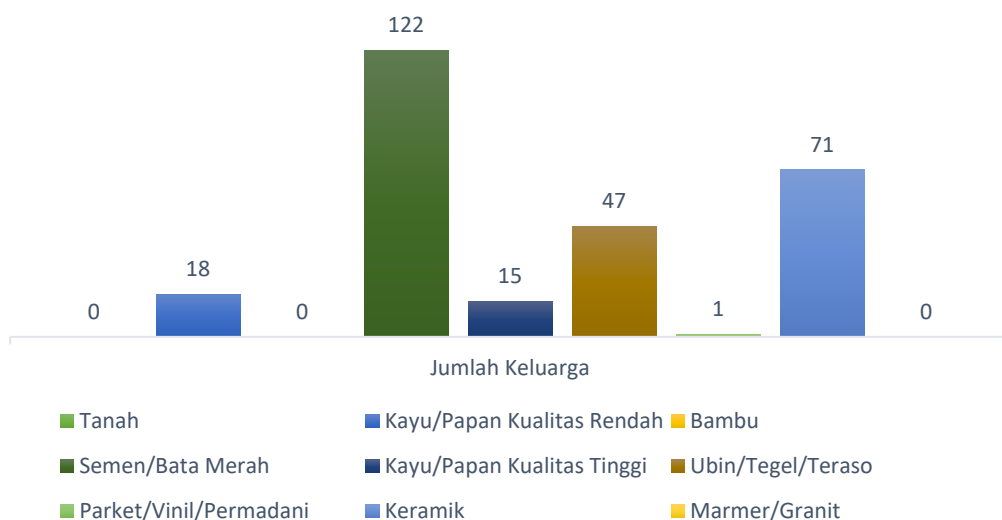
Dusun	Susu (gelas)	Teh (gelas)	Kopi (gelas)	Rokok (bks)
1	418	850	1063	524
2	601	978	1159	830
3	456	1516	1254	1025
4	827	1764	1785	1302
TOTAL	2302	5108	5261	3681



Gambar 64 Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Desa Lahaburu

Tabel 38 Jumlah keluarga berdasarkan penggunaan daya listrik (PLN) di Desa Lahaburu

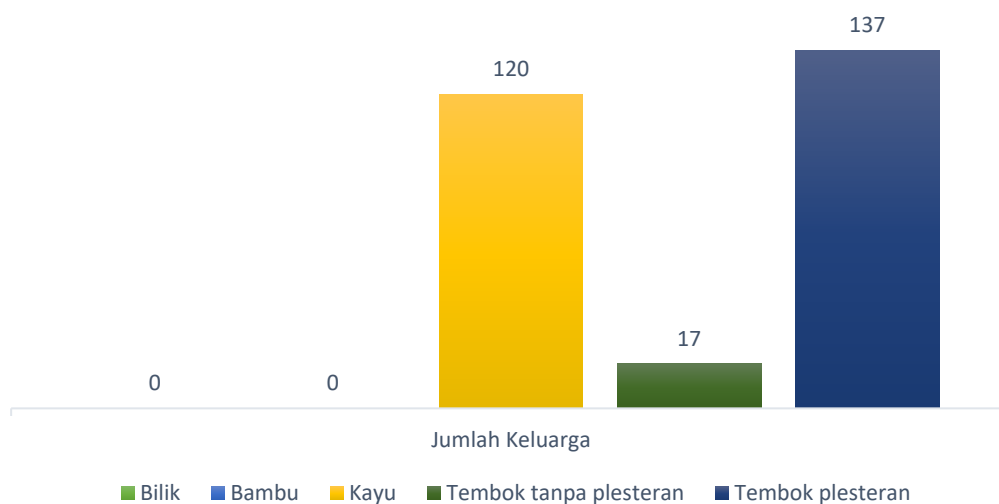
Dusun	Daya Listrik					
	> 2200 VA	2200 VA	1300 VA	900VA	450 VA	Tidak Pakai PLN
1	1	0	14	29	6	2
2	1	3	12	28	19	0
3	1	1	13	37	16	4
4	2	0	16	51	17	1
TOTAL	5	4	55	145	58	7



Gambar 65 Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Desa Lahaburu

Tabel 39 Jumlah keluarga berdasarkan jenis lantai rumah yang ditinggali di Desa Lahabaru

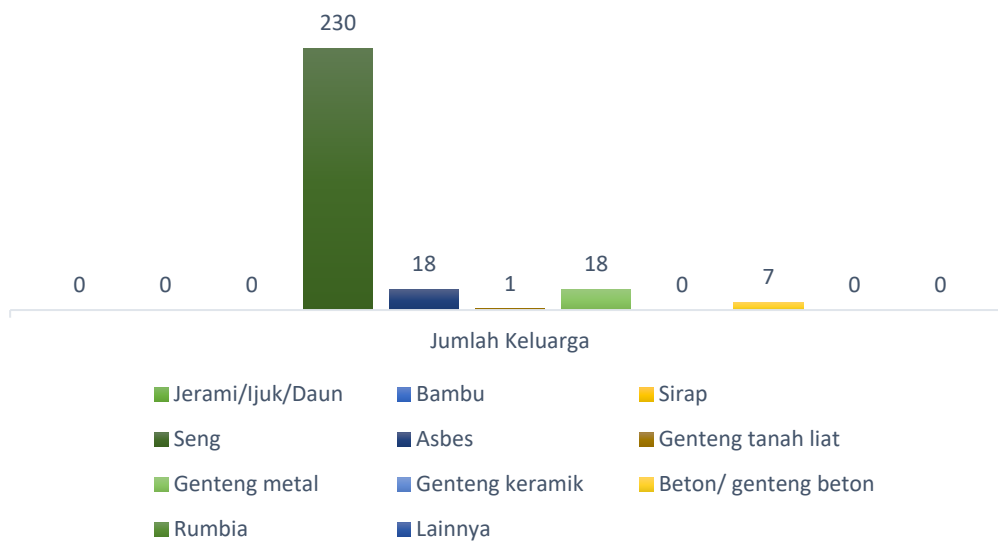
Dusun	Jenis Lantai Rumah									
	Tanah	Kayu/ Papan Kualitas Rendah	Bambu	Semen/ Bata Merah	Kayu/ Papan Kualitas Tinggi	Ubin/ Tegel/ Teraso	Parquet/ Vinil/Per madani	Keramik	Marmer/ Granit	
1	0	3	0	17	1	13	0	18	0	
2	0	1	0	27	6	12	0	17	0	
3	0	4	0	31	2	8	1	26	0	
4	0	10	0	47	6	14	0	10	0	
TOTAL	0	18	0	122	15	47	1	71	0	



Gambar 66 Jumlah Keluarga Berdasarkan Jenis Dinding Rumah Yang Ditinggali Di Desa Lahabaru

Tabel 40 Jumlah keluarga berdasarkan jenis dinding rumah yang ditinggali di Desa Lahabaru

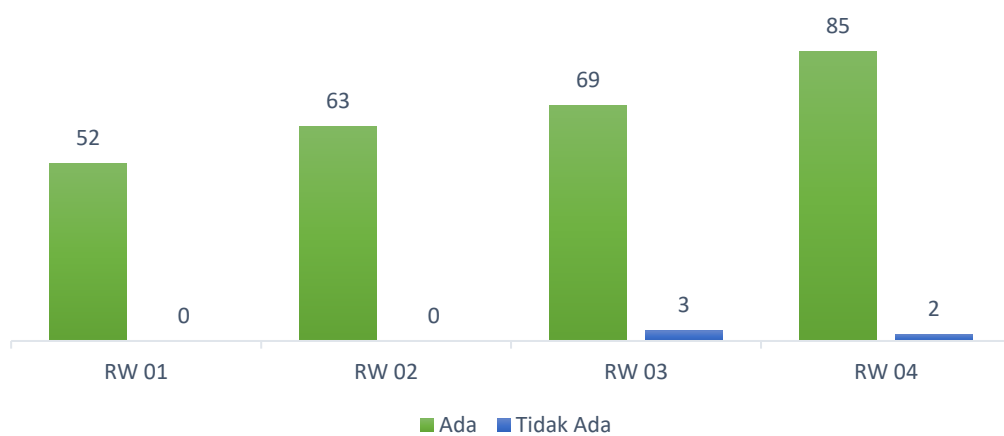
Dusun	Jenis Dinding Rumah				
	Bilik	Bambu	Kayu	Tembok tanpa plesteran	Tembok plesteran
1	0	0	18	2	32
2	0	0	27	3	33
3	0	0	24	5	43
4	0	0	51	7	29
TOTAL	0	0	120	17	137



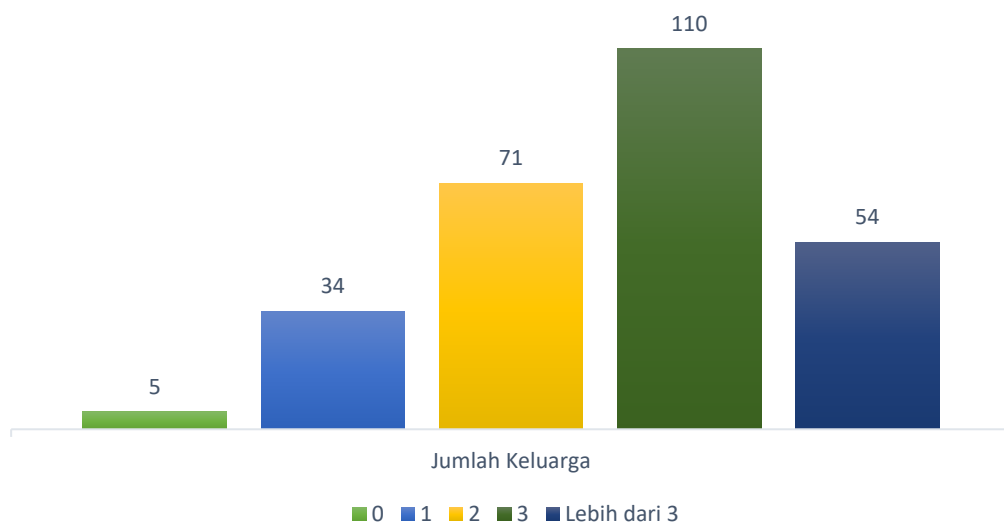
Gambar 67 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Desa Lahabaru

Tabel 41 Jumlah keluarga berdasarkan jenis atap rumah yang ditinggali di Desa Lahabaru

Dusun	Jenis Atap Rumah										
	Jerami/Ijuk/Daun	Bambu	Sirap	Seng	Asbes	Genteng tanah liat	Genteng metal	Genteng keramik	Beton/genteng beton	Rumbia	Lainnya
1	0	0	0	38	6	0	5	0	3	0	0
2	0	0	0	45	5	0	13	0	0	0	0
3	0	0	0	66	3	0	0	0	3	0	0
4	0	0	0	81	4	1	0	0	1	0	0
TOTAL	0	0	0	230	18	1	18	0	7	0	0



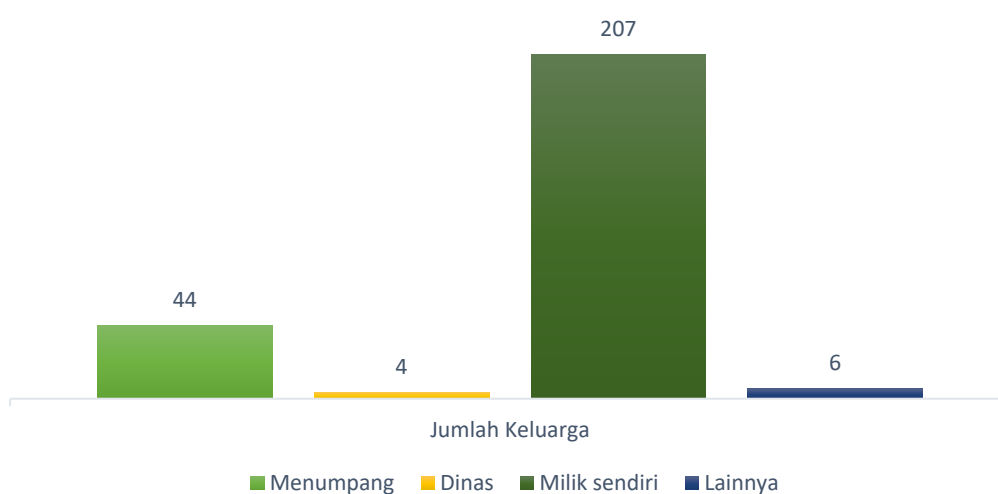
Gambar 68 Jumlah keluarga berdasarkan kepemilikan jamban di dalam rumah di Desa Lahabaru



Gambar 69 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Desa Lahabaru

Tabel 42 Jumlah keluarga berdasarkan jumlah kamar tidur di rumah di Desa Lahabaru

Dusun	Jumlah Kamar Tidur di Rumah				
	0	1	2	3	Lebih dari 3
1	1	5	6	24	16
2	0	8	14	27	14
3	3	5	23	30	11
4	1	16	28	29	13
TOTAL	5	34	71	110	54

**Gambar 70** Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Desa Lahabaru**Tabel 43** Jumlah keluarga berdasarkan status kepemilikan rumah yang ditinggali di Desa Lahabaru

Dusun	Status Kepemilikan Rumah yang Ditinggali				
	Menumpang	Kontrak/sewa	Dinas	Milik sendiri	Lainnya
1	10	0	0	40	2
2	9	1	4	49	0
3	16	10	0	46	0
4	9	2	0	72	4
TOTAL	44	13	4	207	6



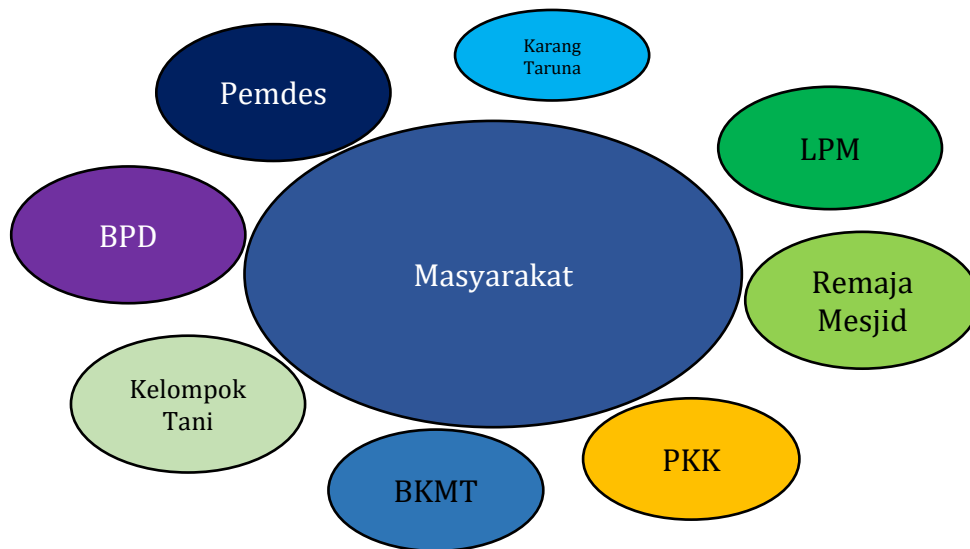
Bagian 9 **DATA SOSIAL**

**Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu,
Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara**

DATA SOSIAL

9.1 Kelembagaan Desa (Diagram Venn)

Diagram venn bertujuan untuk menunjukkan pengaruh dan kedekatan sebuah Lembaga terhadap masyarakat. Semakin besar sebuah lingkaran maka semakin besar pengaruhnya terhadap masyarakat, begitupun sebaliknya semakin kecil suatu lingkaran maka semakin kecil pula pengaruhnya terhadap masyarakat. Selain pengaruh, diagram venn juga bertujuan untuk melihat bagaimana kedekatan suatu Lembaga terhadap masyarakat, semakin dekat hubungannya maka akan semakin dekat lingkarannya, begitupun sebaliknya semakin jauh hubungan kedekatannya maka akan semakin jauh lingkaran tersebut. Namun dalam diagram venn tidak selamanya Lembaga yang memiliki pengaruh yang lebih besar memiliki kedekatan terhadap masyarakat begitupun sebaliknya, tidak selamanya yang memiliki kedekatan yang sangat dekat memiliki pengaruh yang signifikan. Perhatikan gambar 1 dibawah untuk melihat bagaimana diagram venn Desa Lahabaru



Gambar 71 Diagram Venn Kelembagaan Desa Lahabaru

Pada gambar diagram venn, dapat dilihat bahwa Pemdes, Kelompok Tani, Remaja Masjid, dan BPD memiliki kedekatan serta pengaruh yang sama. Hal ini terjadi karena dalam kelembagaan tersebut saat membuat keputusan dan juga berbagai kegiatan, mengutamakan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah desa dalam merumuskan program kerja, mengundang berbagai elemen masyarakat yang ada di desa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hal apa yang benar-benar dibutuhkan oleh desa dalam hal Pembangunan dan juga untuk menghindari berbagai kesalahan yang dianggap tidak perlu. Selain itu dalam hal pelaksanaan partisipasi masyarakat juga

sangat diutamakan baik terjun langsung kelapangan ataupun ikut serta melakukan pengawasan.

Gambar 1 juga menunjukkan bahwa untuk BKMT, PKK dan LPM memiliki pengaruh yang sama besarnya, namun dalam hal kedekatan diantara ketiganya, BKMT adalah yang paling dekat dengan masyarakat hal ini disebabkan karena setiap ada kegiatan keagamaan BKMT yang berada digarda terdepan. Selain itu BKMT juga memiliki kegiatan pengajian rutin tiap minggu, yang dilaksanakan dimesji. Meski demikian PKK dan LPM bukan berarti tidak memiliki kedekatan dan pengaruh terhadap masyarakat namun jika dibandingkan dengan BKMT, maka BKMT memiliki kedekatan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Sedangkan jika dibanding dengan yang lainnya, karang taruna adalah yang paling kecil pengaruhnya dan juga kedekatannya terhadap masyarakat. Namun ini tidak menunjukkan tidak ada atau kecilnya kedekatan antara karang taruna dengan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya keikutsertaan karang taruna dalam berbagai agenda dan juga belum maksimalnya partisipasi karang taruna dalam Pembangunan desa.

9.2 Pohon Masalah

Pohon masalah sebagai sebuah indikator yang menarik untuk dibahas dan diangkat, mengapa tidak, dengan adanya pohon masalah kita dapat mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh desa dan lebih jauh lagi kita dapat mengetahui permasalahan utama serta mengurai persoalan tersebut sampai ke akar-akar. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tentu berbeda antara yang satu dengan yang lain.

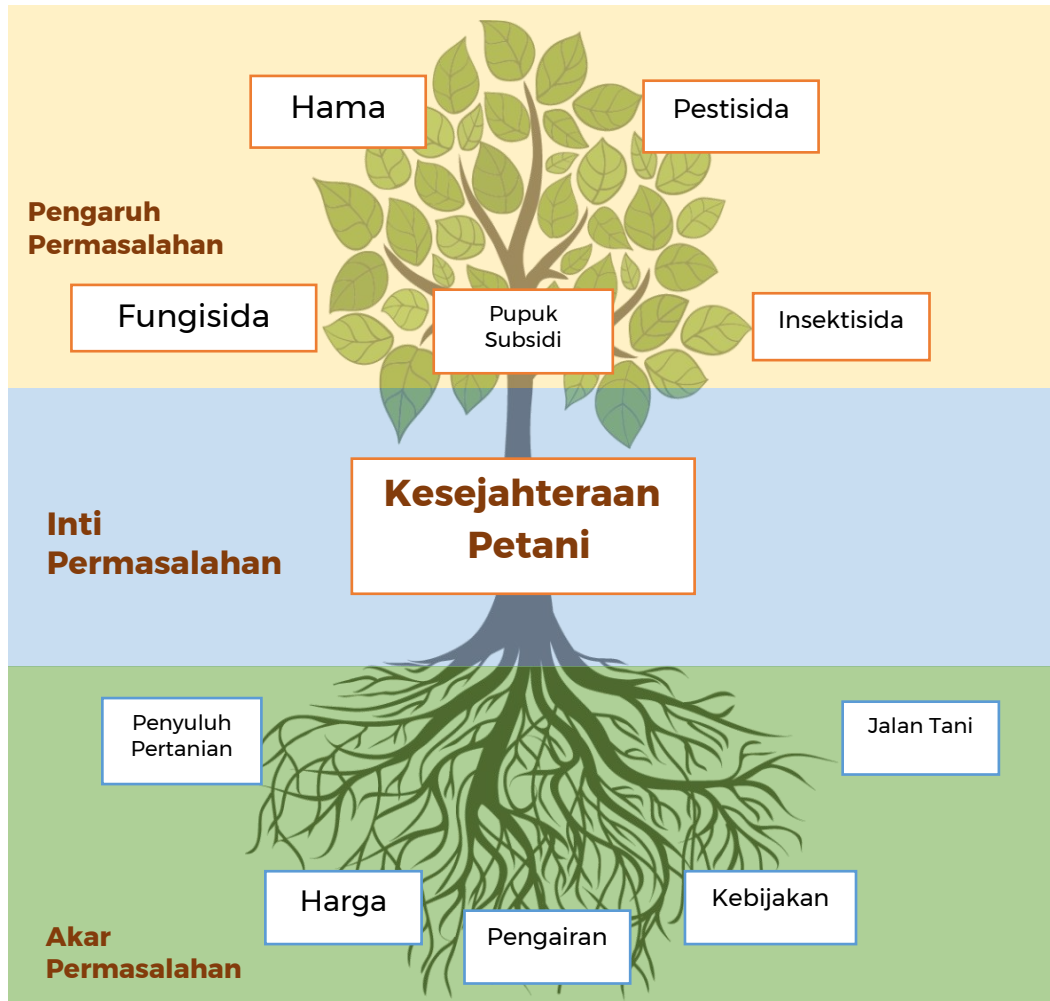
Desa Lahabaru memiliki banyak masalah baik yang telah maupun yang sementara terjadi, bahkan ada masalah yang dianggap sebagai masalah pokok yang sangat berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Adapun masalah masalah yang dihadapi oleh desa yaitu Kesejahteraan petani, jalan tani, air bersih, lokasi penguburan, pupuk subsidi, herbisida, insektisida, fungisida, kebijakan belum tepat sasaran, hama, penyuluh, irigasi, kebersihan saluran, harga yang tidak stabil.

Dari berbagai masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat satu masalah yang dianggap sebagai permasalahan pokok dalam kehidupan masyarakat Desa Lahabaru. Permasalahan tersebut adalah kesejahteraan petani. Permasalahan ini tentu sangat erat kaitannya dengan permasalahan lainnya. Salah satu hal yang sangat berkaitan dengan kesejahteraan petani adalah persoalan kebijakan. Mulai dari kebijakan yang belum tepat sasaran dan juga kurangnya kebijakan yang berpihak kepada petani. Termasuk dalam hal ini kebijakan subsidi pupuk yang dianggap masih merugikan petani karena adanya pembatasan dari segi jumlah yang dapat diambil dan harus menjadi

anggota kelompok tani. Disisi lain dengan adanya pembatasan tersebut pemerintah juga menyediakan pupuk non subsidi namun dengan harga yang relative tinggi. Hal inilah yang membuat masyarakat banyak berfikir seolah olah mereka sengaja diarahkan untuk membeli yang nonsubsidi.

Pemasalahan infrastruktur juga sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan petani bagaimana tidak, dengan terbukanya infrastruktur berupa jalan tani akan memudahkan masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian mereka. Selain itu masalah yang juga banyak dikeluhkan dalam masyarakat adalah masalah harga yang tidak pernah bisa stabil, terkadang Ketika petani menanam harga sangat tinggi namun saat panen raya harga merosot diangka yang sangat tidak masuk akal.

Permasalah lainnya yang tidak kalah penting adalah permasalahan hama yang dalam pengendaliannya membutuhkan penggunaan insektisida, fungisida dan herbisida. Dimana komoditas ini memiliki harga yang relative tinggi. Selain masalah pengendalian hama, masalah pengairan juga mengambil andil penting untuk kesejahteraan petani. Dimana keberadaan irigasi akan memudahkan baik saat musim hujan maupun musim kemarau. Ketika musim hujan air akan dengan mudah dialirkan dari lahan pertanian, begitupun sebaliknya saat musim kemarau tiba air akan dengan mudah dimasukkan ke lahan pertanian. Disisi lain masih kurangnya perhatian dari penyuluh pertanian juga dihadapi oleh masyarakat. Penyuluh dianggap penting karena mereka memiliki kuasa terhadap pengetahuan mengenai komoditas tertentu yang dapat membantu meningkatkan kuantitas maupun kualitas penen masyarakat.



Gambar 72 Pohon Masalah Desa Lahaburu

9.3 Kalender Musim

Masyarakat Desa Lahaburu dalam kehidupannya tidak membudidayakan berbagai macam tanaman baik yang semusim maupun yang tahunan. Tanaman yang dibudidayakan yaitu coklat, kelapa, cengkeh, pala, nilam, jagung, lombok/cabe. Selain tanaman yang disebutkan diatas ada juga berbagai macam jenis tanaman hortikulture yang ditanam namun tidak dengan skala besar. Yang selanjutnya akan dijabarkan adalah tanaman dominan yang dibudidayakan oleh masyarakat Desa Lahaburu.

Tanaman coklat adalah jenis tanaman berbatang keras yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Coklat merupakan tanaman primadona pada tahun 1990-2005. Coklat adalah tanaman yang bisa dipanen setiap dua minggu sekali. Namun ada waktu tertentu buah coklat mencapai puncak panen. Waktu tersebut berbeda dari setiap kebun petani. Tanaman coklat juga merupakan

tanaman dengan umur yang relative panjang tergantung dengan perawatan. Untuk usia dari tanam sampai panen sekitar tiga sampai empat tahun.

Tanaman kelapa juga salah satu tanaman primadona yang ada di Lahabaru. Banyak orang yang menggantungkan kehidupannya dengan tanaman kelapa. Tanaman kelapa dipanen oleh masyarakat tiaptiga bulan sekali. Sedangkan untuk musim tanam tidak mengenal waktu, untuk waktu tanam bisa kapan saja, dengan usia tanam sampai panen sekitar lima tahun. Pohon kelapa juga memiliki usia yang panjang jika dirawat dengan baik.

Cengkeh dan pala adalah komoditi andalan yang dimiliki oleh masyarakat. Tanaman ini adalah dua komoditi andalan Indonesia untuk kebutuhan ekspor. Untuk tanaman cengkeh dan pala dalam hal penanaman tidak memiliki waktu tertentu, dapat ditanam kapan saja dengan melihat curah hujan. Adapaun untuk system panen biasanya untuk cengkeh sekali setahun pada penghujung tahun. Untuk pala dapat dipanen tiap bulan. Kedua tanaman ini juga merupakan jenis tanaman kehutanan yang memiliki usia yang panjang jika dirawat dengan baik.

Nilam dan jagung merupakan tanaman semusim. Kedua tanaman ini dapat ditanam kapan saja tentu dengan memperhatikan curah hujan. Untuk masa panen bisa dilakukan sekitar lima bulan setelah penanaman. Dari segi perawatan, tanaman nilam membutuhkan usaha yang lebih ekstra jika dibandingkan dengan jagung, namun dari segi hasil biasanya nilam lebih diatas, mengingat harga puncak untuk minyak atsiri nilam dapat mencapai Rp700.000/kg sedangkan jagung paling mahal diangka Rp5.000/kg.

Selanjutnya adalah tanaman yang belakangan menjadi primadona adalah cabe. Usia tanam cabe sampai dengan panen sekitar tiga sampai empat bulan, namun setelah panen pertama, tidak membutuhkan waktu lama untuk panen lagi. Untuk tanaman cabe panen dilakukan setiap 7 hari. Namun tanaman ini membutuhkan perawatan ekstra jika ditanam di dataran rendah, berbeda jika ditanam di dataran tinggi.

Dalam hal pengeluaran, masyarakat Desa lahabaru memberikan post untuk bidang Pendidikan. Terutama Ketika semester baru dan akan mengalami pembengkakan pada saat setelah kenaikan kelas. Selain Pendidikan, masyarakat juga banyak mengeluarkan biaya saat bula bulan tertentu saat ada peringatan keagamaan seperti: idul fitri dan adha serta maulid dan isra miraj. Hari hasional juga biasanya mendapatkan perhatian seperti saat perayaan 17 agustus yang biasanya berlangsung sampai sebulan. Perhatikan tabel pada halaman berikutnya

Tabel 44 Kalender Musim Pertanian Desa Lahabaru

Aspek	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Keterangan
Komoditas													
Coklat	T			P	P	P							2x sebulan panen
Kelapa	T			P				P					4x setahun panen
Cengkeh	T									P	P		1x panen setahun
Pala	T			P		P		P					1x panen sebulan
Nilam	T				P					P			2x panen setahun
Jagung	T			P									3x panen setahun
Lombok/Cabe	T			P			P						1x Seminggu panen
Pengeluaran													
Pendidikan						Rp	Rp						2x setahun
Keagamaan			Rp	Rp	Rp		Rp						4x setahun
Hari Nasional								Rp					1x setahun

9.4 Stratifikasi Sosial

Stratifikasi Sosial bertujuan untuk melihat lapisan atau tingkatan yang ada didalam masyarakat. Selain itu, yang menjadi perhatian penting dalam hal ini adalah untuk melihat mobilitas sosial masyarakat. Bagaimana masyarakat mampu mengalami peningkatan status ekonomi (climbing) atau mengalami proses Penurunan ekonomi (sinking) dalam dalam proses kehidupan dari satu lapisan kelapisan yang lainnya. Perhatikan tabel dibawah ini.

Tabel 45 Stratifikasi Sosial Masyarakat Desa Lahabaru

Lapisan	Pekerjaan	Aset	Relasi Ekonomi	Kehidupan
Atas	Pengusaha Anggota DPR Kontraktor	Rumah mewah Memiliki Mobil Mewah Memiliki Gedung walet Tanah > 5 ha Emas > 50 gram	Hasil usaha dijual di kota Akses Bank	Mewah
Menengah	Petani PNS I-IV Kepala Desa Aparat Desa Pemilik Kios	Tanah 1-4 ha Memiliki Motor Mobil Satu Memiliki Rumah Emas 20-49 gram	Akses Bank Hasil usaha dijual di tengkulak desa	Berkecukupan
Bawah	Buruh Bangunan Buruh Tani Buruh harian lepas	Rumah sewa Rumah seadanya Menumpang Emas < 5 gram	Rentenir Pengepul kecil	Seadanya

Berdasarkan Tabel 45 di atas masyarakat golongan atas mereka adalah para pengusaha, anggota DPR dan juga kontraktor. Kcenderungan asset yang mereka miliki diantaranya mobil yang mewah, Gedung walet, emas yang banyak (50 gram keatas) serta memiliki luasan lahan yang sangat luas. Dalam menjalankan usahanya selain ditopang oleh modal yang banyak, mereka juga memiliki akses di bank dan dalam proses usahanya umumnya memiliki relasi diluar daerah. Tentu dengan berbagai hal yang dimiliki, kehidupan sehari-hari yang mereka jalani dan rasakan tidak lepas dari kata mewah dan menyenangkan karena disokong dengan sumberdaya yang melimpah.

Golongan selanjutnya adalah golongan menengah, mereka yang ada pada golongan ini adalah petani, PNS golongan I-IV, Kepala desa, Aparat desa dan juga yang memiliki kios. Biasanya orang-orang digolongan menengah ini memiliki asset berupa tanah satu sampai empat hektar, memiliki motor dan mobil seadanya, rumah serta emas. Biasanya mereka dalam menjual hasil usaha kepada tengkulak yang ada di desa dan juga mereka memiliki akses terhadap bank. Meski kehidupan berjalan dengan baik, tentu tidak semewah dan tidak senyaman golongan atas, namun dalam pemenuhan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan baik. Masyarakat yang berada pada golongan bawah, biasanya mereka yang memiliki status pekerjaan seperti: buruh harian lepas, buruh bangunan, dan buruh tani dengan tempat tinggal yang biasanya masih sewa, menumpang dan ada yang memiliki rumah seadanya. Biasanya masyarakat ini Ketika membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhan hidup sehari hari, meminjam uang kepada tetangga dan juga rentenir dan dalam menjual hasil usaha mereka biasanya kepada pengepul-pengepul kecil.

Tabel 46 Mobilitas Sosial Masyarakat Desa Lahabaru

Lapisan	Climbing	Sinking
Atas	Akses Bank Akses bahan baku. Akses pasar Akses pengetahuan dan sumberdaya yang mempunyai. Modal Banyak	Usaha jatuh bangkrut Hilangnya pangkat dan jabatan
Menengah	Harta warisan Akses Bank Akses bahan baku. Akses pasar Akses pengetahuan dan sumberdaya	Penurunan ekonomi dapat terjadi apabila kehilangan pangkat atau jabatan atau bahkan pemutusan hubungan kerja Usaha jatuh bangkrut
Bawah	Rajin menabung dan bekerja menjadi kunci bagi mereka yang berada di golongan bawah untuk	Tidak adanya akses terhadap sumber daya dan juga tingkat pengetahuan dan

Lapisan	Climbing	Sinking
	mengalami peningkatan status dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Biasanya setelah ada modal, mereka akan membuat usaha kecil-kecilan dan menabung lagi dan tabungan tersebut akan digunakan untuk membuat usaha baru.	pemahaman yang masih kurang serta tidak ada akses di bank.

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa di Desa Lahabaru terjadi yang disebut dengan perubahan status (mobilitas sosial), baik itu naik (climbing) ataupun turun (sinking). Hasil FGD menunjukkan bahwa perubahan status yang terjadi di Lahabaru terjadi secara bertahap dari satu tingkatan ketinggian yang lainnya begitupun saat terjadi penurunan status dalam masyarakat. Baik lapisan atas, lapisan menengah dan bawah. Kecenderungan orang-orang yang telah menempati lapisan atas akan sulit mengalami sosial sinking hal ini disebabkan oleh akses permodalan yang mereka miliki. Termasuk didalamnya akses terhadap sumberdaya alam dan manusia. Namun bukan hal yang tidak mungkin bagi mereka untuk turun ke lapisan bawah. Penurunan status akan terjadi apabila usaha yang mereka lakukan mengalami kebangkrutan (likuidasi), namun mereka akan cepat berkembang kembali dan mengalami peningkatan status karena akses terhadap permodalan serta modal mereka yang telah terbentuk. Lapisan yang selanjutnya adalah lapisan menengah adalah mereka yang secara pendapatan tidak berlebihan dan juga tidak berkekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya lapisan ini akan mengalami peningkatan status apabila mendapatkan harta warisan, selain itu, mereka juga dapat mengakses permodalan dan sumberdaya serta biasanya memiliki akses pengetahuan. Selanjutnya dalam hal penurunan status, lapisan menengah ini sama saja dengan lapisan atas. Penurunan akan terjadi apabila mereka mengalami kebangkrutan dalam usaha dan atau pencopotan pangkat dan jabatan.

Masyarakat yang berada pada lapisan bawah memerlukan upaya yang ekstra untuk melakukan peningkatan status hal ini disebabkan modal mereka untuk mengambil pinjaman belum ada. Mereka hanya mengandalkan tabungan dari hasil pekerjaan sehari-hari. Yang selanjutnya dari hasil tabungan tersebut barulah dibuat menjadi usaha kecil-kecilan dan Ketika mengalami peningkatan, akan mencoba melakukan pengembangan atau meluaskan usahanya. Selain itu yang menyebabkan lapisan bawah sulit berpindah, karena tidak memiliki akses terhadap sumberdaya dan permodalan serta pengetahuan yang terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendataan dan kajian DDP di Desa Lahabaru, dihasilkan beberapa kesimpulan:

- Luas Desa Lahabaru melalui pemetaan spasial berbasis pembangunan Data Desa Presisi Bulan Juli-Agustus 2023 adalah sebesar 117,230 Ha yang secara umum merupakan wilayah pertanian
- Penduduk Desa Lahabaru mayoritas makan dengan frekuensi 3 kali sehari, kemudian lebih dari 2 kali sehari dan frekuensi makan lebih dari 3 kali sehari relatif lebih sedikit.
- Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Lahabaru yaitu mayoritas penduduk Desa ini sebanyak 182 jiwa (18,96 persen) memiliki Ijazah di tingkat SMA/Sederajat. Sementara itu, untuk penduduk yang tidak memiliki ijazah di Desa Lahabaru tercatat berjumlah 241 jiwa (25,10 persen), kemudian diikuti penduduk yang memiliki ijazah SD/Sederajat sebanyak 245 jiwa (25,52 persen), ijazah SMP/Sederajat sebanyak 176 jiwa (18,33 persen) ijazah D-4/S-1 sebanyak 68 jiwa (7,08 %), Ijazah D-1/D-2/D-3 sebanyak 44 jiwa (4,58 persen) dan 4 jiwa (0,42 persen) memiliki Ijazah S-2.
- Dari jumlah penduduk berdasarkan keikutsertaan JKN-KIS/BPJS Kesehatan, terdapat 353 jiwa yang tidak mengikuti program JKN-KIS/BPJS. Adapun 374 jiwa merupakan Penerima Bantuan Iuran yang tersebar di setiap dusun. Sebanyak 60 jiwa tercatat sebagai peserta mandiri, 172 jiwa sebagai PUIK Negara dan 1jiwa sebagai PUIK Swasta serta.
- Jumlah keluarga berdasarkan tempat membuang sampah di Desa Lahabaru dibagi menjadi 3 (lima) kategori, yakni Sungai, Bakar, dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Terdapat 2 keluarga yang membuang sampah di sungai, 64 keluarga yang membakar sampahnya, dan 208 keluarga yang membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS).
- Dari hasil pendataan kualitatif, sejak Desa Lahabaru terbentuk di tahun 1977 diketahui bagaimana Desa Lahabaru mengalami dinamika pembangunan yang mempengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi dan infrastrukturnya. Sejalan dengan budaya minang, maka berbagai lembaga pemerintahan, adat dan kebudayaan serta kepemudaan memiliki pengaruh dan kedekatan dengan kehidupan penduduk Desa. Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh penduduk Desa Lahabaru adalah kesejahteraan petani. Terlebih, aktivitas pertanian merupakan pekerjaan yang dominan di Desa Lahabaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham I, Sjaf S, Darusman D. 2019. Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone . *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 17(2):245–255.
- Barlan ZA, Hakim L, Sjaf S. 2020. Instrumen Memahami Desa. Bogor: IPB Press.
- BPS. 2021. Village Potential Statistics of Indonesia 2021. Jakarta.
- Chambers R. 1995. Poverty and livelihoods: whose reality counts? Volume ke-7.
- Chambers R. 2006. Whats is Poverty? Who asks? Who Answers. Di dalam: Ehrenpreis D, editor. What is Poverty? Concepts and Measures. Brasilia: United Nations Development Programme. www.undp-povertycentre.org.
- Chambers R. 2008. Revolutions in development inquiry. London: Earthscan Dunstan House.
- Chambers R. 2013. Participation, Pluralism and Perceptions of Poverty. Di dalam: Kakwani N, Silber J, editor. Many Dimensions of Poverty. London: Palgrave Macmillan. hlm 140–164.
- Couldry N. 2004. Theorising media as practice. *Social Semiotics*. 14(2):115–132. doi:10.1080/1035033042000238295.
- Couldry N. 2020. Recovering critique in an age of datafication. *New Media Soc*. 22(7):1135–1151. doi:10.1177/1461444820912536.
- Couldry N, Powell A. 2014. Big Data from the bottom up. *Big Data Soc*. 1(2):1–5. doi:10.1177/2053951714539277.
- Creswell JW. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell JW, Clark VLP. 2017. Designing and Conducting Mixed Methods Research. London: Sage publications.
- Denzin NK, Lincoln YS. 2009. Pendahuluan Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif. Di dalam: Denzin NK, Lincoln YS, editor. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim L. 2022 Sep 27. Menata Ulang Demokrasi Indonesia dari Indonesia. Kompas.id. [diakses 2022 Okt 6]. <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/25/menata-ulang-demokrasi-indonesia-dari-desa>.
- Haq M ul H. 1976. the Poverty Curtain: Choices for the Third World. New York: Columbia University Press.
- Hudson P, Ishizu M. 2017. History of Number: An Introduction to Quantitative Approaches. London: Bloomsbury Academic.

- Kemendagri. 2012. Buku Panduan Sistem Informasi Profil Desa dan Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, Republik Indonesia.
- Kolopaking LM, Tonny F, Hakim L. 2020. Relevansi dan Jejak Pemikiran Prof. Dr. S.M.P. Tjondronegoro dalam Pendidikan Sosiologi Pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 09(1):42–54.
- Mehta AK. 2021. Estimates of Women’s Labour Force Participation: Rectifying Persisting Inaccuracies.
- Pitaloka RD. 2022. Kebijakan Rekolonialisasi: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Pedesaan [Disertasi]. Depok: Universitas Indonesia.
- Pitaloka RD, Hendriyani H, Eriyanto E, Haryatmoko H. 2022. Communication practice in village data collection. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*. 6(1):179–198. doi:10.25139/jsk.v6i1.4314.
- Ruslan K. 2019. Memperbaiki Data Pangan Indonesia Lewat Metode Kerangka Sampel Area. Jakarta. <https://www.researchgate.net/publication/335620893>.
- Sampean, Sjaaf S. 2020. The Reconstruction of Ethnodevelopment in Indonesia: A New Paradigm of Village Development in the Ammatoa Kajang Indigenous Community, Bulukumba Regency, South Sulawesi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*. 25(2):159–192. doi:10.7454/MJS.v25i2.
- Sampean, Wahyuni ES, Sjaaf S. 2019. The Paradox of Recognition Principles in Village Law in Ammatoa Kajang Indigenous Community. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 7(2):195–211. doi:10.22500/sodality.v7i3.28630.
- Sjaaf S. 2017 Des 15. Merebut Masa Depan Pertanian. *Kompas*.
- Sjaaf S. 2019. *Involusi Republik Merdesa*. Bogor: IPB Press.
- Sjaaf S. 2021 Agu 2. Covid 19, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran Di Pedesaan. *Kompas*.
- Sjaaf S, Elson L, Hakim L, Godya IM. 2020. *Data Desa Presisi*. Bogor: IPB Press.
- Sjaaf S, Kaswanto K, Hidayat NK, Barlan ZA, Elson L, Sampean S, Gunadi HFF. 2021. Measuring achievement of sustainable development goals in rural Area: A case study of Sukamantri Village in Bogor District, West Java, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 9(2). doi:10.22500/9202133896.
- Sjaaf S, Sampean, Arsyad AA, Elson L, Mahardika AR, Hakim L, Amongjati SA, Gandi R, Barlan ZA, Aditya IMG, et al. 2022 Sep. *Data Desa Presisi: A New Method of Rural Data Collection*. *MethodsX*.

- Talawanich S, Jianvittayakit L, Wattanacharoensil W. 2019. Following a wonderful overseas experience: What happens when Thai youths return home? *Tour Manag Perspect.* 31:269–286. doi:10.1016/j.tmp.2019.05.013.
- Tjondronegoro S. 1984. *Social Organization and Planned Development in Rural Java*. Oxford: Oxford University Press.
- Wijoyono E. 2021. The utilization of village-information system for integrated social welfare data management: actor-network theory approach in Gunungkidul regency. *Jurnal Teknosains.* 11(1):13. doi:10.22146/teknosains.60798.

“Ikhtiar Data Desa Presisi merupakan bentuk awal untuk mempercepat transformasi Indonesia mulai dari desa”

Dr. Sofyan Sjaf



MONOGRAFI DESA LAHABARU

Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara
2023